

EDISI #07 APRIL 2021

MEREALISASIKAN
SUMSEL MAJU
UNTUK SEMUA
AKANKAH AZIS
SYAMSUDIN
LOLOS?

MENEGAKKAN
BATANG
JADI
KAWASAN
INDUSTRI

KHOFIFAH
TENTANG
RA KARTINI
YANG JUGA
SANTRI

MANUVER POLITIK
DI SEKITAR RESHUFFLE

DIINCAR JOKOWI NADIEM MAKARIM MERAPAT KE MEGA

MAJU MUNDUR
RESHUFFLE

info indonesia INOVASI UNTUK NEGERI



IKLAN BACK COVER

RP 75.000.000

IKLAN 1 HALAMAN

RP 50.000.000

IKLAN ADVERTORIAL

RP 50.000.000

CENTER SPREAD

RP 80.000.000



*Kami Hadir
Memberikan
info Tersebut*

▶ **BEBERAPA MANFAAT DAN KEUNTUNGAN
PASANG IKLAN DI MAJALAH INFO INDONESIA**

▶ **IKLAN LEBIH AKURAT DAN TERTARGET
SESUAI DENGAN TOPIK PEMBAHASAN YANG ADA.**

▶ **LOKASI IKLAN YANG PRODUKTIF SEHINGGA MUDAH
DI LIHAT PARA PEMBACA INFO INDONESIA.**

▶ **HARGA YANG TERJANGKAU DAN BANYAK DISKON
UNTUK PARA PELANGGAN**

PENDIRI

Waherman St. Mangkuto, H. Zainuddin

DIREKTUR

Usman Rizal

PEMIMPIN UMUM

Aldi Gultom

PEMIMPIN REDAKSI

Gunawan Effendi

REDAKTUR PELAKSANA

Rio Taufiq Adam, Andika Salahudin

REDAKTUR

Andyanto, Aprilia Rahapit, Hesti Dimalia,
Rusdiyono, Benni Martha Daya, Yuliani

REPORTER

Dian Taressa, Desi Wulandari, Anugrah Dany,
Abu Bakar Usman, Rifky Ilmi, Pras Budi
Presetya, Ahmad Yani, Yuni Watiana, Mario
Ananta, Khoirur Rozi, Rahmad KR, Iwan
Fals, Heni Elsa Wulandari, Dedy Sagita, Nina
Iskandar, Jifran, Dian Taresa (Kalimantan
Tengah), Zaki (Kalimantan Timur), Basri
(Kalimantan Utara), Rizky Ananda (Nusa
Tenggara Barat), Abu Bakar Usman (Kepu-
lauan Bangka Belitung)

EDITOR & GRAFIS

Al Amin

TATA LETAK

Sujatmiko

MEDIA SOSIAL

Hesti Dimalia

KEUANGAN

Dra Nurhamida

SEKRETARIS REDAKSI

Niken Sri Astuti

PENGEMBANGAN BISNIS

Kiki Ibrahim

DISTRIBUSI

Abdul Muchtar

BANK ACCOUNT

A/N : PT. Wahana Multimedia
BCA : No Rek : 553-041-4321
KCP Olistia Jakarta Timur

100 HARI

Memasuki April, kita bersama berada di 100 hari kedua 2021. Bagaimana perjalanan 100 hari pertama yang berlalu bersama banyak masalah bangsa?

Namun optimisme, lebih penting lagi upaya mengatasi masalah, adalah jalan terbaik untuk melanjutkan kehidupan sebagai perorangan hingga warga bangsa ini. Sulit menyangkal kita berada dalam kesulitan. Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2020 merupakan yang terburuk sejak 150 tahun terakhir. Tercatat, ada 170 negara di dunia yang mengalami kontraksi akibat Covid-19.

Indonesia termasuk satu dari 170 negara yang mengalami kontraksi. Sepanjang tahun 2020, ekonomi RI mencatat terkontraksi -2,07 persen. Kontraksi dimulai pada kuartal II 2020 yakni -5,3 persen. Menteri Ani juga merinci, negara-negara yang masuk dalam jajaran negara G20 terkontraksi lebih dalam. Perancis -9 persen, India -8 persen, Italia -9,2 persen, Meksiko -8,5 persen, Inggris -10 persen, Kanada -5,5 persen, Brazil -4,5 persen, dan Arab Saudi -3,9 persen. Sedangkan negara tetangga kita di kawasan ASEAN tak luput dari kontraksi ekonomi. Singapura -6 persen, Filipina -9,6 persen, Thailand -6,6 persen, dan Malaysia -5,8 persen.

Toh pada 100 hari pertama 2021 banyak negara mulai menunjukkan kebangkitan ekonomi yang memukau sebagaimana dikemukakan oleh Dahlan Iskan. Ia mengemukakan, Tiongkok tumbuh hampir 20 persen tiga bulan pertama tahun 2021. Singapura hanya jalan di tempat: tumbuh hampir 0 persen –tepatnya 0,2 persen. Sedangkan Amerika Serikat tumbuh 5,4 persen. Itu sudah disambut dengan gegap gempita: sebagai tanda kembalinya ekonomi sebelum pandemi. India juga tumbuh mengejutkan: 12 persen. Tapi keadaan di sana sangat mengkhawatirkan. Covid-19 merajalela lagi.

Maka kuncinya, kata Dahlan, adalah penanganan Covid-19. Negara-negara yang ekonominya lebih cepat pulih ternyata mengunci (lockdown) wabah lebih awal.

Selanjutnya, mudah diduga bahwa menghadapi Covid-19 menunggu disiplin penyelenggara kebijakan publik dalam penerapan protokol 3T (*test, trace, and treat*), menguji, melacak, dan menangani penularan termasuk menerapkan vaksinasi. Selanjutnya, masyarakat juga perlu disiplin menerapkan 5M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, menghindari kerumunan, dan membatasi pergerakan di luar rumah).

Pelanggaran terhadap disiplin protokol kesehatan 3T dan 5M akan menentukan naik-turun angka penularan maupun kematian. Seperti pengalaman India yang pada pertengahan April 2021 sempat mencapai penularan hingga 300 ribu orang per hari beserta rentetan dampaknya.

Jadi, 100 hari kedua akan kita lihat lagi bagaimana perkembangan pandemi global ini. Ada yang berhasil menanganinya, namun lebih banyak yang gagal. Tersedia pilihan dari pengalaman nyata di seluruh dunia. ●

ALAMAT REDAKSI/IKLAN/PEMASARAN:

Jalan MPR III No. 5B, Kelurahan Cilandak Barat,
Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan (12430)
Telp / Fax : 021-278 123 97

Twitter : @1nfoindonesia
Facebook : infoindonesia.id
Instagram : @infoindonesia.idn
Email : redaksi@infoindonesia.id



DAFTAR ISI

EDISI
BULAN
APRIL
2021



06 INFO UTAMA

Isu reshuffle bergulir terus meski waktu pastinya masih belum jelas. Faktor nomenklatur merupakan salah satu yang menjadi kendala.



22 INFO SUMSEL

Sepanjang 2020, pertumbuhan ekonomi Sumsel bertengger di posisi enam dari 34 provinsi di seluruh Indonesia. Potensi tumbuh tahun ini, tema inklusif dan berkelanjutan menjadi pilihan untuk perencanaan pembangunan pada 2022 mendatang.



60 INFO PROFIL

Belakangan Arsjad Rasjid Prabu Mangkuningrat mencuat sebagai calon kuat Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Banyak yang berharap ia menjadi generasi baru pengusaha Indonesia yang dapat memulihkan dunia usaha di masa dan pasca Covid-19.

32 INFO SPESIAL

Rasa haru mengiringi Airin Rachmi Diany yang resmi menanggalkan jabatan Wali Kota Tangerang Selatan Selasa (20/4/2021). Setelah sepuluh tahun mengabdikan sebagai orang nomor satu di Tangerang Selatan, ia akhirnya meninggalkan Gedung Pemerintahan Kota Tangsel untuk terakhir kalinya.





64 INFO EKONOMI

PT Freeport Indonesia mendapat izin ekspor kon-
sentrat tembaga selama setahun pada 15 Maret
2020, sementara pembangunan smelter yang
menjadi syaratnya malah mandek.



72 INFO ISTANA

Banyak hal menjadi arahan Presiden Joko Wido-
do kepada para peserta Rapat Koordinasi Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pilkada
Serentak Tahun 2020. Namun, yang pertama kali
menjadi penekanan adalah orientasi sasaran dan
hasil perencanaan kerja.



88 INFO KHUSUS

Menjadi negara industri dengan pertanian yang
tangguh semakin menjauh dari kenyataan.
Adakah lautan masih memberi harapan?

- 3 DARI REDAKSI
- 18 INFO SUMUT
- 56 INFO PILKADA
- 76 INFO TEKNOLOGI
- 80 INFO SPORT
- 84 INFO WISATA
- 86 INFO SELEBRITI
- 98 KAJI





MAJU MUNDUR RESHUFFLE DAN SOAL NOMENKLATUR

Isu reshuffle bergulir terus meski waktu pastinya masih belum jelas. Faktor nomenklatur merupakan salah satu yang menjadi kendala.

Kali ini isu reshuffle kabinet beriringan dengan rencana peleburan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek). Juga pembentukan Kementerian Investasi.

Namun, perubahan nomenklatur atau tata nama kementerian atau lembaga harus berurusan dulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Pemisahan, penggabungan, dan pembubaran kementerian tersebut dilakukan dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kecuali untuk pembubaran kementerian yang menangani urusan agama, hukum, keamanan, dan keuangan harus dengan persetujuan

DPR.

Toh DPR sudah setuju soal nomenklatur kementerian/lembaga itu. Lalu apa masalahnya? Pada Rapat Paripurna DPR yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 9 April 2021 tercapai persetujuan penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta pembentukan Kementerian Investasi.

"Apakah hasil keputusan rapat Bamus pengganti rapat konsultasi terhadap pertimbangan penggabungan dan pembentukan kementerian dapat disetujui?" tanya Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ah-



mad yang memimpin sidang.

"Setuju," jawab anggota dewan yang hadir.

Dasco menerangkan, keputusan persetujuan terhadap rencana pemerintah menggabungkan Kemenristek ke Kemendikbud dan membentuk Kementerian Investasi tercapai setelah DPR menerima Surat Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian. Surat itu kemudian dibahas dalam Rapat Konsultasi pengganti Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR pada Kamis, 8 April 2021.

"Sesuai hasil rapat konsultasi pengganti rapat Bamus 8 April 2021 yang telah membahas dan menyepakati: a. Penggabungan sebagian tugas dan fungsi Kemenristek ke Kemendikbud sehingga menjadi Kemendikbud dan Ristek [dan] b. Pembentukan Kementerian Investasi untuk meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan," kata Dasco.

Rapat Paripurna DPR pada hari ini hanya dihadiri sebanyak 288 anggota

DPR. Berdasarkan laporan absensi kehadiran anggota DPR yang dibacakan Dasco saat membuka Rapat Paripurna DPR, diketahui bahwa 287 anggota dewan absen.

"Berdasarkan catatan sekretariat, 232 virtual dan 56 fisik. Dihadiri seluruh fraksi di DPR RI. Dengan demikian telah tercapai kuorum, perkenankan

kami membuka Rapat Paripurna ke-16 Masa Sidang 2020-2021, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum," ucap Dasco.

Begitulah, pada mulanya, perubahan nomenklatur dengan sendirinya akan berlanjut dengan perombakan kabinet. Isu pun berkembang.

Selanjutnya, beberapa hari kemu-



dian, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengungkapkan waktu diselenggarakannya reshuffle kabinet dalam waktu dekat.

Setelah mengikuti kebiasaan Presiden Jokowi terkait reshuffle kabinet, Ngabalin meyakini reshuffle kabinet kali ini akan dilakukan secara cepat. "Dari biasanya, saya tahu dan beberapa kali saya ikuti Bapak Presiden tidak akan lambat mengambil keputusan," ungkapnya, Selasa, 13 April 2021.

Juru Bicara Wapres Ma'ruf, Masduki Baidlowi pun membenarkan adanya

April 2021, sepekan setelah Ngabalin berbicara, perombakan kabinet belum terjadi juga.

Ngabalin tetap punya alasan. Ia menyebut butuh waktu dalam menyiapkan pos kementerian baru.

"Pertama adalah perubahan nomenklatur, kedua adalah pembentukan Kementerian Baru. Maka otomatis penataan kelembagaan itu menjadi sesuatu keniscayaan. Memang butuh waktu," ucap Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, Minggu, 18 April 2021.

lama," ucapnya.

Toh Ngabalin enggan menanggapi pergantian kabinet di luar dua nomenklatur baru. "Itu menjadi hak prerogatif presiden, tidak tahu (siapa saja yang masuk dan diganti). Kalau yang ada di sini (soal perubahan nomenklatur), harus kasih keterangan," katanya.

Toh pengamat politik dari Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa memiliki pandangan berbeda. Menurut dia, alasan reshuffle kabinet yang belum terlaksana itu lantaran Presiden Jokowi tengah mel-



isu reshuffle kabinet. "Tentu Wapres sudah rembukan, diajak rembukan oleh Presiden," kata Juru Bicara Wapres Ma'ruf, Masduki Baidlowi dalam konferensi pers secara daring, Senin, 12 April 2021.

Sementara, terkait pembentukan kementerian baru, Masduki menyebut hal itu diperlukan untuk kepentingan di masa depan. "Saya kira memang investasi itu penting ke depan. Tapi pembicaraan (masih) jauh, tidak bisa dibicarakan saat ini karena belum final, masih proses diselesaikan," lanjut Masduki.

Sedangkan Ngabalin mengungkapkan, Presiden Joko Widodo tidak tergantung pada siapapun memutuskannya. Ia pun membocorkan, reshuffle kabinet kali ini akan dilakukan dalam waktu sepekan. Namun, hingga 20

Menurut dia, Kemendikbud dan Riset bukanlah kementerian baru di Indonesia. Berbeda dengan Kementerian Investasi yang baru akan dibentuk. "Kalau kementerian baru, ada menteri investasi. Kalau kementerian Pendidikan, dan Kebudayaan, riset dan teknologi bukan barang baru," kata Ngabalin.

Alhasil Ngabalin mengakui belum mengetahui pasti tanggal Presiden Jokowi umumkan pergantian menteri. Namun dia memastikan Jokowi bakal secepatnya mengumumkan reshuffle.

"Surat dari DPR sudah disetujui apa yang disampaikan bapak Presiden. Presiden tidak lama yang begitu, cuma terkait penataan kelembagaan, Kalau ini (penataan kementerian baru) sudah selesai, tinggal waktu Presiden aja. Mudah-mudahan tidak dalam waktu

akukan deal politik dengan para partai koalisi.

"Dugaan saya Presiden Jokowi sedang tarik ulur dengan kepentingan politis lainnya salah satunya partai politik," katanya, Senin, 19 April 2021. Herry mengatakan, salah satu yang menjadi pertimbangan presiden yakni adanya dorongan dari publik untuk mengevaluasi kinerja kementerian pertanian, yang saat ini dirasa belum maksimal dalam mencapai target menuju swasembada pangan.

"Hal ini jelas akan berpengaruh langsung pada kursi Menteri Nasdem," katanya. Selain itu, lanjut Herry, adanya desas-desus masuknya Partai Amanat Nasional yang dikabarkan akan masuk dalam kabinet Indonesia Maju para reshuffle jilid kedua ini.

Menurutnya, hal ini justru bisa membuat partai pendukung pemerintah yang selama ini berada di barisan koalisi Indonesia maju akan merasa terganggu. Kata Herry, salah satu dampak jika Jokowi lebih mengedepankan politik akomodatif akan membuat profesionalitas di kabinet Indonesia Maju berkurang.

"Hal ini juga akan membuat kabinet mendatang sarat akan pressure politik ketimbang produktivitas kinerja yang independen dan profesional," tandasnya.

tak menawarkan kebijakan optimal terkait pembelajaran di masa pandemi.

Namun, Dedi berpendapat perombakan menteri dalam praktiknya merupakan dinamika yang bukan hanya terkait hak prerogatif presiden. "Ada andil pengaruh mitra koalisi yang juga menjadi pertimbangan. Kondisi itu memungkinkan reshuffle menasar kelompok non-parpol," tandasnya.

Nah, di mata pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, seharusnya pembentukan dan penggabungan kementerian da-

tangan kanan Jokowi," sambungnya.

Toh pengamat politik dari Universitas Andalas, Ilham Azre, mengungkapkan reshuffle tidak akan menasar pos kementerian lain di luar Kemendikbud-Ristek dan Kementerian Investasi. Menurut dia, kinerja sejumlah menteri sejauh ini sudah bagus dan tidak ada gonjang-ganjing politik yang berarti.

"Menurut saya nggak ada. Pertama dari sisi faktor politik sudah stabil. Indikator ekonomi juga sudah mulai membaik," ucap Ilham.

Yang pasti, perombakan kabinet kali



Sedangkan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, mengatakan masih ada beberapa menteri yang memiliki kinerja timpang dengan visi-misi presiden, selain melantik dua menteri baru pada reshuffle kabinet kali ini.

"Reshuffle memungkinkan menasar kementerian lain, tidak saja Kemristek atau Kemendikbud. Terutama menteri yang bidangnya terdampak pandemi," kata Dedi.

Ia pun menyinggung Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Menurutnya, Ida tidak mampu berbuat banyak mengatasi situasi sulit para pekerja yang kehilangan pekerjaannya karena pandemi Covid-19. Sementara Nadiem dinilai

pat menjadi momentum koreksi bagi menteri yang lain.

Namun, ia memprediksi Jokowi tidak akan melakukan reshuffle besar-besaran. "Secara politik pak Jokowi masih menjaga kestabilan politik," ujarnya.

Ujang sepakat bahwa perombakan kabinet juga mempertimbangkan situasi politik secara matang. "Sebenarnya kan, nama Nadiem sudah cukup dari dulu untuk di-reshuffle, tapi faktanya enggak. Lalu kebijakan Ida Fauziah Menaker, banyak PHK di sana-sini, banyak persoalan, ternyata kan enggak di-reshuffle juga," tutur Ujang.

"Misal Pak Pratikno, Jokowi Mania menjadikannya salah satu menteri yang harus di-reshuffle, enggak mungkin juga. Karena pak Pratikno salah satu

ini, jika terjadi juga, adalah yang kedua kalinya di periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi. Yang pertama boleh dibilang lantaran terpaksa oleh penangkapan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Menteri Sosial yang terlibat korupsi bantuan sosial, dan Menteri Kelautan dan Perikanan yang tersandung skandal ekspor benih lobster.

Kedua menteri yang tertangkap oleh KPK itu berasal dari partai politik. Maka muncul gagasan agar reshuffle kali ini memilih kalangan profesional sebagai menteri. Persoalannya kemudian, bagaimana dengan sikap partai-partai koalisi itu.

Jadi, soal nomenklatur sebenarnya sebagian saja dari kendala reshuffle. Dinamika politik lebih dari sekadar itu tentunya. •

TERPICU SOAL PENGGABUNGAN LEMBAGA PENELITIAN

Penggabungan dua kementerian yang terpisah memicu isu reshuffle. Namun, gabung-menggabung lembaga bukan persoalan sederhana sehingga imbasnya pun memerlukan waktu persiapan lebih lama.

Gagasan menggabungkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Riset dan Teknologi dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN) berlanjut dengan rentetan konsekuensi dan manuver politik. Bukan sekadar menjadikan Kemendikbud menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud dan Ristek).

Yang berkembang belakangan, adalah keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Jumat, 9 April 2021. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengirimkan surat terkait penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi

(Kemenristek) ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Pada surat Surat Presiden (Surpres) Nomor R-14/Pres/03/2021 yang dikirim Maret 2021 itu, Presiden menyebut pembentukan Kementerian Investasi. Pembentukan Kementerian Investasi disebutkan untuk meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan kerja. Surat Jokowi itu lantas dibahas pada Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Rapat itu berlangsung pada Kamis, 8 April 2021, dihadiri oleh pimpinan DPR RI dan pimpinan sembilan fraksi. Hasil rapat menyetujui dua usulan Presiden. Persetujuan itu lantas disahkan dalam Rapat Paripurna DPR

Seiring dengan itu, pada Minggu, 11



April 2021, Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) yang juga Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro berbicara dalam diskusi daring bertajuk Membangun Ekosistem Riset dan Inovasi. Namun Bambang juga pernah mengemukakan fungsi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang belum jelas, dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, Selasa, 30 Maret 2021.

Ketidakjelasan ini, kata dia, antara lain karena BRIN selama ini berjalan dengan ketiadaan dan tanpa kejelasan dasar hukum yang menaungi seluruh unit organisasi yang diperlukan guna menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien, akuntabel, dan optimal. Menurut putra Menteri Pendidikan di masa Orde Baru itu, sejak berdiri pada 2019 landasan hukumnya adalah Peraturan Presiden (Perpres) yang bersifat sementara, yakni Perpres 74 tahun 2019 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional yang berlaku sampai

31 Desember 2019.

Pada Maret 2020, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Perpres tentang BRIN. Agar Perpres menjadi efektif, selanjutnya mesti diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Namun, Perpres ini tak pernah diundangkan oleh KemenkumHAM hingga setahun kemudian.

Alasannya, ada keinginan BRIN harus terpisah dari Kemenristek agar dapat melakukan penelitian secara konkret. Sementara, menurut Bambang BRIN merupakan badan yang berada di bawah kementerian.

Setahun menemui jalan buntu, akhirnya diputuskan BRIN pisah dari Kemenristek. Tapi, Bambang masih meminta Kemenristek tetap berdiri sendiri dan mengusulkan Dikti yang ada di bawah Kemendikbud kembali masuk ke Kemenristek menjadi Kemenristekdikti.

"Tapi rupanya usulan saya bukan usulan yang diambil, keputusan yang diambil adalah yang digabungkan ke

Kemdikbud, karena Dikti ada di sana. Dikti tidak dikeluarkan tetap di situ (Kemendikbud) dan Kemenristek yang akan gabung dengan Kemendikbud," ungkapnya.

Usai persetujuan DPR terhadap penggabungan ini, Bambang mengaku belum mengetahui bagaimana nasib Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) berbasis riset seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN).

Apakah badan-badan ini tetap akan berdiri menjadi badan sendiri atau akan dilebur ke dalam BRIN. "Saya tidak tahu nanti BRIN dengan format apa, serta apa yang akan terjadi dengan LPNK saya juga susah menebak... Tapi ada versi yang menginginkan semua dilebur dalam BRIN. Ini yang tentunya kita harus menunggu bagaimana nantinya perkembangannya," ujarnya, Minggu, 11 April 2021.

Beberapa politisi menyetujui BRIN



• INFO UTAMA

menjadi semacam pusat yang menggabungkan berbagai lembaga riset. Anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Golkar DPR RI Maman Abdurrahman menganggap selama ini kiprah BRIN tak terlalu gesit karena dirangkap oleh Menteri Riset dan Teknologi. Sehingga peleburan disebut bakal memperkuat

dan Teknologi.

Sedangkan Mantan Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menganggap langkah penggabungan tidak tepat jika dilihat dari kaca mata kebijakan publik dan manajemen riset dan inovasi. Meski demikian, karena penggabungan telah dilakukan

merupakan dua lembaga dalam satu kesatuan seperti Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Pemisahan Kementerian Ristek dan BRIN dan peleburan Kementerian Ristek dalam Kementerian Dikbud ini mengarah pada Kemdikbud Ristek yang akan berperan sebagai pembuat kebijakan iptek (principal) dan BRIN sebagai instansi pelaksana kebijakan riset (agency).

Salah satu penjelasan atas keputusan Pemerintah ini merujuk pada teori-teori reformasi sektor publik berbasis Manajemen Pemerintahan Baru atau New Public Management (NPM), khususnya aplikasi principal-agent theory.

Secara konsep, hubungan principal-agent bukan hanya mengun-

tungkan kementerian sebagai pembuat kebijakan. Dalam hubungan ini

pembuat kebijakan selain dapat mengontrol output kebijakan melalui mekanisme kontrak jangka pendek (dengan hak dan kewajiban lebih jelas dan dapat dievaluasi secara berkala), mereka juga memberikan keleluasan terhadap instansi pelaksana untuk implementasi.

Skenario seperti ini akan memberikan BRIN otonomi dalam menjalankan kegiatan riset dan inovasi. Namun, skenario ini juga berpotensi melahirkan dua tantangan utama dalam implementasi kebijakan iptek nasional.

Tantangan pertama, penggabungan Kementerian Ristek ke Kementerian Dikbud menuntut perumusan ulang kebijakan iptek nasional yang kompleks. Berbeda dengan penggabungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) ke Kementerian Ristek pada awal Kabinet Indonesia Kerja pada 2014, penggabungan kali ini melibatkan dua instansi dengan portofolio yang lebih luas yaitu pendidikan dan kebudayaan dengan ip-



Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.



Gedung Riset dan Teknologi dan Inovasi Nasional (BRIN).

BRIN. Hal senada diungkap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) semakin kuat setelah penggabungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Riset

Yanuar menyarankan segera diperjelas struktur BRIN dan mengambil tenaga profesional untuk mengelola badan tersebut agar lebih responsif dan cepat bergerak.

Pada awal periode Kabinet Indonesia Kerja, Kementerian Ristek dan BRIN



**Profesor riset
LIPI, Carunia
Mulya Firdausy**

tek. Dengan kondisi tersebut, maka rencana strategis (Renstra) sebagai muara kebijakan kementerian baru ini akan menjadi sangat kompleks.

Ketika sebuah kebijakan memiliki cakupan yang terlalu luas dan menginginkan banyak hal, maka bahasa yang digunakan akan cenderung menjadi abstrak dan menimbulkan ambiguitas sehingga berpotensi menghambat implementasi. Situasi serupa terjadi pada kebijakan ambisius seperti Merdeka Belajar atau UU Cipta Kerja yang mengundang beragam interpretasi publik sehingga mempengaruhi proses implementasinya.

Kompleksitas juga dapat timbul karena bertambahnya tuntutan keterlibatan aktor yang lebih beragam yang bisa berdampak terhadap kesulitan pemilihan pelaksana. Misalnya, dalam pelaksanaan Prioritas Riset Nasional (PRN) 2020-2024 akan ada dorongan untuk melibatkan lebih banyak perguruan tinggi yang saat ini masih minim. Praktiknya aktor-aktor riset di PRN didominasi oleh lembaga pemerintahan non-kementerian (LPNK) seperti LIPI dan lembaga penelitian dan pengembangan di berbagai kementerian.

Selanjutnya kompleksitas itu juga dapat berpengaruh pada implementasi kebijakan dan program iptek nasional yang sedang berjalan seperti PRN 2020-2024. Salah satu kemungkinannya adalah penambahan riset ilmu sosial terkait budaya atau bahasa. Ini merupakan salah satu misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Rencana Strategis 2020-2024.

Sedangkan tantangan kedua, jika kelak BRIN berdiri sebagai lembaga implementasi yang otonom dan terpisah dari lembaga pembuat kebijakan, maka kondisi ini akan menempatkan BRIN dalam posisi sebagai instansi pelaksana yang memiliki banyak prinsipal.

BRIN sebagai lembaga pelaksana akan bertanggung jawab, minimal kepada Mendikbud-Ristek terkait kebijakan, Kementerian Keuangan dalam kaitan pengelolaan anggaran, dan Bappenas untuk urusan perencanaan. Kondisi semacam ini dapat berakibat buruk terhadap performa BRIN sebagai lembaga pelaksana kebijakan ip-

tek.

Nah, di mata Profesor riset LIPI, Carunia Mulya Firdausy, pilihan format kelembagaan BRIN yang akan ditetapkan dalam peraturan presiden, memiliki dua opsi antara merger dan holding seluruh atau sebagian badan litbang yang ada di kementerian/ lembaga (K/L). "Jika merger, berarti lembaga penelitian, seperti LIPI atau BPPT atau Badan Penelitian Kementerian Pertanian, Perdagangan sebagian atau seluruhnya dilebur di dalam BRIN. Sebaliknya, holding berarti sebagian atau seluruh badan litbang di K/L tetap seperti apa adanya," kata dia.

Namun ia menyayangkan rasionalitas dan latar belakang menjatuhkan pili-

bukan menjadi rahasia umum, yakni menyangkut koordinasi, sinergi, manajemen kerja, kepemimpinan, alokasi dana, serta penetapan program riset dan inovasi yang dinilai belum atau bahkan tidak profesional.

"Pertanyaannya, apakah permasalahan buruk dunia riset dan inovasi nasional harus dibayar khususnya dengan melakukan peleburan (merger) sebagian atau seluruhnya terhadap badan litbang yang ada di K/L ke dalam BRIN?" ungkap Profesor Riset Puslit Ekonomi-LIPI ini.

Jika ya, kata dia, apakah kalkulasi biaya dan manfaat, baik psikologis, budaya organisasi, sosial ekonomi, maupun administrasi telah diperhitungkan



Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) yang juga Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Bambang Permadhi Soemantri Brodjonegoro.

han format BRIN nyaris tidak banyak diketahui atau didiskusikan dengan melibatkan publik. Menurut Carunia, Informasi yang diperoleh publik menyangkut alasan pentingnya perubahan kelembagaan badan Litbang K/L yang tersebar selama ini hanya sebatas bahwa dunia riset dan inovasi yang ada saat ini tumpang tindih, berkualitas rendah baik hasil maupun SDM-nya.

Juga karena alasan infrastruktur dan anggaran terbatas dan tersebar di mana-mana serta banyaknya institusi litbang K/L. Faktor lainnya yang juga

secara matang, berjangka waktu panjang, dan berkesinambungan? Sebaliknya, pertanyaan yang sama juga harus dipertimbangkan jika holding dipilih atau kombinasi keduanya dalam pembentukan kelembagaan BRIN. Juga bagaimana kriteria pengambilan keputusan, manajemen kerja?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, perlu waktu dan rembugan bersama. Implikasinya, boleh jadi oleh sebab itu perombakan kabinet kali ini pun tidak secepat reshuffle sebelumnya. ●



RAKORNAS 2020

INTEGRASI RISET DAN INOVASI INDONESIA

PUSPIPTEK, TANGERANG SELATAN, 29 - 30 JANUARI 2020



DIINCAR JOKOWI NADIEM MAKARIM MERAPAT KE MEGA

Sejumlah manuver politik menjelang reshuffle mengarah pada siapa yang sebaiknya duduk sebagai menteri seiring penggabungan Kemendikbud dan Kemenristek. Apakah langkah petahana Mendikbud Nadiem Makarim menemui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri merupakan manuver juga?

Di tengah isu perombakan kabinet, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Nadiem mengungkapkannya di akun instagram pribadinya.

"Ngobrol dua jam sama Bu Mega, diskusi strategi mempercepat Merdeka Belajar dan Profil Pelajar Pancasila. Saya banyak belajar dari pengalaman beliau," kata Nadiem yang kerap disebut sebagai Mas Menteri, Selasa, 20 April 2021.

Merdeka belajar adalah program baru Kemendikbud sejak dipimpin Nadiem. Merdeka belajar memiliki konsep pendidikan di mana siswa dan guru bisa belajar bersama, dengan model pembelajaran yang tak hanya

satu arah.

Para guru harus memahami konsep merdeka belajar sebelum diajarkan kepada peserta didik. Sistem pengajaran juga bakal berubah dari yang semula hanya dalam kelas menjadi di luar kelas.

Toh pertemuan Nadiem dengan Megawati ini berlangsung di tengah isu reshuffle atau perombakan kabinet setelah DPR menyetujui permintaan Presiden Joko Widodo melebur Kemenristek ke dalam Kemendikbud, serta pembentukan Kementerian Investasi. Jadi, nuansa politiknya jelas.

Meski begitu, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan pertemuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Na-

diem Makarim dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak membahas reshuffle atau perombakan kabinet.

Menurut dia, PDIP selalu memegang prinsip bahwa perombakan kabinet hanya terjadi atas keputusan Presiden. "Jika kemudian ada yang mengaitkan dengan isu reshuffle, harus dipahami bahwa PDI Perjuangan selalu memegang prinsip bahwa reshuffle hanya terjadi atas keputusan Presiden. Pertemuan tersebut tidak membahas hal itu, karena persoalan pendidikan sebagai dasar kemajuan bangsa merupakan hal yang fundamental," ungkap Hasto, Rabu, 21 April 2021.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa kebijakan yang dicanangkan Nadiem dengan pendidikan yang memerdekakan dan berakar pada falsafah pemikiran Ki Hadjar Dewantara perlu mendapat dukungan. Dia mengatakan PDIP tidak melihat menteri sebagai individu, melainkan sebagai pembantu presiden yang harus menjalankan kebijakan presiden serta fokus pada upaya menjalankan konstitusi dan undang-undang.

"Pendidikan juga harus mengedepankan objektivitas, rasionalitas, dan semangat juang untuk menguasai ilmu pengetahuan. Atas pemaparan (Nadiem) bagaimana pendidikan juga membumikan Pancasila sangat menarik dan penuh dengan inovasi dan terobosan," sambung Hasto.

Sedangkan Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah mengungkapkan isi pertemuan antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim dengan Ketua Umum PDIP yang juga Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Megawati Soekarnoputri.

Pertemuan tersebut membahas soal revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Basarah membantah jika disebut mata pelajaran Pancasila yang tidak masuk ke dalam PP 57/2021 karena UU Sisdiknas itu menyebut bukan pelajaran wajib.

Menurut Ketua DPP PDIP itu, pelajaran Pancasila merupakan hal penting dalam sebuah negara. "Pancasila ada-

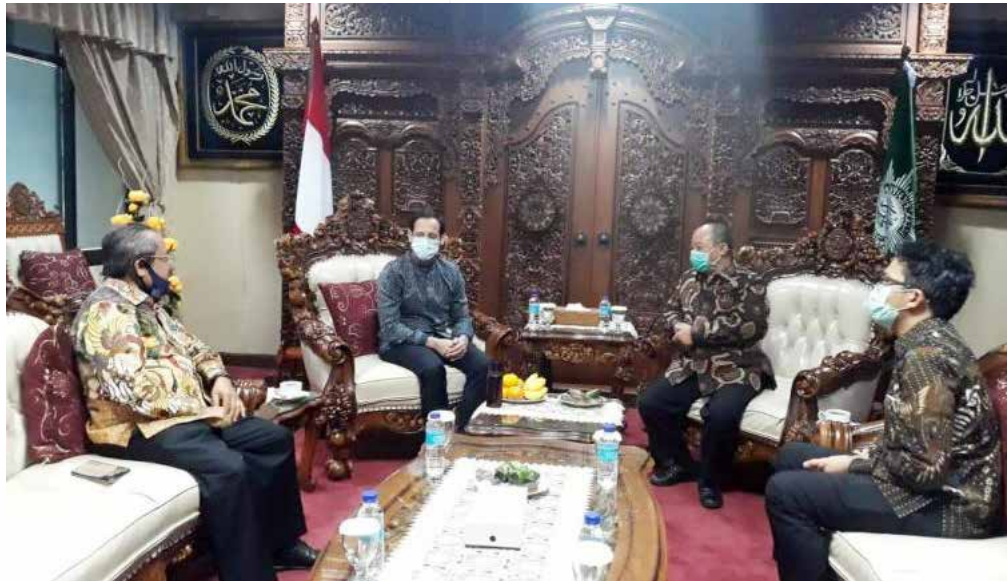
lah sumber dari segala sumber hukum negara sehingga semua pembentukan peraturan perundang-undangan harus bersumber dan tidak boleh menyimpangi apalagi bertentangan dengan Pancasila," kata Basarah, Rabu, 21 April 2021.

Basarah menambahkan, selain dalam UU 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi juga sudah diatur

masuk dalam Standar Pendidikan Nasional.

Pasalnya, sangat fundamental fungsi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita agar generasi muda kita tidak kehilangan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia.

"Selain sebagai dasar dan ideologi negara kita, Pancasila juga berfungsi sebagai kepribadian bangsa Indone-



lasi, sehingga kalau menurut saya mata pelajaran Pancasila itu wajib masuk dalam kurikulum pendidikan di semua jenjang," ucap Megawati.

Nadiem menyambut baik hasil diskusi dengan Megawati dan menyatakan persetujuannya agar dalam revisi PP 57 tahun 2021 akan memasukan mata pelajaran Pancasila dalam Standar Pendidikan Nasional.

Sementara itu, Megawati menjelaskan pentingnya mata pelajaran Pancasila dan Bahasa Indonesia di-

masuk dalam Standar Pendidikan Nasional.

"Sikap saya selaku Mendikbud setuju agar mata pelajaran Pancasila dimasukkan dalam revisi PP 57 tahun 2021 dengan nama mata pelajaran 'Pancasila dan Kewarganegaraan'," ujar Nadiem.

"Saya mohon bantuan semua pihak untuk mengawal revisi PP 57 tahun 2021 untuk memasukkan mata pelajaran Pancasila karena instansi yang berwenang untuk revisi PP tersebut bukan hanya pihak Kemendikbud," lanjutnya.

Pertemuan Mega dengan Nadiem berlangsung di kediaman Mega, Jalan Teuku Umar Nomor 27, Menteng Jakarta Pusat. Dalam pertemuan itu, turut hadir pula Menkumham Yasonna Laoly, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi, dan Hasto.

Namun, pertemuan itu juga memunculkan lagi isu kepentingan politik terkait Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Ini terkait dengan pernyataan Mega

mengawal langsung pembentukan Badan Riset Nasional (BRIN) tersebut sekitar setahun silam saat berbicara dalam Rakornas Kemenristek/BRIN 2020 yang juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju di kawasan Puspiptek Serpong, Tangerang Selatan, Kamis, 30 Januari 2020.

"Mohon maaf Pak Presiden, saya tak ada maksud untuk mencampuri urusan teknis riset dan inovasi. Rencana ini semata sebagai upaya agar dari awal mula BRIN dibentuk, jelas orientasi dan maksud bagi kepentingan rakyat, bangsa dan negara. BRIN adalah badan yang akan merintis terbukanya jalan lptek sebagai landasan merumuskan dan merencanakan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan, yang berpedoman pada haluan ideologi Pancasila," papar Mega.

Menurut Mega, diskusi yang akan BPIP adakan direncanakan mengundang berbagai pihak, bukan hanya Kementerian dan Lembaga terkait, tetapi juga pakar hukum dan pakar dari berbagai bidang keilmuan. "Kalau dipandang perlu, kita

akan undang perwakilan negara-negara sahabat. Kita bangsa yang terbuka menerima masukan, tetapi kita juga adalah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Saya bersama Presiden Jokowi, dan tentunya bersama seluruh rakyat Indonesia, akan terus berjuang untuk mewujudkannya," tandas Mega.

Setahun berlalu, boleh jadi polemik BRIN belakangan ini juga merupakan diskusi. Namun, rentetan dampaknya juga menunjukkan persoalannya memang tidak sederhana. Termasuk mempertahankan atau mengganti Nadiem.

Muncul pula gagasan agar figur dari Ormas Muhammadiyah yang duduk sebagai menteri di kementerian gabungan Dikbud dan Ristek. Namun Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti yang disebut pantas duduk sebagai menteri, mengemukakan belum ada komunikasi dengan Jokowi ihwal hal tersebut. "Sampai saat ini belum ada komunikasi dengan PP. Muhammadiyah. Kami wait and see saja," ujarnya, Jumat, 16 April 2021.

Sedangkan Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas menyebut, organisasinya menghormati hak prerogatif presiden. Namun jika diminta, ujarnya, banyak kader Muhammadiyah yang dinilai mumpuni untuk mengisi pos kementerian tersebut.

Apapun, manuver seputar reshuffle jelas faktual. Apakah usai pertemuan Mendikbud Nadiem dengan Mega, berbagai isu yang mengkritisi Mas Menteri akan surut? Waktu yang akan bercerita. ●



KRITIK UNTUK MAS MENTERI

Di tengah isu perombakan kabinet, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim harus menghadapi berbagai isu yang mengkritisnya. Beberapa isu itu antara lain menyangkut soal politik dan ideologi.

Yang terbaru, hilangnya nama Presiden RI ke-4 KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dalam kamus sejarah Indonesia menuai kontroversi. Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan menanggapi rentetan kontroversi Nadiem sebagai Menteri.

"Setidaknya ada tiga peristiwa beruntun dalam waktu berdekatan terkait Kemendikbud yang justru menambah atau menciptakan beban politik bagi Presiden Jokowi di mata segmen umat Islam tertentu," kata Arsul, Rabu, 21 April 2021.

Sebelumnya, Kemendikbud dituding menghilangkan jejak tokoh pendiri Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam Kamus Sejarah Indonesia Jilid I. Namun, Direktur Jenderal (Dirjen) Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid menjelaskan, buku Kamus Sejarah Indonesia Jilid I tidak pernah diterbitkan secara resmi.

"Dokumen tidak resmi yang sengaja diedarkan di masyarakat oleh kalangan tertentu merupakan salinan lunak (softcopy) naskah yang masih perlu penyempurnaan. Naskah tersebut tidak pernah kami cetak dan edarkan kepada masyarakat," ujarnya lewat keterangan tertulis, Senin, 19 April 2021.

Pernah muncul pula kritik terhadap Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 awalnya disampaikan Pengurus Pusat Muhammadiyah karena tidak ditemukannya kata 'agama' dalam draf rumusan paling mutakhir per 11 Desember 2020, terutama hilangnya frasa agama dari Visi Pendidikan Indonesia 2035. Hanya tercantum budaya sebagai acuan nilai mendampingi Pancasila.

"Saya bertanya, hilangnya kata agama itu kealpaan atau memang sengaja? Oke kalau Pancasila itu dasar (negara), tapi kenapa budaya itu masuk?" kata Ketua Umum Pimpinan

Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir dalam keterangannya yang dikutip dari laman resmi Muhammadiyah.or.id, Selasa, 9 Maret 2021.

Dalam tanggapannya Nadiem menyebut, Kemendikbud tidak akan pernah menghapus mata pelajaran agama. Untuk mengakhiri polemik, Nadiem merevisi draf Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035. Ia memastikan frasa agama akan dimuat secara eksplisit dalam Visi Pendidikan Indonesia dalam draf revisi.

"Kemendikbud menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas masukan dan atensi berbagai kalangan bahwa kata "agama" perlu ditulis secara

12/2012 jelas menyebut bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah; Agama; Pancasila; Kewarganegaraan; dan Bahasa Indonesia.

Mendikbud Nadiem menyebut, PP 57/2021 tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya karena disusun merujuk Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Hanya saja, ujar dia, PP 57/2021 sebagai aturan turunan memang tidak mencantumkan dua mata kuliah itu secara eksplisit dalam kurikulum pendidikan tinggi.



eksplisit untuk memperkuat tujuan Peta Jalan tersebut. Jadi, kami akan pastikan bahwa kata ini akan termuat pada revisi Peta Jalan Pendidikan selanjutnya," ujar Nadiem lewat akun Instagram @nadiemmakarim, Rabu, 10 Maret 2021.

Kritik lain menyangkut Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan yang menuai polemik karena tidak mencantumkan Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah wajib dalam kurikulum pendidikan tinggi. Isi PP ini tidak persis dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 35 UU

"Sehingga untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman lebih jauh, kami akan mengajukan revisi PP SNP terkait substansi kurikulum wajib," ujar Nadiem lewat keterangan tertulis, Jumat, 16 April 2021.

Surat permohonan revisi terhadap PP 57/2021 pun telah diajukan Nadiem Makarim kepada Presiden Jokowi lewat surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25059/MpK.A/HK.01.01/2021 perihal Ijin Prakarsa Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan tertanggal 16 April 2021. ●



AKANKAH AZIS SYAMSUDIN LOLOS?

Sejauh ini peran Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin yang terungkap dalam skandal Wali Kota Tanjung Balai dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi adalah mengenalkan para pelaku. KPK menyatakan sedang mendalami peran politisi Partai Golkar ini.

Kedatangan rombongan KPK ke Jalan Sriwijaya, Kelurahan Pahang, Kecamatan Datuk Bandar, kediaman Muhammad Syahril, Wali Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara pada 20 April 2021 membuat Azis Syamsuddin langsung berada di pusaran skandal upaya menghentikan langkah KPK menindak dugaan korupsi di kota pesisir timur Sumatera itu. Sebagai catatan, Aziz dan Syahril sama-sama kader Partai Golkar. Syahril saat ini menjabat sebagai ketua DPD Golkar Tanjungbalai.

Ketua KPK Komjen Firlil Bahuri mengungkapkan, pada Oktober 2020, penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju bertemu

dengan pengacara Maskur Husain di rumah dinas Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin. Dari sini perkara bermula.

Dalam pertemuan tersebut, Azis memperkenalkan keduanya terkait penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjung Balai yang sedang dilakukan KPK agar tidak naik ke tahap penyidikan. Dalam pertemuan itu, Azis menyampaikan Syahril tengah diselidiki lembaga antirasuah atas kasus dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjungbalai. Azis juga meminta Stepanus membantu Syahril.

"Dan meminta agar SRP (Stepanus) dapat membantu supaya nanti permasalahan penyelidikan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPK," kata Firlil dalam

jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 22 April 2021 malam.

Menindaklanjuti pertemuan di rumah dinas Azis, Stepanus lantas mengenalkan pengacara Maskur Husain kepada Syahrial untuk bisa membantu permasalahan yang dihadapinya. "SRP bersama MH sepakat membuat komitmen dengan MS terkait penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk tidak ditindaklanjuti oleh KPK dengan menyiapkan uang sebesar Rp1,5 miliar," ujar Firli.

Firli menyatakan Syahrial menyetujui permintaan tersebut dengan mentransfer uang secara bertahap sebanyak 59 kali melalui rekening bank milik Riefka Amalia, yang merupakan teman Stepanus. Total uang yang telah diterimanya sebesar Rp1,3 Miliar.

Pembukaan rekening bank oleh Stepanus Robin dengan menggunakan nama Riefka Amalia telah disiapkan sejak Juli 2020 atas inisiatif Maskur Husain. Setelah uang diterima, Stepanus kembali menegaskan kepada Syahrial dengan jaminan kepastian bahwa penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjung Balai tidak akan ditindaklanjuti oleh KPK.

Dari uang yang telah diterima oleh Stepanus Robin dari Syahrial, mengalir antara lain kepada Maskur Husain sebesar Rp325 juta dan Rp200 juta. Maskur juga diduga menerima uang dari pihak lain sekitar Rp200 juta sedangkan Stepanus Robin dari Oktober 2020 sampai April 2021 juga diduga menerima uang dari pihak lain melalui transfer rekening bank atas nama sebesar Rp438 juta.

Kini KPK telah menahan Stepanus Robin dan Maskur Husain sebagai tersangka. "Untuk kepentingan penyidikan, penyidik melakukan penahanan terhadap para tersangka, SRP dan MH mulai tanggal 22 April 2021 sampai dengan 11 Mei 2021," ujar Firli.

Firli mengatakan, Stepanus ditahan di Rutan KPK di Gedung Merah Putih, sementara Maskur ditahan di Rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur. Demi meminimalisir penyebaran Covid-19, lanjut Firli, maka Stepanus dan Maskur akan menjalani isolasi mandiri terlebih dahulu selama 14 hari di Rutan KPK Kavling C1.

Sebenarnya KPK juga menetapkan Syahrial sebagai tersangka. Namun, Pak Wali Tanjung Balai ini hingga Kami malam, 23 April 2021 masih diperiksa intensif di Polres Tanjungbalai. "Pega-

gumpulkan keterangan-keterangan dan bukti-bukti kepada semua pihak sehingga dapat kami rumuskan konstruksi perkara dengan meminta keterangan setidaknya delapan saksi," kata Firli.



wai kita (Penyidik KPK) masih di wilayah (Tanjungbalai). Kalau sudah di sini (Ditetapkan KPK) artinya tentu sudah ditahan," kata Firli.

Ia menjelaskan, perkara ini merupakan temuan KPK dan langsung ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan. "KPK mencari dan men-

Delapan saksi yang diperiksa tersebut, kata Firli, yakni Wali Kota Tanjung Balai periode 2016-2021, M Syahrial, Supir Wali Kota, Gunawan, pengacara Maskur Husain dan pihak swasta Riefka Amalia yang rekening banknya digunakan sebagai penampung dana dari Syahrial.

Selain itu, lanjut Firli, KPK juga me-

meriksa Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju, Swasta atau orang kepercayaan Maskur Husain, Ardianoor, swasta sekaligus adik penyidik KPK bernama Nico dan swasta sekaligus saudara Riefka Amalia, Rizki Cinde Awalia.

"Di samping pemeriksaan saksi-saksi tersebut, kami juga menemukan berbagai bukti-bukti lain, baik berupa dokumen, rekening buku tabungan, ATM dan bukti-bukti petunjuk lainnya," ucap Firlu.

Setelah melakukan proses penyelidikan dan menemukan bukti permulaan yang cukup, Firlu menyebut, KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan tersangka. "Tersangka pertama adalah

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Nah, bagaimana dengan Azis Syamsuddin? Firlu bilang, penyidik tengah mendalami peran Azis saat pertemuan tersebut. Apakah Azis hanya mengenalkan Stepanus dengan Syahril, atau ada perbuatan lain. "Kami akan dalam keterkaitan AZ, SRP, dan MS yang telah melakukan pertemuan. Tentu kami tidak bisa menjawab karena kami belum mendapatkan informasi keterangan dari AZ, ini perlu kami dalam," lanjutnya.

Firlu meminta waktu agar penyidik KPK bisa mengungkap rincian pertemuan tersebut. Sehingga nantinya bisa diketahui apakah kasus ini hanya melibatkan

dakan itu, dan apakah benar tindakan itu adalah tindak pidana. Ia mengatakan komisi antirasuah akan memegang teguh kecukupan barang bukti.

"AZ apakah masuk ke dalam kategori pelaku. Apakah itu yang melakukan, turut serta melakukan atau ikut membantu melakukan atau menyuruh melakukan seperti pasal 55 ayat 1 KUHP juncto pasal 56. Untuk itu, seperti yang kami sampaikan tadi bahwa KPK memberi catatan terhadap unsur-unsur pidana dan kami berpegang teguh terhadap unsur pembedaan," ujar Firlu.

Tak urung, Firlu lebih dulu memohon maaf atas perbuatan pihak internal yang mencoreng lembaga yang ia pimpin. "KPK memohon maaf, kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh anak bangsa karena ada cedera kejadian seperti ini. Tapi kami akan katakan komitmen KPK tak akan pernah bergeser dan tak akan mentolerir segala bentuk penyimpangan," kata Firlu.

Ia mengemukakan, seluruh pihak prihatin atas kejadian ini. Namun ia menegaskan tak akan mentolerir tindakan macam ini dan akan mengusut hingga tuntas. "Kita sama-sama prihatin dan kami tadi sampaikan permohonan maaf KPK kepada segenap anak bangsa bahwa ada saja pegawai yang melakukan kegiatan tidak terpuji yang mencederai kita semua," ucapnya.

Tak hanya itu, KPK menyatakan akan memperbaiki sistem agar peristiwa serupa tidak berulang. "Jadi itu perlu ada perbaikan sistem, kami tak alergi perbaikan. Kami dukung perubahan. Perubahan adalah suatu keniscayaan. Kalau kita ingin baik, kita harus lakukan perubahan. Kalau kita ingin lebih sempurna maka kita harus sering lakukan perubahan," kata Firlu.

Firlu pun memastikan penanganan kasus ini akan transparan dan diusut tuntas. "KPK memastikan penanganan perkara ini akan dilakukan secara transparan dan mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi prosesnya," ungkapnya.

Termasuk peran dan status Azis Syamsuddin tentu. Namun Azis masih diam meskipun banyak media telah berupaya meminta tanggapannya. Masih jadi pertanyaan apakah ia akan lolos atau ikut menjadi tersangka dalam skandal Tanjung Balai ini. ●



saudara SRP (Stepanus Robin Pattuju), tersangka kedua adalah MH (Maskur Husain), tersangka ketiga adalah MS (M.Syahril)," kata Firlu.

Atas perbuatan tersebut, Stepanus Robin Pattuju dan Maskur Husain disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 dan Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 UU No. 20 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan M.Syahril disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 UU No. 20 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah UU No. 20 Tahun 2001

Stepanus dan Syahril, atau ada peran pihak lain.

"Penanganan ini belum selesai hari ini, masih ada hari esok. Beri kami waktu untuk bekerja mengungkap seutuhnya apa konstruksinya, apakah ada melibatkan orang lain lagi," ucapnya.

Pada prinsipnya, Firlu mengatakan KPK tidak pernah berhenti untuk mengungkap semua perbuatan, dengan tetap berpijak kepada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan. Ketika berbicara dugaan korupsi, tutur dia, setidaknya ada lima hal yang harus dipenuhi, yaitu subyek hukumnya siapa, perbuatannya apa, apakah perbuatan itu dilakukan secara sengaja atau tidak, apakah ada sifat kesalahan dalam tin-

UJIAN LAGI UNTUK KETANGGUHAN AZIS SYAMSUDDIN

Sudah belasan tahun Azis Syamsuddin duduk sebagai anggota Parlemen. Dikutip dari laman resmi DPR RI, Aziz Syamsuddin adalah politikus dari Partai Golkar dan merupakan anggota DPR-RI Komisi III. Kelahiran Surakarta, 31 Juli 1970, Azis saat ini menjabat sebagai salah satu Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024.

Perjalanan kariernya di parlemen bermula pada 2004. Saat itu, Aziz Syamsuddin menjadi anggota Komisi III DPR RI, membawahi bidang hukum, hak asasi manusia dan keamanan. Di periode yang sama, ia juga menjadi Wakil Ketua Komisi III.

Lulusan Fakultas Hukum Universitas Trisakti ini pernah bekerja sebagai pengacara dan tergabung dalam kantor Pengacara Gani Djemat dan Partner sejak tahun 1994 hingga 2004. Pada 2004, ia mencalonkan diri sebagai legislatif dari daerah pemilihan (dapil) Lampung II.

Dengan latar belakang advokat dan juga perannya di Komisi III DPR, Azis memang banyak mengurus persoalan hukum. Malah ia pernah beberapa kali disebut dalam berbagai perkara. Selain kasus suap penyidik KPK, nama Azis Syamsuddin juga beberapa kali disebut dalam beberapa perkara. Dalam perkara Djoko Sugiarto Tjandra, misalnya, Mantan Kadiv Hubinter Polri, Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte menyebutkan adanya restu dari Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin untuk membantu pengusaha Tommy

Sumardi mengecek status *red notice* buronan Djoko Tjandra. Hal ini disampaikan Napoleon saat bersaksi di sidang lanjutan perkara dugaan suap terkait pengurusan penghapusan nama Djoko Tjandra dari daftar *red notice* Polri. Napoleon Bonaparte bersaksi untuk terdakwa Tommy Sumardi.

Menanggapi soal ini Azis menegaskan tak memiliki hubungan apapun dalam kasus ini. "Sudah dibantah sama Pak Tommy (Tommy Sumardi), sudah dibantah," kata Azis Syamsuddin di kompleks gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu

(25/11/2020). Menurut dia, topik pembicaraan telepon itu adalah Perpres pelibatan TNI dalam penanganan terorisme.

Pernah pula Azis Syamsudin dilaporkan Perhimpunan Advokat Pro-Demokrasi, Agus Rihat ke Mahkamah Kehormatan Dewan atas dugaan suap dalam pengesahan Dana Alokasi Khusus (DAK) Lampung Tengah tahun 2017. Perkara ini menyeret mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa.

Menurut Agus, Azis diadukan atas dugaan meminta *fee* untuk pengesahan DAK Lampung Tengah tahun 2017. Mengutip keterangan Mustafa, Azis meminta *fee* sebesar 8 persen dari DAK 2017 Lampung Tengah yang berhasil disahkan. Pada 2017 itu, politisi Golkar tersebut menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran DPR.

Azis membantah menerima uang namun dia menghargai proses yang berjalan. Dia berharap pelaporan tersebut bukan politisasi untuk pembunuhan karakter. "Sebagai warga negara saya menghargai proses yang sedang berjalan, dan terkait dengan diri saya saya, saya berharap tidak dipolitisasi yang mengarah kepada pembunuhan karakter," kata Azis.

Kini banyak yang menunggu keterangan Azis dalam perkara Wali Kota Tanjung Balai. Sekaligus mengujinya sebagai politisi yang sudah duduk di parlemen sejak 2004 lalu. •





► Musrenbang Sumsel 2022

PERTUMBUHAN INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN

Sepanjang 2020, pertumbuhan ekonomi Sumsel bertengger di posisi enam dari 34 provinsi di seluruh Indonesia. Potensi tumbuh tahun ini, tema inklusif dan berkelanjutan menjadi pilihan untuk perencanaan pembangunan pada 2022 mendatang.

Dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Sumsel Tahun 2022, Gubernur Herman Deru mengemukakan lagi bahwa ekonomi Sumatera Selatan berada di peringkat enam nasional meskipun Covid-19 membuat pertumbuhan menyusut.

Terkait upaya menjaga pertumbuhan ekonomi itu, Gubernur HD mengemukakan pentingnya penyamaan persepsi bahwa apapun prestasi Provinsi terkait dengan pertumbuhan di tingkat ka-

bupaten dan kota. Peringkat ke enam dalam pertumbuhan di antara 34 provinsi di Indonesia, kata dia, juga merupakan kinerja gabungan dari pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Sumsel.

Oleh sebab itu, kata dia, Pemprov akan mendukung program-program strategik daerah yang sangat mungkin digunakan untuk memperbaiki prestasi daerah. "Pemprov Sumsel akan membantu mempertahankan prestasi-prestasi daerah yang telah diraih dalam rangka mensejahterakan masyarakat," ujarnya dalam acara Musrenbang yang berlang-

sung di Hotel Santika Premier Bandara Palembang, Jumat, 23 April 2021.

Sebelumnya, Gubernur HD mengemukakan rincian perekonomian Sumsel sepanjang 2020 pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran (TA). 2020 dalam Rapat Paripurna XXVIII DPRD Provinsi Sumsel, awal April 2021 lalu. "Pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan sedikit mengalami kontraksi mencapai sebesar -0,11 persen. Namun capaian ini masih tertinggi ke-2 se-Sumatera serta peringkat keenam nasional dan lebih baik

dibandingkan dengan capaian Nasional sebesar -2,07 persen,” ungkapnya.

Selanjutnya, tentang kesenjangan ekonomi, Gubernur HD mengemukakan, Gini Rasio Sumatera Selatan per 2020 mencapai sebesar 0,339 (lebih rendah dibandingkan dengan Tahun 2019 yang sebesar 0,331), lebih rendah dibanding Nasional 0,385. “Ini menunjukkan bahwa kesenjangan antarpendapatan di Sumatera Selatan termasuk dalam kategori rendah,” katanya

Selain itu, Herman Deru mengungkapkan, tingkat inflasi Sumatera Selatan per 2020 tercatat sebesar 1,50 persen jauh lebih rendah dibandingkan dengan angka inflasi nasional sebesar 1,68 persen. “Hal ini menunjukkan harga bahan pokok di Sumatera Selatan cukup stabil,” tandasnya.

Untuk tahun ini, Bank Indonesia mencatat, pertumbuhan ekonomi Sumsel diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020, sejalan dengan membaiknya prospek perekonomian domestik dan global. Membaiknya aktivitas perekonomian global yang didorong oleh implementasi vaksinasi Covid-19 di banyak negara dan berlanjutnya kebijakan fiskal dan moneter mendorong peningkatan kinerja dari sisi permintaan dan lapangan usaha.

Tren pemulihan sudah mulai terlihat sejak dibukanya kembali beberapa sektor utama dari pertengahan tahun 2020, mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 akan tumbuh lebih tinggi. Sejalan dengan hal tersebut, perbaikan permintaan global di beberapa negara yang sebaran virusnya mulai turun, mendorong kembalinya aktivitas manufaktur sehingga memberikan dampak positif kepada kinerja ekspor. Kinerja ekspor diperkirakan akan meningkat dan menopang ekonomi tumbuh lebih tinggi.

Sedangkan dalam Musrenbang 2022, Gubernur HD berharap terjalin konektivitas antarkabupaten dan kota di Sumsel. “Hari ini Pemprov Sumsel selenggarakan musrenbang Prov menyusun rencana kerja Pemda tahun 2022. Di musrenbang ini masing-masing daerah menyampaikan programnya untuk dijadikan sebuah konektivitas agar visi misi sumsel maju untuk semua bisa terangkum, karena tidak ada pembangunan yang dilakukan secara parsial dan sendi-

ri-sendiri,” katanya.

Terkait dengan kinerja ekonomi Sumsel yang bertengger di posisi enam nasional, Gubernur HD mengajak para kepala daerah di tingkat kabupaten dan kota untuk meningkatkan pendapatan asli daerah masing-masing. “Sesuai potensi masing-masing melalui pembentukan BUMD atau kemitraan. Juga setiap perencanaan ke

Kepala BPK Perwakilan Prov Sumsel, Harry Purwaka, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumsel, Hari Widodo, Anggota DPD RI, Arniza Nilawati, Kepala OJK Kantor Regional VII Sumbagsel, Untung Nugroho, Rektor Unsri Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE, Bupati/Walikota se-Sumsel, Ketua DPRD Se-Sumsel, Para Kepala OPD Prov Sumsel.



depan agar bekerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi di Sumsel, agar dalam kinerja kita ada yang memantau dari kalangan akademisi. Saya harap Musrenbang dilakukan dengan baik agar hasilnya maksimal,” ungkapnya.

Turut hadir dalam acara Musrenbang Provinsi itu antara lain Ketua DPRD Sumsel, Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH, MH,

Secara virtual, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Bappenas RI, Dr Ir. Subandi Sardjoko, M.Sc, mengemukakan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022 yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi birokrasi. Fokus pembangunan RKP 2020 yaitu industri, pariwisata, ketahanan pangan, UMKM, infrastruk-

tur, transformasi digital, pembangunan rendah karbon, reformasi perlindungan sosial, reformasi pendidikan dan keterampilan, dan reformasi kesehatan.

"Sumsel dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi melalui proyek strategis daerah, antara lain pengembangan KEK, Pelabuhan Tanjung Carat dan pembangunan lainnya," ujarnya.

Subandi juga mengemukakan, sembilan usulan Pemprov Sumsel telah tertuang RKP 2022. Selanjutnya, ia berharap

secara rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional berada di peringkat 6.

"Apresiasi juga kami berikan kepada Prov Sumsel yang telah konsisten bertahan dalam meningkatkan belanja APBD meski di tengah pandemi Covid-19, sehingga pendapatan Sumsel meningkat dari tahun, 2019, 2020, 2021. Kab/kota bisa mengikuti langkah-langkah yang diambil Prov Sumsel," katanya.

Namun Hamdani pun menyampaikan catatan agar Sumsel mendongkrak lagi

capai Rp10,20 triliun, sehingga PAD baru berkontribusi sebesar 42,98 persen terhadap pendapatan daerah tersebut.

Dia melanjutkan pihaknya juga menyoroti tren belanja pegawai yang lebih besar dibanding belanja modal pada tahun anggaran 2021. Rasio belanja modal turun jadi 18,22 persen atau senilai Rp1,95 triliun dari tahun sebelumnya yang sebesar 21,58 persen atau senilai Rp2,3 triliun. Sementara untuk belanja pegawai cenderung meningkat dari semula 19,33 persen atau senilai Rp2,06 triliun menjadi 20,09 persen atau senilai Rp2,15 triliun.

Sedangkan Gubernur HD mengemukakan sudah berupaya meningkatkan PAD sesuai dengan potensi yang ada. "Melalui pembentukan BUMD dan kemitraan, juga di sini masih ada PI (participating interest) yang belum jalan, padahal ini adalah potensi untuk PAD kita," katanya.

Menurut HD, Sumsel merupakan provinsi yang punya andil terhadap pendapatan negara. Bahkan, lanjutnya, kontribusi itu pun tidak terhitung dalam kucuran dana yang dialirkan pusat ke daerah. "Kita tidak perlu baper kalau dibanding masih bergantung pada bagi hasil, karena Sumsel ini sudah banyak menyuplai [pendapatan negara]. Untuk meraih PAD setinggi-tingginya juga tetap kami jalankan," ujarnya.

Sedangkan Kepala Bappeda Sumsel, Dr. Ir. Firmansyah, M.Sc, mengungkapkan terdapat lima prioritas pembangunan Prov Sumsel yaitu, percepatan penurunan kemiskinan dan stunting, pembangunan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan produktivitas pertanian, investasi, industri, perdagangan, UMKM dan pariwisata.

Selanjutnya pengembangan kualitas SDM yang Madani dan berprestasi, pemerataan pembangunan melalui peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas, pelestarian lingkungan dan penanggulangan bencana, serta optimalisasi reformasi birokrasi dan stabilitas keamanan.

Dalam acara ini juga dilakukan pemberian penghargaan pembangunan daerah kab/kota di Sumsel atas kualitas perencanaan kab/kota di Sumsel. Terbaik tingkat Kab, pertama Musirawas, kedua OKU Timur, dan ketiga Muratara. Tingkat kota, pertama Palembang, kedua Pagar Alam, dan ketiga Prabumulih. ●



agar Pemprov Sumsel menyiapkan dukungan kegiatan dalam RKPDP penyusunan RKP 2022. Langkah ini menyatakan tekad untuk mewujudkan Sumsel yang lebih maju.

Di tempat yang sama, Staf Ahli Menteri bidang ekonomi Kemendagri, Dr. Hamdani Ms, mengapresiasi tema musrenbang Prov Sumsel yang telah sesuai dengan fokus RKP 2022. Di tengah pandemi covid-19, Sumsel juga telah memberikan kontribusi yang baik dimana

pendapatan asli daerah (PAD)-nya yang berada di peringkat sembilan nasional. Ia menegaskan, PAD Sumsel masih berpotensi untuk meningkat.

Berdasarkan catatan Kemendagri, Sumsel masih masuk dalam 10 besar provinsi dengan PAD tertinggi pada tahun anggaran 2021, menempati peringkat ke-9. Hamdani memaparkan PAD Sumsel pada tahun anggaran 2021 tercatat senilai Rp4,37 triliun. Sementara total pendapatan daerah Sumsel men-

9 USULAN PEMBANGUNAN UNTUK PEMERINTAH PUSAT

Pemerintah pusat menerima sebanyak sembilan usulan pembangunan di Sumatera Selatan untuk masuk dalam rancangan rencana kerja pemerintah atau RKP tahun 2022. Deputy Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Subandi Sardjoko mengatakan bahwa pihaknya meminta agar pemerintah daerah mendukung program yang diakomodir dalam rancangan RKP tersebut.

"Pemda dapat fokus untuk pembebasan lahan pada proyek infrastruktur, mengawal pembahasan anggaran, membuat regulasi serta studi untuk kajian kelayakan maupun DED [detail engineering design] terhadap proyek yang diusulkan," jelasnya dalam acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Sumsel Tahun 2022, Jumat, 23 April 2021.

Sembilan usulan tersebut, antara lain pembangunan jaringan irigasi di Lematang, Kota Pagaralam, dan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). "Selain itu kami juga menerima usulan untuk subsidi pelayanan kereta api Palembang—Indralaya dan subsidi operasional LRT Palembang," katanya.

Kemudian, penyediaan air baku kawasan perkotaan melalui pembangunan sistem penyediaan air minum

(SPAM) di Kalidoni, Kota Palembang, dengan kapasitas 250 liter per detik. "Pembangunan SPAM juga diusulkan untuk daerah Sekar Jaya, Baturaja Timur," kata dia.

Subandi melanjutkan pemda di Sumsel juga mengusulkan pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal skala kota. Usulan lain yang masuk juga berasal dari Pemkot Palembang berupa pembangun fasilitas pengendalian banjir di Sungai Lambidaro-Sekanak Kota Palembang.

Menurut dia, pemda di Sumsel memang perlu mengoptimalkan infrastruktur pelayanan dasar, terutama air bersih, di samping infrastruktur yang menunjang konektivitas, mulai dari jalan, pelabuhan hingga kawasan industri (KI) dan kawasan ekonomi khusus (KEK). Oleh karena itu, kata dia,

Sumsel harus juga dapat merealisasikan pembangunan KEK Tanjung Api—Api (TAA), KI Tanjung Enim dan New Palembang Port di Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin.

Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan bahwa Pelabuhan Tanjung Carat adalah pilihan utama untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi Sumsel. "Semua daerah yang punya outlet untuk ekspor komoditasnya pasti memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang cepat," katanya.

Gubernur pun meyakini Pelabuhan Tanjung Carat dapat terwujud lantaran didukung mudahnya penyediaan lahan untuk infrastruktur tersebut. "Istimewanya tidak ada pembebasan tanah lagi karena lahannya ada yang milik Pemprov Sumsel dan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup," ujar Herman. ●





MEREALISASIKAN SUMSEL MAJU UNTUK SEMUA

Baru saja menyampaikan pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2020 pada Rapat Paripurna XXVIII DPRD Provinsi Sumsel, pada Senin, 12 April 2021, Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru melanjutkan kesinambungan upayanya memajukan Sumsel untuk semua dengan meresmikan dan menyampaikan bantuan pembiayaan untuk beberapa kabupaten dan kota dalam wilayah provinsinya.

Langkah ini tentu saja merupakan realisasi upaya mencapai Sumsel Maju untuk Semua yang menjadi gagasan pemerintahan provinsi di bawah kepemimpinan Gubernur HD. Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), misalnya, terdapat 16 sasaran yang setiap tahun dikejar dengan beberapa prioritas pembangunan. Antara lain, pembangunan Sumber Daya Manusia dan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Penguatan Konektivitas, Kualitas Infrastruktur dan Energi, Pertumbuhan

Ekonomi yang Inklusif dan Pengurangan Kemiskinan, Peningkatan Kedaulatan Pangan dan Kualitas Lingkungan Hidup, serta Stabilitas Keamanan dan Kehidupan Beragama.

Untuk kali ini, Gubernur HD meresmikan sejumlah proyek infrastruktur bantuan Provinsi Sumsel untuk kabupaten dan kota. Ini merupakan bagian dari upaya mencapai target penguatan konektivitas bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Sambutan positif pun mengalir deras sebagaimana ungkapan sejumlah figur berikut ini:

41 Proyek di Empat Lawang

Bupati Empat Lawang H. Joncik Muhammad yang didampingi Wakil Bupati Yulius Maulana atas nama Masyarakat Empat Lawang mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Bupati mengakui anggaran Empat Lawang sangat terbatas, padahal usaha dan keinginan banyak.

Tanpa bantuan dari provinsi mustahil semua ini bisa terlaksana. "Tahun 2021 saya sudah memaparkan apa saja kebutuhan yang mendesak. Bayangkan



tanpa Rp94 Miliar di 2019 dan tanpa 134 Miliar tahun 2020 apa jadinya Empat Lawang,” ujar Bupati Joncik tentang bantuan dari Provinsi untuk kabupatennya.

Salah satunya adalah jalan poros yang menghubungkan Kecamatan Tebing Tinggi dan Pendopo, diambil alih provinsi lantaran perbaikan kerusakan yang sering terjadi di jalan tersebut tidak dapat diatasi menggunakan dana APBD Daerah yang diketahui sangat terbatas. Pada tahun lalu, tepat di HUT Empat Lawang yang ke -13, Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad mengusulkan kepada Gubernur, agar jalan tersebut diserahkan ke provinsi, dan disetujui Gubernur Herman Deru

Persetujuan pengambilalihan jalan tersebut dilakukan, saat peresmian 41 item infrastruktur pembangunan di kabupaten Empat Lawang dengan pembiayaan APBD Provinsi Sumsel tahun 2019 - 2020. Secara simbolik acara itu berlangsung tepat di simpang tiga jalan Poros Tebing Tinggi Empat Lawang juga bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun kelahiran kabupaten yang terbentuk sejak 21 April 2007 ini.

Secara keseluruhan, Gubernur HD menegaskan ada 41 item pekerjaan di Kabupaten Empat Lawang dalam dua

tahun Anggaran, yaitu tahun 2019 dan 2020. Menurut dia, bukan jembatan saja atau sekolah saja, melainkan juga infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mengembangkan potensi ekonomi dan bisnis di Empat Lawang.

“Kita berdoa saja Empat Lawang dapat hadiah nanti. Pembangunan sudah jalan tinggal kita mencari dampaknya, yaitu ekonomi bagus. Tidak ada guna penghasilan 10 juta perbulan tapi belanjanya 11 juta, mending penghasilan 600 ribu perbulan tapi pengeluaran 300 ribu perbulan,” ungkap mantan Bupati OKU Timur ini.

58 Proyek di Lahat

Bupati Lahat Cik Ujang atas nama warga Lahat mengucapkan terima kasih kepada HD yang telah memberikan bantuannya dalam menuntaskan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lahat. Utamanya proyek mangkrak yang sulit diatasi oleh pemerintah setempat, seperti penyelesaian pembangunan Jalan Lingkar Luar Kota Lahat yang panjangnya kurang lebih 11 km.

“Karena luas wilayah Kabupaten Lahat ditambah dengan terbatasnya APBD Lahat antara Rp 1,7 hingga 1,9 triliun. Tidak mungkin proyek besar tersebut

dapat diselesaikan oleh Kabupaten Lahat sendiri. Tanpa bantuan dari Gubernur Sumsel. Untuk itu Pak Gubernur, atas nama masyarakat Kabupaten Lahat kami ucapkan terima kasih,” ucap Cik Ujang.

Atas kucuran bantuan dana dari Pemprov Sumsel, ia mengatakan kini lebih dari 10 kecamatan di Kabupaten Lahat telah menikmati jalan cor beton. Bahkan ada salah satu wilayahnya lebih dari 34 tahun lalu tidak tersentuh oleh pembangunan. Namun kini semua sudah berubah, kini warga mulai dari perkotaan hingga pedesaan sudah menikmati infrastruktur atas bantuan Gubernur HD. “Sebagai wujud syukur, dan ungkapan terima kasih kepada Gubernur Sumsel, mereka memotong sapi,” ungkapnya.

Sebagai informasi, item infrastruktur yang diresmikan kali ini meningkatkan konektivitas Kabupaten Lahat dengan kabupaten dan daerah sekitarnya melalui perbaikan jalan. Antara lain peningkatan jalan batas Kabupaten Muara Enim - SP Air Dingin, peningkatan jalan Muara Sibau - SP Embacang, pembangunan 3 jembatan penghubung, yaitu Jembatan Pangi I tahap 2, Jembatan Air Mulak Kabupaten Lahat, dan Jembatan Air Lematang. Ada juga pembangunan tahap I Rumah Sakit Pratama, dan juga internet

desa, serta pembangunan fisik dan non fisik lainnya.

Sedangkan Gubernur HD mengemukakan, 58 item proyek yang telah tuntas dibangun pada TA 2019 dan 2020 di Kabupaten Lahat seluruhnya didanai oleh APBD Sumsel yang dikucurkan sebagai apresiasi Pemprov Sumsel atas upaya pemerataan pembangunan yang diarahkan untuk kesejahteraan

menikmati listrik, internet dan IT yang saat ini sudah menjadi kebutuhan hidup orang banyak,” ungkapnya.

46 Proyek di Musi Rawas

Bupati Musi Rawas Hj Ratna Machmud pun mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan atas bantuan pendanaan untuk peningkatan infrastruktur dalam wilayah

sel, ia mengatakan tentunya sangat membantu Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam membangun infrastruktur, apalagi wilayah Kabupaten Musi Rawas cukup besar yang meliputi 14 Kecamatan dengan 186 Desa dan 13 Kelurahan.

“Semoga ke depan kerja sama dalam peningkatan infrastruktur terus berlanjut untuk mewujudkan Musi Rawas Mandiri, yang Maju Mandiri dan Bermartabat,” ucap Bupati.

Di Musi Rawas, Gubernur HD meresmikan 46 kegiatan infrastruktur. Peresmian tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti digital dan penekanan tombol sirine di Lapangan F Trikoyo Kecamatan Tugumulyo, Selasa, 20 April 2021.

Dalam sambutannya, Gubernur HD mengatakan dari infrastruktur yang telah terbangun tentu harus bersamaan dengan sumber daya manusia yang memadai, yang merupakan satu keselarasan yang harus berkesinambungan antara SDM dan pembangunan itu sendiri. “Saya harap mutu pembangunan infrastruktur juga bermutu pemanfaatannya, jika irigasi untuk peningkatan produksi, jika rumah sakit untuk kualitas pelayanan kesehatan, dan jika pasar berarti harus menumbuhkan ekonomi di sekitar,” kata Gubernur HD.

15 Proyek di Muratara

Bupati Musi Rawas Utara (Muratara) Devi Suhartoni menyampaikan terima kasih atas kehadiran Gubernur HD secara langsung untuk meresmikan 15 Titik pembangunan proyek yang akan di bangun tahun 2021. “Kita tau Pak HD sangat memikirkan infrastruktur yang ada di kabupaten kita ini,” ungkapnya dalam acara yang berlangsung pada Selasa, 20 April 2021

Menurut Bupati Devi, sejak 2019 Gubernur HD sudah membantu anggaran dana sekitar Rp29 Miliar untuk membangun infrastruktur pembangunan fisik maupun non-fisik yang ada di Muratara. “Pada 2020 Pak HD juga memberikan bantuan kembali, sekitar Rp40 Miliar untuk membangun kemajuan daerah tertinggal. Termasuk Muratara mendapatkan anggaran itu” sambungnya.

Selanjutnya Devi berharap tahun ini Gubernur HD memberikan bantuan lagi. “Kami sebagai pemimpin daerah Muratara akan bekerja keras ke depannya,



masyarakat. “Pembangunan yang dilakukan pemerintah muaranya tidak lain untuk kesejahteraan masyarakat. Tidak ada pengecualian semua warga Sumsel baik yang berdomisili di pinggir hutan, berdomisili di atas gunung, mereka punya hak menikmati hasil pembangunan,

Kabupaten Musi Rawas. “Suksesnya peningkatan infrastruktur ini merupakan keberhasilan konektivitas berbagai pihak khususnya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas,” ungkap Ibu Bupati.

Dengan bantuan dari Pemprov Sum-

dalam bidang pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya sebagai prioritas,” ujar Bupati Devi.

Di tempat yang sama, Gubernur HD menjelaskan, untuk membangun infrastruktur fisik dan non-fisik suatu Daerah itu tergantung ada atau tidaknya dukungan masyarakat, karena apabila ada kerjasamanya masyarakat insyallah suatu pembangunan akan ada manfaat. “Intinya Pemerintah Muratara harus menentukan pembangunan yang mana dulu harus diprioritaskan. Kalau sudah, yang lain akan menyusul, termasuk peningkatan sinyal,” ungkap Gubernur HD.

Apresiasi Masyarakat Kota Pagaralam

Tak ketinggalan, mantan Wali Kota Pagaralam dua periode, Djazuli Kuris, mengapresiasi komitmen dan kebijakan Gubernur Sumsel Herman Deru melakukan pemerataan pembangunan di 17 kabupaten dan kota Bumi Sriwijaya. Djazuli meyakini, jika program ini terus dilaksanakan, maka Sumsel akan maju secara bersama-sama.

“Saya yakin Herman Deru mempunyai komitmen yang tinggi untuk memajukan seluruh Sumsel secara bersama sama. Saya sangat mendukung,” ujar Djazuli. Menurut dia, komitmen membangun Sumsel dibuktikan dengan menggelontorkan dana bantuan gubernur senilai Rp1 triliun setiap tahun secara proporsional kepada kabupaten dan kota. Hal ini, kata dia, akan sangat membantu bupati dan wali kota mempercepat pembangunan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

“Pak Herman Deru itu kan dua periode menjadi bupati. Tentu beliau sangat paham dengan kondisi keuangan di kabupaten dan kota, terutama daerah

yang APBD-nya tidak terlalu besar. Maka dana Bangub ini sangat sangatlah diharapkan,” katanya.

Djazuli berharap, bupati dan wali kota, saat ini, dapat memanfaatkan komitmen Herman Deru dengan meningkatkan sinergitas program pembangunan antara kabupaten dan kota dengan Pemprov Sumsel. Sehingga pembangunan makin menggeliat. “Saya yakin Sumsel akan maju secara bersama sama. Tidak

ekonomi Bumi Sriwijaya tercatat mengalami kontraksi sebesar minus 0,11 persen. Angka tersebut masih lebih baik dibanding nasional yang terkoreksi minus 2,07 persen.

Capaian itu menempatkan Sumsel sebagai provinsi peringkat keenam pertumbuhan ekonomi tertinggi di Tanah Air. Sementara di Pulau Sumatera, Sumsel berada di peringkat kedua. Hamdani menyebut, dengan catatan itu, Sumsel



Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Hamdani,

ada lagi ketimpangan antardaerah,” katanya.

Pujian dari Kemendagri

Kementerian Dalam Negeri pun memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan atas kinerja mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan upaya berkesinambungan mencapai Sumsel Maju untuk semua. Terlebih, tantangan pandemi Covid-19 masih tetap akan menjadi kendala.

Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Hamdani, mengakui, bahwa ekonomi Sumsel cukup berkontribusi positif terhadap pertumbuhan

termasuk provinsi yang mampu melewati tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19.

“Kami puji Sumsel yang dapat bertahan dan konsisten dilihat dari belanja 2019-2021 yang meningkat. Bahkan pendapatan daerah juga meningkat. Ini berbeda sekali dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia, dan Sumsel bisa melalui tekanan di masa pandemi,” kata Hamdani dalam pembukaan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sumsel Tahun 2022 secara virtual, Jumat, 23 April 2021.

Selain pertumbuhan ekonomi, lanjut Hamdani, Sumsel juga mencatatkan tingkat pengangguran terbuka yang cukup terkendali sebesar 5,51 persen pada Agustus 2020. Dia berharap Pemprov Sumsel dapat mempertahankan capaian tersebut sehingga bisa menjadi contoh bagi kepala daerah yang ada di Sumsel. ●



Mantan Wali Kota Pagaralam dua periode, Djazuli Kuris



MEMPERINGATI HARI KARTINI DI LAPAS PEREMPUAN PALEMBANG

Banyak cara memperingati Hari Kartini setiap 21 April. Untuk 2021 ini, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Selatan Hj Febrita Lustia Herman Deru memilih untuk menemui penghuni Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Palembang.

Kunjungan ke Lapas Perempuan di Jalan Merdeka Palembang itu berlangsung pada Kamis, 22 April 2021 seiring peringatan Hari Kartini 2021. Hj Febrita yang biasa disapa Feby Deru memanfaatkan kesempatan kunjungan itu untuk mengajak warga binaan berintrospeksi diri atas perbuatan apa saja yang selama ini telah dilakukan dan akan melakukan apa saat nanti telah bebas keluar dari Lapas.

"Saya yakin tidak ada ibu-ibu di sini yang bercita-cita untuk tinggal di sini. Semua ini mungkin karena keadaan dan situasi yang membuat ibu-ibu harus ada di sini," katanya. Meski begitu, ia mengingatkan agar warga binaan jangan putus asa dan terus bersemangat menatap

masa depan.

"Terus tingkatkan kualitas diri baik dari sisi rohani dan keterampilan. Manfaatkan sebaik mungkin pembinaan yang disediakan Lapas, agar kelak saat menjalani kehidupan bebas di luar Lapas, ibu-ibu punya bekal yang baik," sambung Feby.

Tampak mendampingi Feby dalam kunjungan kali ini antara lain Wakil Ketua TP PKK Sumsel Fauziah Mawardi Yahya, Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Sumsel Henny Yulianti, Ketua IIPK BSB Wina Ahmad Syamsudin, dan Ustadzah Nyimas Umi Kalsum.

Kepala Lapas Perempuan Palembang Rini Budiati menyampaikan apresiasi atas kepedulian Feby Deru kepada warga binaan. Rini mengatakan saat ini

ada 525 orang warga binaan, Antara lain orang warga binaan yang tengah hamil, dan satu warga binaan dengan anak balita.

Banyak warga binaan di Lapas perempuan ini adalah korban penyalahgunaan narkoba. Kalapas Rini Budiati mengemukakan, 70 warga binaan berada dalam tahap rehabilitasi "Ada 40 Orang Rehab Medis Dan 30 Orang Rehab Sosial mengikuti kegiatan Rehabilitasi Sosial dan Medis dengan Program Therapeutic Community (TC)," ungkapnya.

Adapun rangkaian kegiatannya mulai dari pengenalan program dan berlanjut dengan Kegiatan Konseling Kelompok oleh Ikatan Konselor Adiksi Indonesia (IKAI) bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Perempuan Palembang.



bang. Salah satu tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membantu warga binaan dalam proses mencapai pemulihan.

Tak mengherankan jika para peserta sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Di acara ini juga terbuka kesempatan warga binaan mengutarakan perasaannya kepada konselor adiksi atau ketergantungan.

"Ini merupakan langkah sinergi dalam memberantas narkoba melalui kerja sama dengan pihak terkait. Bukan han-

ya mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) kembali kepada masyarakat, tetapi pada hakikatnya agar mereka dapat diterima secara sosial. Dalam hal ini, WBP sangat beruntung bisa mendapatkan program rehabilitasi. Mohon gunakan dan manfaatkan kesempatan ini dengan baik," ungkap Rini.

Sedangkan Feby berjanji untuk mengupayakan sarana virtual bagi warga binaan agar dapat berjumpa dengan keluarga secara virtual. Penyebabnya,

sejak pandemi Covid-19 mengancam kesehatan global, warga binaan termasuk yang tak dapat lagi bertatap muka seperti sedia kala, termasuk menerima kunjungan keluarga.

Dalam kesempatan itu, Feby Deru menyaksikan berbagai penampilan dari warga binaan Lapas mulai dari qasidah rebana, tari sambut, vokal grup, dan atraksi tari modern pramuka, serta memberikan bingkisan bagi 525 warga Lapas Perempuan Palembang. ●





10 Tahun Kepemimpinan Airin Rachmi Diany

IKUT DEWASA BERSAMA TANGERANG SELATAN

Rasa haru mengiringi Airin Rachmi Diany yang resmi menanggalkan jabatan Wali Kota Tangerang Selatan Selasa (20/4/2021). Setelah sepuluh tahun mengabdikan sebagai orang nomor satu di Tangerang Selatan, ia akhirnya meninggalkan Gedung Pemerintahan Kota Tangsel untuk terakhir kalinya.



"Sepuluh tahun waktu yang tidak singkat. Saya baru sadar saat dilantik dengan Pak Benyamin Davnie, sepuluh tahun yang lalu, berusia 34 tahun," tutur Airin di hadapan awak media.

Pada awal menjabat, dirinya bukan dari kalangan birokrat. Sehingga kurang menguasai persoalan pemerintahan kota. Seiring berjalannya waktu, dia terus belajar mengenai cara memimpin suatu kota.

"Allah kasih akal sehingga ilmu pemerintahan kota saya bedah, tentang tugas wali kota, bagaimana memimpin Tangsel yang baru saja dimekarkan," katanya.

Perpisahan Airin disaksikan dan diantarkan oleh seluruh lapisan. Mulai jajaran pemerintahan, forum komunikasi pimpinan daerah, organisasi masyarakat, hingga lapisan masyarakat. Dia juga didampingi kedua anaknya, Tubagus Ghifari Al Chusaeri Wardana dan Ratu Ghefira Marhamah Wardana.

Dalam momen tersebut, tak ada kata lain yang dia ucapkan selain ungkapan terima kasih kepada seluruh lapisan atas dukungan selama dirinya menjabat selama dua periode. Airin mengatakan bahwa sebagai pemimpin, dirinya masih banyak kekurangan.

"Sebagai manusia tentu jauh dari sempurna. Tapi inilah Airin yang hanya punya niat untuk membangun dan menata Kota Tangsel menjadi rumah dan kota kita bersama. Terima kasih," ucapnya.

Usai tak menjabat wali kota, wanita yang pernah menjadi Putri Pariwisata dan Putri Favorit pada pemilihan Putri Indonesia 1996 ini mengaku, akan fokus menyelesaikan disertasinya. Airin merupakan mahasiswa program doktor Ilmu Hukum di Universitas Padjajaran Bandung. Dia terdaftar sebagai mahasiswa Unpad pada Juli 2019.

"Kan sekarang ini saya sedang ngerjain tesis disertasi saya di Unpad. Karena kan saya lagi menyelesaikan sekolah S3 saya," ungkap Airin.

Selain menyelesaikan program doktornya, Airin mengaku ingin menjalankan amanahnya sebagai seorang ibu untuk mendampingi anaknya belajar

secara daring di rumah. Sehingga, bisa masuk meneruskan pendidikan ke perguruan tinggi favorit.

Putra pertamanya, Tubagus Ghifari Al Chusaeri Wardana, saat ini sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Sedang yang kedua, Ratu Ghefira Marhamah Wardana, masih duduk di kelas 3 SMA. "Anak saya yang kecil kan Kelas 3 SMA. PR-nya adalah tugas saya sebagai ibu, menjalankan amanah bagaimana dia memiliki pendidikan yang lebih baik kan, untuk perguruan tingginya," terangnya.

Selain itu, Airin juga ingin meneruskan karir politiknya di DPP Partai Golkar. Menurutnya, banyak tugas yang harus dia lakukan. Semua kesibukannya ini akan mengisi waktu Airin setelah dia tidak menjabat sebagai wali kota pertama di Tangsel.

"Dalam hidup itu, selalu prinsipnya adalah kita diberikan amanah di waktu dan tempat yang tepat. Apapun itu, kalau Allah SWT kasih amanah, pasti dalam setiap kesulitan dan dalam menjalankan tanggung jawab ada pertolongan Allah," tegasnya.

Perempuan kelahiran Banjar, 28 Agustus 1976 ini, menyebut banyak mengambil pelajaran berharga dari para senior. Terutama dari rekannya yang kini menjadi wali kota terpilih, Benyamin Davnie.

"Sebagai manusia pasti merasa ada kekurangan, tapi sebuah amanah pasti ada batasan-batasan. Kepada Pak Ben, saya

menganggapnya seperti kakak, karena Pak Ben selalu ada dan hadir, memahami diri saya, dan mengetahui apa yang menjadi kekurangannya, dan saya banyak belajar dari beliau," ungkap Airin.

Selama satu dekade memimpin Tangsel, beragam prestasi sudah ditorehkan oleh ibu dua anak ini. Tahun lalu, Airin mendapatkan penghargaan Anugerah Kebudayaan dari Persatuan Wartawan Indonesia pada peringatan Hari Pers Nasional 2020 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Penghargaan tersebut diberikan karena Airin yang dinilai konsisten dan berkomitmen dalam melestarikan kebudayaan lokal di daerah yang dipimpinnya.

Masih di tahun yang sama, Airin meraih penghargaan dari salah satu perusahaan media nasional

sebagai Kepala Daerah Inovatif 2020

untuk kategori kesehatan.

Airin juga menerima penghargaan tersebut pada 2018. Setahun sebelumnya, dia juga mendapatkan



• INFO SPESIAL

penghargaan Kepala Daerah Inovatif di bidang inovasi aplikasi siaran Tangerang Selatan.

Kerja keras Airin membangun kotanya juga membuat Tangsel dikenal sebagai kota perdagangan dan jasa. Dua periode kepemimpinan Airin, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangsel berhasil mencatat beberapa prestasi gemilang. Capaian yang paling santer adalah keberhasilan Tangsel melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) di bidang pendidikan.

"Capaian ada di harapan lama sekolah, uji kompetensi guru, jumlah siswa jenjang TK, SD, dan SMP," kata Sekretaris Daerah Kota Tangsel, Bambang Noertjahjo, 9 Desember 2020.

Menurut penuturan Bambang, harapan lama sekolah hanya sebesar 13,83. Sekarang sudah mencapai 14,50. Nilai kompetensi guru pun meningkat menjadi 85.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangsel, Taryono, menjelaskan angka partisipasi murni Sekolah

Dasar (SD) berhasil direalisasikan hingga 119 persen. "Capaian ini tidak hanya dilakukan oleh Disdikbud, tapi juga jajaran pegawai dan para guru sebagai garda terdepan pelayanan pendidikan di Kota Tangsel," ungkapnya.

Lebih lanjut, menurut Taryono, pencapaian target ini merupakan hasil kolaborasi dan komitmen bersama yang dilakukan Disdikbud Kota Tangsel. Adapun program yang sudah mencapai target adalah Jumlah usia 7-12 tahun di jenjang SD atau MI atau Paket A per jumlah penduduk kelompok Usia 7-12 tahun.

Dari target 99 persen program tersebut, Disdikbud berhasil melampaui target dengan besaran 119 persen. Kemudian untuk jumlah siswa usia 13-15 tahun di jenjang SMP atau MTS atau paket B per jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun. Dari target 97 persen program ini, Disdikbud Kota Tangsel mampu merealisasikannya hingga 109 persen.

Wali Kota Tangerang Selatan terpilih, Benyamin Davnie, mengaku mendapat inspirasi dari sosok Airin Rachmi Diany untuk melanjutkan pencapaian yang telah diraih pada periode kepemimpinannya bersama, Pilar Saga Ichsan.

"Saya banyak mendapatkan pelajaran kepemimpinan, yang pasti dari Bu Airin. Walau seorang wanita, ibu rumah tangga, tetapi keteguhan sikapnya dalam memimpin itu luar biasa," kata Benyamin Davnie ditemui di Kantor Wali Kota Tangsel, Selasa (20/4/2021).

Dalam sepuluh tahun bersama memimpin Tangsel, dia menyaksikan bagaimana Airin, sebagai pemimpin yang belum pernah bergelut di birokrasi, mampu mendobrak tradisi-tradisi birokrat yang konservatif. Di antaranya komitmen untuk menuntaskan pekerjaan hingga tuntas.

"Banyak manajemen yang biasa dilakukan birokrat, didobrak. Antara lain misalnya bekerja jangan hitung-hitungan waktu. Kami pernah rapat sampai jam 4 pagi dalam menyusun APBD. Itu menunjukkan bahwa kalau belum tuntas pekerjaan, selesaikan," ucap Benyamin.

Yang tidak kalah adalah sosok seorang ibu yang ditonjolkan Airin



dalam memimpin Tangsel. "Tidak pernah lepas juga kasih sayangnya sebagai seorang ibu. Ini yang dirasakan saya dan teman-teman lain juga merasa demikian. Contohnya kalau ibu marah itu salahnya ditunjukkan, benarnya juga, kudunya gimana juga ditunjukkan. Kita di situ bukan sekadar diomelin tapi diperbaiki. Sifatnya diperbaiki," jelasnya.

Airin, kata Benyamin, juga merupakan sosok pemimpin visioner yang berbuat saat ini, untuk gambaran Tangsel di masa mendatang. Dia mencontohkan, pembangunan Balai Kota, dalam lima tahun pertama Pemkot Tangsel menumpang di Kecamatan Pamulang. "Di situ terlihat ibu sangat luar biasa. Padahal sebelumnya belum pernah di birokrasi dan beliau di birokrasi luar biasa," akunya.

Anggota DPRD Tangerang Selatan, Drajat Soemarsono, mengusulkan agar nama Airin Rachmi Diany diabadikan menjadi nama jalan. Politikus PDI Perjuangan itu mengusulkan agar nama Jalan Ciater Raya diganti menjadi Jalan Airin Rachmi Diany.

Hal itu sebagai apresiasi terhadap kinerja Airin selama sepuluh tahun mengubah Tangsel. Termasuk Jalan Ciater Raya yang sebelumnya sempit dan kumuh serta gelap.

"Satu, itu kan proyek Jalan Ciater sebelum sekarang jalannya kan kecil, sekarang bisa berubah menghilangkan kemacetan di situ. Kedua, membuat orang nyaman, ada penerangan ada ini, berubah total ya. Itu kan salah satu karya Bu Airin. Boleh saja kan namanya usulan," kata Drajat.

Drajat mengatakan, setidaknya ada kenang-kenangan abadi atas jerih payah Airin. "Kenang-kenangan lah, orang biar inget, ini karyanya lho," ujarnya.

Drajat menyebut kewenangan mengubah nama jalan ada pada Dinas Pekerjaan Umum. Namun ia pasrah jika usulan ditolak. "Itu kewenangannya ada di pemerintah kan di PU, terserah itu mah usulan saja. Kado terindah buat Bu Airin, bahwa di era kepemimpinannya ada perubahan," kata dia.

Meski secara politik partainya tidak sejalan dengan Airin, Drajat mengaku usulannya tidak ada kaitan dengan

hal itu. "Ya enggak lah, kan perbedaan politik enggak apa-apa, kita bertarung sama-sama untuk mencari siapa yang menang pada Pilkada kan sah-sah saja. Tapi namanya tugas diapresiasi kan enggak ada masalah. Orang benar kok," pungkasnya.

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga memberikan apresiasi atas kinerja Airin selama menjabat Wali Kota

pemimpin daerah perempuan yang terpilih melalui proses demokrasi.

"Beliau pemimpin perempuan yang masih muda dan berhasil menunjukkan kualitas kepemimpinan yang baik. Jadi beliau bisa disebut sebagai representasi Kartini masa kini yang harus kita apresiasi dan dijadikan panutan oleh perempuan-perempuan muda lainnya." Tambah Jerry.



Airin bersama Keluarga.




Airin bersama Basuki Tjahaja Purnama.

Tangsel. Selama kepemimpinan Airin, kinerja ekonomi dalam bidang perdagangan di Tangsel merupakan salah satu yang terbaik di Indonesia.

Menurut Jerry selama dua periode Airin berhasil memimpin Tangsel. Airin sendiri merupakan salah satu bukti dari

Pujian juga datang dari Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ahok menilai Airin sukses membangun Tangsel dalam 10 tahun. Menurutnya, berbagai pembangunan dilakukan Airin untuk membawa Tangsel semakin maju. • Rusdiyono

A portrait of Susi Syahdonna Marleny Bachsin SE MM, a woman with dark hair, wearing glasses and a patterned headscarf, smiling. The background is a solid red color.

Susi Syahdonna Marleny Bachsin SE MM:

TENTANG AGENDA PEREMPUAN POLITISI KE DEPAN



Susi Syahdonna Marleny Bachsin menyerahkan bantuan.

Anggota Komisi IV DPR dari Daerah Pemilihan Bengkulu, Susi Syahdonna Marleny Bachsin SE MM menyempatkan diri menjawab beberapa pertanyaan dalam satu sesi wawancara tentang perempuan dan politik. Berikut petikan wawancara dengan Donna, panggilan akrabnya, juga mengenai perannya di Komisi IV DPR maupun sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Bengkulu:

Apa rencana Anda ke depan sebagai Wakil Rakyat Bengkulu di DPR?

Rencana saya ke depan sebagai wakil rakyat daerah pemilihan Bengkulu, tentunya saya akan lebih siap dan lebih semangat untuk menyuarakan aspirasi segenap warga Bengkulu, khususnya di bidang yang diamanatkan kepada saya. Jika tetap di Komisi IV bidangnya adalah pangan, pertanian, maritim, dan kehutanan.

Kisah awal Anda menjadi politisi sudah banyak yang mengetahui: mendadak tertarik dan menyelesaikan persyaratan administrasi hanya dalam tiga hari. Pertanyaannya, setelah 10 tahun menjadi politisi (2009-2019), apa yang dapat Anda kemukakan sekarang mengenai politik?

Ya, pengalaman saya selama 10 tahun aktif sebagai aktor, eh aktris politik mungkin ya, karena saya perempuan (sambil menebar senyum). Begini, selama 10 tahun terakhir saya mengalami sendiri dinamika politik terutama di dalam negeri. Nah, dalam peran saya sebagai perempuan politisi saya melihat ada kesinambungan dan perubahan yang terjadi di tengah masyarakat, di tingkat lokal maupun nasional. Kesinambungannya, antara lain, politik dalam negeri memang masih didominasi oleh laki-laki karena masyarakat

kita juga seperti itu. Tetapi, jelas terjadi perubahan terutama kesadaran kaum perempuan bahwa politik juga merupakan ruang terbuka bagi mereka untuk berpartisipasi memperjuangkan kepentingan mereka dan bersama-sama memajukan bangsa ini.

Sejauh ini bagaimana pengalaman Anda di Komisi IV DPR?

Alhamdulillah, khusus untuk Bengkulu, para petani sudah bisa meningkatkan hasil produksi pangan. Ternyata masih ada lahan persawahan di Bengkulu yang hanya menghasilkan sekali panen dalam setahun. Nah yang seperti ini kita upayakan untuk menjadi dua kali panen dalam setahun. Selain itu kita juga memberikan bantuan bibit terutama untuk empat komoditas, yaitu pala, kopi, lada, dan cokelat. Bibit durian juga kita berikan.

Untuk periode 2019-2024 bagaimana?

Nah ke depan, kalau saya diizinkan tetap di Komisi IV tentunya saya akan lebih memajukan lagi petani Bengkulu agar lebih giat lagi. Terutama untuk yang telah menerima berbagai bantuan, kita akan memacu lagi produktivitas para petani dan pekebun.

Pelaksanaannya seperti apa?

Selama ini, banyak yang menerima

menjadi pendamping, tapi dipilih yang muda-muda. Menurut saya, justru yang sudah senior harus juga diperhatikan karena pengalamannya sangat bermanfaat bagi para petani mengingat jam terbang mereka sudah tinggi. Misalnya di bidang perawatan alsintan (alat mesin pertanian).

O ya, seperti apa kondisinya bantuan alsintan di Bengkulu?

Ke depan saya ingin pemerintah tidak

perbaiki. Ini harus diperbaiki. Di sisi lain, para petani yang sudah menerima bantuan tidak berhak lagi menerimanya di tahun-tahun berikutnya, padahal mesinnya sudah tak berfungsi.

Mungkin ada masalah lain yang menurut Anda perlu perbaikan?

Ya, dalam bantuan bibit hendaknya petani itu juga mendapat bimbingan mulai dari penanaman hingga tanaman menghasilkan. Jangan misalnya,



bantuan kemudian dilepas begitu saja sehingga sulit mengukur keberhasilan penyerahan bantuan itu. Nah, ke depan, saya akan mengupayakan agar pemerintah juga menjamin penyuluh pertanian lapangan (PPL).

Menjamin PPL itu maksudnya apa?

Begini, rencananya para PPL ini akan

hanya memberikan bantuan alsintan begitu saja. Saya ingin pemerintah juga menyediakan layanan perbaikan jika ada kerusakan pada alsintan. Kan sayang, nilai bantuan alsintan itu tinggi tapi bisa terpengkalai karena para petani dan PPL tidak memiliki fasilitas perbaikan dan perawatannya. Jadi, kita temukan alsintan yang rusak dibiarkan tanpa

bimbingan hanya satu atau dua kali pertemuan saja. Harus ada pelatihan kontinyu untuk para petani, dan juga ketersediaan pupuk yang memadai agar hasil tanamannya lebih banyak.

Tapi, kebijakan pemerintah tampaknya memperbanyak impor termasuk produk pangan dan pertanian?

Ya, sejak 2014 kita memperjuangkan agar impor pangan dan produk pertanian lainnya tidak merugikan petani. Impor itu hendaknya selektif, bukan tidak boleh impor. Ketika kita kekurangan, baru kita impor. Jangan juga impor pada saat petani sedang panen.

Tentang kondisi kesejahteraan para petani bagaimana?

Pengertian sejahtera itu memang masih banyak perdebatan. Begitu juga dalam penyerahan bantuan, apakah kita sudah tepat sasaran memberikan bantuan kepada yang tidak mampu atau yang berpotensi menghasilkan. Ini juga masalah. Misalnya dalam kelompok tani itu ada yang memang sudah mampu tapi menerima bantuan karena di kelompok tani juga beragam kemampuannya. Malah ada masukan dari para petani bahwa bantuan itu kurang tepat sasaran. Nah, saya merasa bahagia bahwa para petani terutama di Bengkulu sekarang mau menyampaikan aspirasinya melalui wakil mereka di legislatif. Dengan begitu, saya juga tidak segan menyampaikannya kepada eksekutif, minta kepada menteri sesuai bidangnya untuk memenuhi harapan para petani.

Salah satu keluhan petani Bengkulu adalah soal pasca panen, terutama pemasarannya. Menurut Anda bagaimana?

Saya melihat salah satu masalah adalah pelabuhan. Di Bengkulu ada pelabuhan Pulau Baai mau jadi Kawasan Ekonomi Khusus. Saya berharap ini akan memperbaiki kondisi termasuk penanganan hasil produksi Bengkulu di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, maupun hasil olahannya. Kita melihat hasil perikanan Bengkulu itu sangat bagus tapi kurang pemasarannya. Belum lagi dampak ikutannya kalau kita melirik sektor pariwisata ini juga menjadi tugas saya agar Bengkulu ke depan lebih baik.

Anda tampaknya sangat menyadari pentingnya kaum perempuan dalam politik. Kenapa?

Pertama, tentu karena secara alamiah saya memang seorang perempuan. Tapi, yang lebih penting adalah perkembangan masyarakat yang terlihat bias terhadap perempuan. Mi-

salnya, sekarang ini, populasi kita lebih banyak laki-laki, baik lokal maupun nasional. Nah, dengan lebih banyak laki-laki idealnya bangsa ini lebih kuat dan cepat maju. Tapi faktanya, pertumbuhan ekonomi kita yang kisaran lima persen per tahun selama lima tahun terakhir ini kan tidak cukup untuk memajukan bangsa ini, baik di bidang ekonomi, teknologi informasi dan komunikasi yang penting untuk masa depan, antara lain. Ini masalah kita bersama sebagai bangsa. Terlebih lagi wabah Covid-19 menambah kendala kita menghadapi persoalan bangsa

Lantas?

Ini akan berdampak luas untuk perem-

tuk perempuan Indonesia berpartisipasi memperbaiki keadaan.

Kan sudah ada perempuan-perempuan yang menjadi menteri. Seharusnya mereka bertanggung jawab juga dong?

Betul. Tapi, sebagai perempuan, saya khawatir bahwa para perempuan menteri itu kerap diintervensi yang laki-laki (tersenyum juga) sehingga pengambilan keputusannya tidak independen. Tapi, risiko negatifnya tetap dipikul atau dibebankan kepada Ibu-ibu Menteri itu. Tapi, sudahlah, kita berharap ada perempuan menteri kita kelak yang seperti Margaret Thatcher yang dijuluki Iron Lady (Wanita Besi)



puan dan pada akhirnya bangsa ini juga. Mengapa? Karena perempuan di Indonesia secara tradisional memiliki peran ganda, di sektor publik sekaligus domestik. Siapapun perempuan yang berperan di sektor publik, artinya bekerja di luar rumah, tetap memikul tanggung jawab sebagai pengurus rumah tangga, baik mengurus anak-anaknya maupun anggota keluarga lain. Jadi, ketika ekonomi mandek, bukan cuma perempuan yang menderita, melainkan juga anak-anak atau generasi yang lebih muda hingga lansia yang menjadi tanggungannya. Tapi, ini juga peluang dan tantangan un-

Anda mengidolakan Thatcher ya?

Salah satu model saja. Sekarang kan banyak perempuan hebat. Yang di daerah-daerah itu, perempuan yang bertani dan berkebun, yang di pesisir mengurus perikanan, juga driver ojek online, dokter, bidan, perawat. Itu concern saya. Tapi, jika ada perempuan Indonesia yang melampaui Ho Ching (CEO Temasek Holdings Singapura, isteri PM Lee Hsien Loong) dan Meng Wanzhou (eksekutif puteri pendiri Huawei yang ditahan di Kanada), saya akan mengidolakannya juga. ●

BELAJAR MENERIMA KEGAGALAN ALA IRAWATI

► “Ibu Rismanya” Masyarakat Kotim

Keberanian Irawati sebagai Wakil Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) membuat kaget. Dia tidak ragu turun jalan, melakukan inspeksi mendadak minuman keras, sampai berkunjung ke tempat prostitusi.



Keberanian itu tidak datang dengan sendirinya. Dia mengaku, sebagai perempuan tidak merasa asing berada di dunia politik. Bahkan ketika saat ini diamanahkan oleh masyarakat sebagai pemimpin.

"Apapun pekerjaan yang bisa dilakukan laki-laki, bahkan meski pekerjaan itu sulit kalau memang yakin, itu bisa dilakukan maka pasti bisa saya lakukan. Dalam artian tidak ada kata 'saya ini perempuan yang manja tidak bisa melakukan apa-apa'. Apa yang dikerjakan laki-laki bisa, maka saya juga bisa. Tetapi jangan sampai kehilangan jati diri dengan memaksakan untuk meniru gaya orang lain," ujarnya saat diwawancarai Info Indonesia, Rabu 21 April 2021.

Bahkan lanjutnya, dirinya kini mendapat julukan sebagai "Ibu Rismanya masyarakat Sampit". Ia tidak merasa kesal dengan julukan tersebut. Namun, dia meminta agar tidak menyamakan dirinya dengan orang lain. Karena setiap manusia memiliki jati diri sendiri.

Baginya Tri Rismaharini yang kini menjabat sebagai Menteri Sosial itu adalah perempuan tangguh yang berani. Sementara dirinya hanya sekadar wakil bupati.

"Jadi saya bekerja sesuai kemampuan saya dan tupoksi saya. Jangan sampai kita memaksakan sifat agar sama dengan tokoh atau yang lainnya, namun jadilah diri sendiri," tegasnya.

Beberapa bulan menjadi orang nomor dua di Pemkab Kotim, dia merasa tidak ada level antara pekerjaan laki-laki dan perempuan. Semua sama.

Perempuan baginya adalah sosok sempurna, karena bisa mengerjakan apa yang dikerjakan laki-laki. Bisa menjadi seorang ibu yang merupakan pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan oleh laki-laki.

'Kalau laki-laki pulang bekerja sudah langsung tidur istirahat tidak ada lagi memikirkan masalah dapur. Sedangkan perempuan meski bekerja, tetap harus mengurus dapur dan semua pekerjaan itu bisa terselesaikan, ditambah lagi jika mempunyai anak yang masih sekolah dan lainnya," ungkap wanita kelahiran 25 Februari 1977, di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.





Srikandi PDI Perjuangan ini mengaku bangga menjadi perempuan. Karena apapun permasalahan pekerjaan itu bisa terselesaikan. Kalau laki-laki masih ada keterbatasan.

"Saya menilai di Kotim sendiri masih sedikit perempuan yang berani mengeluarkan potensi dirinya dan berpikir bisa melakukan pekerjaan apa pun. Karena masih ada anggapan perempuan itu adalah mahluk lemah atau di bawah laki-laki. Namun, kalau saya pribadi berpikir laki-laki dan perempuan itu sama," bebernya.

Memang diakui sudah ada beberapa perempuan yang terlibat dalam organisasi dan berani. Salah satunya yaitu Camat Kota Besi yang merupakan perempuan tang-

guh.

Jabatan wakil bupati saat ini pun, tidak mengganggu perannya sebagai istri sekaligus ibu. Dia mengatakan, pilihannya terjun di dunia politik

didukung penuh oleh keluarga. Untuk urusan rumah tangga, Irawati mengatakan telah mendiskusikan dahulu dengan suami.

"Waktu untuk mengurus segalanya itu menyesuaikan, intinya kita harus punya kesepakatan terlebih dahulu dengan keluarga dan juga suami. Suami harus paham dan saya sudah bilang kalau saya di luar saya adalah milik orang banyak. Tetapi kalau saya di rumah saya milik keluarga. Mereka harus memahami pekerjaan saya seperti apa, sehingga tidak ada yang menuntut lebih, karena konsekuensinya itulah menjadi seorang pejabat. Tetapi juga tidak mengenyampingkan saya sebagai istri dan seorang ibu," jelas Irawati.

Terlebih saat bulan puasa ini lanjutnya, sebelum keluar rumah ia akan memasak untuk keluarga dari tangannya sendiri. Segala keperluan keluarga sudah ia siapkan, jadi memang sudah ada kesepakatan dengan keluarga.

"Alhamdulillah anak-anak saya dari awal memang sudah diajarkan mandiri sejak dini, sehingga mereka mengerti ketika saya katakan bahwa saya hanya bisa melahirkan mereka tetapi tidak





bisa sering berkumpul seperti orang kebanyakan. Dan mereka dengan sadar dan memahami keadaan saya. Namun, perhatian saya selalu berikan meski hanya lewat telepon. Jadi saat bekerja, saya bekerja. Saat bersama anak-anak saya juga ada waktu," ujarnya.

Untuk tumbuh kembang anak, dia tidak memaksakan mengikuti jejak karirnya terjun di dunia politik. Semua diserahkan berdasarkan pilihan hati. Baginya, terpenting adalah kebahagiaan anak-anaknya.

Sebagai contoh, anaknya yang pertama saat ini sudah mengabdikan kepada masyarakat sebagai seorang bidan. Sedangkan yang kedua masih bekerja magang. Ketiga masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Yang paling bungsu berseragam putih-merah.

"Saya sendiri tidak ada mengajarkan kepada anak-anak terjun ke politik. Saya serahkan kepada mereka mau menjadi apa selagi itu positif," sebutnya.

Di momen Kartini ini, Irawati menilai sosok Kartini adalah perempuan tangguh. Di mana saat zaman dulu perempuan itu dianggap bawahan yang tidak dipandang. Namun dengan gagahnya

RA Kartini ini memperjuangkan hak-hak wanita di tengah keterbatasan perempuan yang ditindas pada masanya.

"Beliau adalah perempuan yang tangguh dan pemberani, dan saya sangat terinspirasi dengan sosoknya. Melihat dari riwayatnya, beliau itu sama pemikirannya dengan saya yang tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam memberikan peluang pekerjaan apa yang bisa dilakukan," kata Irawati.

Dirinya berharap, ke depannya perempuan jangan sampai berpikiran hanya sebagai ibu rumah tangga, walaupun sudah terlanjur menjadi ibu rumah tangga. Dari rumah pun ucapnya juga masih bisa untuk mencari penghasilan membantu suami.

"Jadi maksud saya jangan jadi perempuan yang hanya diam saja. Harus menjadi perempuan yang produktif," demikiannya.

Selain tangguh, perempuan di masa kini juga jangan takut gagal. Karena Irawati pun mengaku sering mengalami kegagalan. Pada 2004 ketika mengikuti Pemilihan Legislatif (Pileg) gagal. Lima tahun berselang ikut lagi, nasibnya juga masih belum mujur.

Kegagalan demi kegagalan dialaminya selama itu. Bahkan pada 2007 ketika mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Pundu, Kecamatan Cempaga Hulu, juga kalah. Kegagalan yang terus menghantuinya. Tapi tak sedikit pun membuatnya patah semangat.

Pada 2019 ia kembali mencoba keberuntungan mengikuti Pileg. Hingga akhirnya berhasil terpilih sebagai Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Hanya kurang lebih satu tahun ia menjabat, dan harus mengundurkan diri, karena pada 2020 ia mengikuti Pilkada Kotim.

Ia bersama pasangannya Halikinnor berhasil terpilih jadi bupati dan wakil bupati, dan dilantik pada 25 Februari 2021. Ia mengambil banyak hikmah dalam setiap perjalanan karirnya, bahwa Tuhan menginginkan dirinya berada di jabatan yang lebih tinggi.

"Kalau sekali gagal jangan langsung menyerah, gagal coba lagi. Saya sudah berapa kali gagal, coba terus. Akhirnya berhasil juga, bahkan ditempat yang lebih baik, karena semuanya adalah rahasia Tuhan," terang ibu empat orang anak. ●

REZITA MEYLANI YOPI MEMULAI JABATAN BUPATI

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 memunculkan politisi harapan masa depan yang telah melewati berbagai ujian administrasi maupun politik riil yang kadang sering bersifat rekayasa. Begitulah, salah satunya adalah perempuan politisi Rezita Meylani yang pada 7 Mei 2021 menda-tang baru menapak usia 27 tahun.

Menanti pelantikannya, banyak kisah Rezita yang tercatat sebagai calon termuda peserta Pilkada serentak 2020. Bernama lengkap Rezita Meylani Yopi, perempuan kelahiran Japura, Indragiri Hulu, 7 Mei 1994 ini merupakan calon bupati nomor urut 2 dalam Pilkada di salah satu kabupaten Riau yang biasa diringkas sebagai Inhu ini.

Rezita adalah istri dari Bupati Inhu dua periode, Yopi Arianto. Sebagai catatan, Yopi pernah memecahkan rekor Muri sebagai bupati termuda saat dilantik pada 2010 silam dengan usia 30 tahun. Catatan yang sama akan melekat pada Rezita, alumni Fakultas Ekonomi Universitas Riau ini saat dilantik kelak.

Pada Pilkada 2020 ini, Rezita maju didampingi calon wakil bupati Junaidi Rachmat yang pernah menjabat sebagai Kepala Bappeda Inhu. Mendapat dukungan dari Partai Golkar, Nasdem dan Hanura, banyak yang menganggapnya cerminan politik dinasti. Yopi Arianto, suami Rezita adalah Bupati Inhu dua periode yang masih menjabat ketika Pilkada berlangsung, juga menjadi Ketua DPD Golkar setempat.

Namun, demokrasi memungkinkannya. Lagi pula, Pilkada Inhu kali ini diikuti oleh lima pasangan calon bupati yang memiliki rekam jejak dan keunggulan masing-masing. Sesuai dengan nomor urutnya, yang berkompetisi di Pilbup Inhu 2020 adalah pasangan dr. Nurhadi, SpOG – Kapten (Purn) Toni Sutianto, SH, kemudian Rezita Meylani Yopi, SE – Drs. Junaidi Rachmat, M.Si, Dra. Siti Aisyah, SH., SpN dan Agus Rianto, SH, Irjen Pol (Purn) Drs. H. Wahyu Adi – Hj. Supriati, S.Sos, dan Rizal Zamzami – Yoghi Susilo

Hasil rekapitulasi KPU menunjukkan para pasangan calon bersaing ketat. KPU Indragiri Hulu yang merampungkan rapat pleno penghitungan suara menetapkan keunggulan perolehan suara yang tipis melalui keputusan KPU Inhu bernomor 712/PL-016-Kpt/402/KPU.Kab/XI/2020 tanggal 17 Desember 2020.

Dalam keputusan itu, pasangan calon Rezita Meylani-Junaidi Rachmat memperoleh 50.356 suara disusul paslon Rizal Zamzami-Yoghi Susilo dengan 50.048 suara. Kemudian, paslon Wahyu Adi-Supriati memperoleh 36.156 suara, paslon Siti Aisyah-Agus

Rianto 35.356 suara dan paslon Nurhadi-Toni S meraih 17.644 suara.

Ketua KPU Inhu Yenni Mairida menetapkan paslon nomor urut 2 Rezita Meylani-Junaidi sebagai peraih suara tertinggi di Pilkada Inhu. "Dengan ini, KPU Indragiri Hulu menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Indragiri Hulu (Inhu) 2020," ungkap Yenni.

Namun Yenni menegaskan, dengan telah ditetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu (Inhu) 2020, tugas KPU belum selesai. Alasannya, KPU masih menunggu tiga hari setelah penetapan ini terkait ada-tidaknya gugatan menyusul dinamika dalam proses penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara. "Setidaknya, lima hari paling lambat, ada tidaknya gugatan, setelah adanya surat putusan dari Mahkamah Konstitusi maka KPU akan menetapkan paslon terpilih," sambungnya.

Memang hasil rekap KPU Inhu akhirnya menjadi salah satu perkara perselisihan hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi. Ketua Pemenangan Pemilu



DPW PKS Riau, Makarius Anwar, membuka sejak awal opsi menggugat hasil Pemilu Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) ke MK itu.

Ini merupakan upaya hukum kedua yang dilakukan PKS atas pilkada Inhu, setelah sebelumnya melakukan dugaan pelanggaran pilkada di Inhu kepada tim penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) Bawaslu. "Akan dipersiapkan ke MK, sebelumnya juga dilaporkan ke Bawaslu, tapi belum keluar keputusannya," ujarnya di gedung DPRD Riau, Kamis, 17 Desember 2021.

Makarius mengklaim telah memiliki sejumlah bukti terjadinya dugaan pelanggaran pilkada di Kabupaten Inhu. Bukti-bukti tersebut berupa video, percakapan grup WA dan bukti pendukung lainnya. "Minggu tenang, kepala desa membagikan bantuan langsung tunai, dan mengarahkan dukungan untuk memilih pasangan yang didukung bupati aktif," sambungnya.

Dalam sidang pemeriksaan bukti dan saksi di MK, pihak pesaing Rezita-Junaidi sebagai pemohon juga mengerahkan upayanya secara maksimal untuk menganulir kemenangan. Yang terbukti kemudian, terjadi penyobekan sebanyak 76 surat suara yang dilakukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), atas nama Rio Andika Saputra lantaran tak pernah mengikuti Bimtek atau simulasi pemungutan suara bagi KPPS.

"Menyatakan batal dan tidak sah keputusan KPU Indragiri Hulu, tentang rekapitulasi hasil perhitungan suara Pilkada Inhu tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 sepanjang belum dilakukan pemungutan suara ulang di 1 TPS tersebut," tegas hakim MK Enny Nurbaningsih.

Alhasil, putusan MK memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Inhu untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Ringin Kecamatan Batanggangsal.

Putusan itu dibacakan Ketua MK, Anwar Usman dalam sidang yang disiarkan

kan channel youtube Mahkamah Konstitusi RI, Senin, 22 Maret 2021 petang. "Memerintahkan kepada KPU Indragiri Hulu untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 03 Desa Ringin, Kecamatan Batanggangsal, dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak diucapkannya putusan Mahkamah ini," kata Anwar Usman.

Tidak hanya itu, MK juga memerintahkan KPU Inhu merombak seluruh



Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 03 Desa Ringin. Alasannya, KPPS tak menjalankan pekerjaannya secara profesional, yaitu terjadi penyobekan 76 surat suara di TPS 03 Desa Ringin Kecamatan Batanggangsal.

"Yang kemudian hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan, tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah," ujar Anwar.

Maka, berlangsunglah pemungutan suara ulang di satu TPS pada Selasa,

20 April 2021. Komisioner KPU Riau, Nugroho Noto Susanto menyebut jumlah pemilih di TPS 3 Desa Ringin Kecamatan Batanggangsal tercatat 307 pemilih. Sedangkan dari hasil form C pemungutan ulang, diketahui jumlah pemilih yang memberikan suara sebanyak 295, dengan rincian 294 suara sah dan 1 suara tidak sah.

"Pasangan nomor 1 Nurhadi dan Toni mendapatkan 1 suara, pasangan nomor 2 Rezita dan Junaidi mendapatkan 93 suara, pasangan nomor 3 Siti dan Agus mendapatkan 1 suara, pasangan nomor 4 Wahyu dan Supriati mendapatkan 1 suara, dan pasangan nomor 5 Rizal dan Yoghi mendapatkan 198 suara," ungkapanya.

Meski berhasil meraih suara signifikan dibandingkan pada pemilihan lalu, Rizal-Yogi gagal menyusul raihan suara Rezita-Junaidi. Raihan 198 suara menambah perolehan suara pasangan nomor 05 tersebut dari 50034 menjadi 50232. Sementara itu pasangan nomor 02 yang sebelumnya secara matematis hanya membutuhkan 11 suara untuk menang ternyata berhasil meraih 93 suara. Ini menambah perolehan suara dari 50319 menjadi 50412.

Dengan ini selisih keduanya menjadi 180 suara yang pada hitungan sebelum PSU berselisih 285 suara. Jadi, pasangan nomor 2 Rezita dan Junaidi akhirnya memenangkan Pilbup Inhu, karena sebelum diputuskan pemilu ulang oleh Mahkamah Konstitusi, selisih suara antara pasangan Rezita dan Junaidi dengan Rizal dan Yoghi mencapai 308 suara pemilih. Dengan perolehan suara pasangan Rizal dan Yoghi yang hanya sebanyak 198 suara pada pemilu ulang, tidak dapat mengejar selisih suara yang menjadi penentu kemenangan pada pilkada Inhu.

Kini Rezita-Junaidi menanti saat-saat pelantikan. Saat bersamaan, muncul perempuan politisi yang sudah mengalami berbagai ujian. Melihat usianya, masih panjang perjuangan Rezita, dan banyak lagi ujian yang harus ia lalui. ●

AGAR INDRAGIRI HULU LEBIH MAJU

Dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya, sektor perkebunan sawit merupakan kawasan agribisnis terbesar di Kabupaten Indragiri Hulu yang beribu kota di Rengat, Riau ini.

Inhu merupakan salah satu dari 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Menurut Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, wilayah Kabupaten Indragiri Hulu mencapai 8.195,26 Km² atau 819.826 hektar. Secara astronomis, Kabupaten Indragiri Hulu terletak pada posisi 0015' Lintang Utara -105' Lintang Selatan dan 101° 10' Bujur Timur -102° 48' Bujur Timur.

Sedangkan secara geografis, Kabupaten Indragiri Hulu yang berada pada posisi strategis sebagai jalur Lintas Timur Sumatera serta posisi Kabupaten Indragiri Hulu berbatasan dengan Kabupaten dan Provinsi tetangga. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hilir. Sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi.

Dari posisi geografis dan nama hulu yang melekat pada namanya, Inhu berada di bagian tengah Sumatera. Namun, masih berada di dataran rendah. Posisi ini membuatnya memang cocok sebagai lahan perkebunan. Selain sawit, karet adalah komoditas perkebunan yang juga berkembang di kabupaten ini.

Denyut utama kehidupan masyarakat Inhu berada di sepanjang aliran sungai: Batang Kuantan, Batang Gansal, dan Batang Cenaku. Batang Kuantan memiliki tiga nama berbeda, yaitu Batang Ombilin, Batang Kuantan, dan Batang Indragiri.

Bagian sungai yang berhulu di Danau Singkarak Sumatera Barat, namanya Batang Ombilin. Memasuki perbatasan Riau sampai Cerenti namanya berganti jadi Batang Kuantan. Lanjut ke wilayah Kecamatan Peranap sampai ke pantai timur Sumatera, sebagai muara dari sungai itu, masyarakat menye-



butnya Sungai Indragiri.

Penyebutan nama ini bisa dilihat dari batasan geografis yang berbeda, yaitu Batang Ombilin di Sumatera Barat dan Batang Kuantan di Riau. Penamaan ini bisa dilihat berdasarkan pada batasan budaya, yaitu Batang Kuantan (mengacu pada Minangkabau) untuk wilayah Kuantan dan Indragiri (mengacu pada kebudayaan Melayu).

Secara umum, warga Inhu terdiri dari kelompok Melayu dan Minang, juga transmigran dan para pendatang lainnya terpicu oleh perkembangan sektor perkebunan. Inhu juga masih memiliki penduduk asli suku Talang Mamak. Keharmonisan warganya merupakan salah satu faktor kunci untuk kemajuan masa depan kabupaten ini. ●

Ratu Tatu Chasanah Untuk Kabupaten Serang

BEKERJA DENGAN HATI, LEBIH KOLABORATIF, TERUS INOVASI

Periode kedua sebagai Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah fokus dalam hal paling esensial. Mulai dari peningkatan pelayanan masyarakat, hingga kualitas pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia.





Dilantik pada 26 Februari 2021 lalu, ibu tiga orang anak ini menceritakan pengalaman selama lima tahun, merupakan modal agar program di pemerintahannya yang sekarang jadi lebih baik.

Sehari setelah pelantikan, dia bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Menteri Koordinator Perekonomian dan Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) itu berpesan agar Tatu fokus membangun daerah untuk membuat Indonesia semakin Maju.

Sebagai Ketua DPD I Golkar Banten itu mengucapkan agar seluruh kader partai berlogo pohon beringin tersebut, menjadi contoh pemimpin yang baik. Tidak melakukan perbuatan tercela, dan harus menjadi teladan yang mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat. "Perjuangan politik untuk kesejahteraan masyarakat harus melekat di hati," ujarnya saat itu.

Terlebih Indonesia saat ini masih melawan pandemi COVID-19. Tatu menilai, Pemkab Serang harus

terus menyesuaikan diri dalam proses pelaksanaan program dan pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karena itu, ke depan pelayanan berbasis digital dan sistem pelayanan berbasis elektronik (SPBE) harus semakin maksimal. Namun, dibutuhkan sinergitas dari seluruh pemangku kepentingan dalam mencapai harapan bersama.

Mengacu pada nilai indeks pembangunan manusia (IPM), Tatu mengucapkan, aspek

pembangunan tidak terlepas dari SDM berkualitas. Bersyukur pada periode pertama lalu, persoalan mengenai infrastruktur, pelan-pelan dibenahinya. Sehingga lima tahun ke depan, tantangan yang harus bisa diantisipasi yakni jawaban atas kebutuhan utama masyarakat.

Seperti pendidikan, kesehatan, penciptaan lapangan kerja, sampai pengelolaan lingkungan. Namun, ia tak bisa sendirian. Bersama dengan Pandji Tirtayasa dia mengajak partisipasi masyarakat ikut dalam proses pembangunan Kabupaten Serang.

Hal tersebut dapat diciptakan melalui pembaharuan pola pikir, inovasi, dan keinginan untuk terus berbenah. "Berkaitan dengan mengubah pola pikir masyarakat pasti dibutuhkan ketekunan, kesabaran, dan yang tidak kalah penting semangat untuk berubah menjadi lebih baik," ujarnya.

Tugas lain yang juga menjadi prioritas adalah program mengurangi pengangguran dengan lebih meningkatkan pemberdayaan UMKM, mendorong program bidang pariwisata, dan kerja sama pelatihan



industri.

"Kami juga punya pekerjaan pokok yang lain, yakni menyiapkan pembangunan pusat pemerintahan," ujarnya.

Program pendidikan dan kesehatan terus dilanjutkan, mulai dari pemberian beasiswa SD-SMP dan perguruan tinggi, program kejar paket, sarana prasarana, dan peningkatan kualitas pendidik.

Serta menyediakan ambulans untuk 326 desa, kemudian peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas dan Rumah Sakit dr Dradjat Prawiranegara. Mengingat virus Corona yang mewabah di seluruh dunia ini, membuka mata,

dia menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil PT Agro Serang Berkah, anak perusahaan BUMD PT Serang Berkah Mandiri dan PT Agro Jawa Barat, BUMD milik Pemprov Jawa Barat. Perjanjian kerja sama itu dibuat untuk memperkuat pangan kedua daerah.

"Dua perusahaan daerah akan saling kerja sama mulai dari permodalan hingga pemasaran dan pemanfaatan teknologi. Insya Allah, membawa berkah untuk masyarakat Kabupaten Serang," kata Tatu.

Menurut Tatu, Kabupaten Serang

paten Serang. Setiap tahun, hasil pertanian terutama padi, selalu mengalami surplus.

"Kita akan memanfaatkan kerja sama ini dengan baik, untuk pemberdayaan masyarakat. Jika Pemda Jawa Barat turun, insya Allah lancar. Dan Pak Gubernur Jawa Barat mendukung, ini luar biasa," tegas Tatu.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, sektor pangan tidak terpengaruh oleh pandemi COVID-19. "Ini tahap awal dalam kerja sama jangka panjang, melalui kerja sama bidang pertanian. Apalagi bidang pangan ini selama covid, terbukti tidak



pentingnya kesehatan bagi manusia. Tak terkecuali di pintu gerbang utama yang menghubungkan Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa tersebut.

Perempuan kelahiran Serang, pada 23 Juli 1967 itu juga menjelaskan di masa pandemi ini, kolaborasi menjadi poin penting. Saling membantu, dan semangat untuk terus menciptakan menjadi poin penting.

Seperti menciptakan kerja sama dalam bidang pangan, bersama dengan daerah lain. Beberapa waktu lalu,

punya lahan pertanian dan perkebunan yang cukup luas. Belum lagi masih banyak lahan tidur yang belum dimanfaatkan. PT Agro Jawa Barat pada tahap awal membutuhkan sekira 1.000 hektare lahan untuk pengembangan tanam jagung. Saat ini, kata Tatu, hasil inventarisasi awal, ada sekira 4.000 hektare lahan di Kabupaten Serang yang bisa dimanfaatkan untuk tanam jagung.

Tatu menegaskan, pertanian adalah salah sektor ekonomi unggulan Kabu-

turun, malah naik," ujar pria yang akrab disapa Emil ini.

Emil mengatakan, PT Agro Jawa Barat selaku BUMD milik Pemprov Jawa Barat menawarkan teknologi dan pangsa pasar yang bisa dimanfaatkan bersama PT Agro Serang Berkah. "Selama COVID-19 juga, kita saling menguatkan kerja sama antardaerah," ujarnya.

Dalam mendukung pemerintah pusat, Pemkab Serang di periode kedua kepemimpinannya perempuan pemilik

gelar Magister Akuntansi dari Universitas Pancasila Jakarta ini juga mewujudkan penerapan satu data kependudukan.

Bersama dengan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri), dia menerangkan bahwa satu data kependudukan bermakna agar tidak ada pendataan yang ganda. Semua demi memudahkan hidup masyarakat khususnya di Kabupaten Serang.

"Dengan satu data, kita akan lebih mudah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah," ujar ibu dari Wakil Wali Kota Tangerang Se-

pendataan. Seperti yang dilakukannya pada 1 April 2021 lalu ketika mendatangi sejumlah keluarga di Kecamatan Gunungsari.

Dalam kesempatan itu, Ratu Tatu Chasanah meminta masyarakat juga aktif menerima kader pendata dan memberikan informasi yang akurat. "Pendataan keluarga dilakukan secara nasional dan akan mencatat informasi keluarga sebagai acuan perencanaan pembangunan," kata Tatu.

Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, satu data kependudukan bermakna setiap lembaga diberi kewenangan untuk mener-

pemilu, pilkada, dan pilkades.

Basis data yang digunakan adalah nomor induk kependudukan (NIK) yang memiliki 16 digit yang berbeda setiap warga negara. "Maka harus diawali dengan pendataan yang tepat. Penduduk di Kabupaten Serang yang merasa belum terdata, belum punya KTP elektronik, segera laporkan. Bayi lahir hingga warga yang meninggal, segera laporkan," ujarnya.

Zudan menilai, beberapa daerah sudah mengembangkan satu data kependudukan, tetapi belum masif. Ia pun berharap, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah bisa menjadi pionir di Bant-



latan, Pilar Saga Ichsan ini.

Dia berharap, seluruh organisasi perangkat daerah hingga kepala desa mampu menertibkan administrasi kependudukan. "Jika ada yang belum memiliki KTP elektronik, segera membuat. Jika ada bayi lahir, warga meninggal, hingga penduduk yang datang dan pindah domisili, segera laporkan," tegasnya.

Untuk menyukseskan program ini, Tatu bahkan langsung turun ke lapangan untuk ikut membantu proses

bitkan data sesuai dengan tugasnya.

"Tidak boleh overlapping. Misalnya data tentang kependudukan ada di dinas dukcapil dan data kesehatan ada di dinas kesehatan," ujar Zudan.

Data kependudukan diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Data digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik, hingga pelaksanaan

en dalam penerapan data kependudukan. Saat ini, ada 2.680 lembaga dan sekira 700 satuan kerja daerah yang sudah bekerja sama.

"Saya memiliki harapan besar, dengan tanda tangan perjanjian kerja sama ini, penanganan masalah pembangunan berjalan baik. Termasuk masalah penanganan kemiskinan belum tuntas maksimal, masalahnya adalah data. Maka kami minta bantuan pemerintah daerah, untuk tertib adminduk," ujarnya. ● Aprillia

PUAN MAHARANI: PEREMPUAN LEBIH BERDAYA DENGAN LITERASI

Ketua DPR Puan Maharani memahami bahwa usaha meningkatkan budaya literasi bukanlah tugas mudah. Terlebih banyak ibu yang memiliki dua peran yakni sebagai ibu rumah tangga dan sekaligus pekerja.

Namun, dia meyakini perempuan Indonesia kreatif, banyak ide, dan bisa menemukan cara-cara untuk meningkatkan budaya literasi di tingkat keluarga, maupun di lingkungan sosial terdekat lainnya. "Taruh persoalan berat di hadapan perempuan Indonesia, maka insyaallah perempuan bisa menemukan solusinya," ungkap perempuan bernama lengkap Puan Maharani Nakshatra Kusyala ini.

Sebagaimana dirinya sendiri, ia juga ibu rumah tangga di sektor domestik, namun menjadi perempuan politisi di sektor publik. Peran ganda perempuan sudah ia sandang.

Rekam jejak Puan menunjukkan keterlibatan dalam politik praktis mulai menonjol ketika pada 2004 lalu aktif di Mega Center, lembaga pemenangan Megawati Soekarnoputri dalam Pilpres 2004. "Kerjaan saya keliling. Ketemu orang untuk brainstorming," kata Puan yang bersuamikan pengusaha Hapsoro Sukmonohadi.

Ia juga sempat aktif di Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) sebagai anggota DPP Bidang Luar Negeri pada 2006. Tiga tahun berikutnya, ia maju sebagai calon anggota DPR dari Jawa Tengah dari Par-

tai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Dalam waktu 10 tahun menjadi anggota parlemen, Puan berhasil menduduki kursi pucuk pimpinan

DPR. Perolehan suara PDIP di tingkat nasional membuat partai kepala banteng itu berhak mengutus kadernya menjadi Ketua DPR. Jadilah ia perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR.

Menjelang peringatan Hari Kartini pada tahun ini, Puan menekankan kembali pentingnya budaya literasi di lingkungan keluarga. Menurut dia, budaya literasi dalam keluarga merupakan bekal untuk mewujudkan kemajuan bangsa Indonesia.

Ia menambahkan, kemampuan literasi seperti membaca, menulis, serta mengolah dan memahami informasi, membuat seseorang bisa menyerap begitu banyak ilmu pengetahuan, bisa menuangkan gagasan dan berpikir kritis, serta memiliki keahlian problem solving.

"Jika R.A. Kartini tidak memiliki kemampuan literasi, maka tidak akan ada buku 'Habis Gelap Terbitlah Terang' yang isinya sudah menginspirasi banyak Kartini-Kartini lintas generasi hingga masa kini," kata Puan, dalam laman resmi DPR, Selasa, 20 April 2021.

Perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR RI ini pun mengatakan peran aktif perempuan Indonesia sangat menentukan, khususnya dalam men-



buhkan literasi di dalam keluarga. Menurut dia, keluarga merupakan unit masyarakat yang terkecil tetapi berperan besar dalam kemajuan sebuah bangsa.

"Tentunya kita ingin setiap anak Indonesia memiliki titik awal kehidupan yang baik. Nilai-nilai yang ditanamkan di dalam keluarga adalah nilai-nilai yang akan turut membimbing hidup seseorang sepanjang hidupnya," ujarnya.

Oleh sebab itu, legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah 5 tersebut, jika budaya literasi sudah ditanamkan sejak dini di tingkat keluarga, maka mereka akan tumbuh dewasa dengan budaya literasi yang kuat.

"Ketika budaya membaca di rumah menjadi sebuah kebiasaan, maka anak-anak akan terbiasa menjadikan buku atau bahan bacaan sebagai rujukan untuk mendapatkan informasi," ucap Puan.

Lebih dari sekadar hirau pada kaumnya, Puan sangat berempati dengan kaum muda secara umum dalam kontes Hari Kartini. Dalam satu kesempatan, Puan mengajak generasi muda Indonesia menjadikan perjuangan RA Kartini sebagai inspirasi utama dalam memperkuat nation and character building, yang memiliki fungsi melawan kekuatan robotisasi masa kini.

Menurut dia, saat ini generasi muda dan bangsa kita tengah menghadapi dua tantangan besar sekaligus. Pertama adalah tantangan Pandemi Covid-19 yang telah memberikan beban berat dalam berbagai aspek kehidupan. Kedua, tantangan teknologi dengan adanya Revolusi Industri 4.0 yang menghadirkan tantangan bagi manusia dalam bentuk robotik, kecerdasan buatan, dan lain-lain. Untuk yang kedua ini, bahkan kecerdasan baru itu dapat menggantikan peran manusia dalam menangani pekerjaan.

"Saya dapat membayangkan tekanan yang dihadapi generasi muda Indonesia saat ini," kata Puan dalam Talk Show memperingati Hari Kartini dengan tema: "Perspektif Generasi Milenial Tentang Kartini" yang dilaksanakan DPP PDIP bidang Kesehatan, Perempuan, dan Anak, di kantor pusat partai di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu, 21 April 2021.

Puan mencontohkan para mahasiswa-mahasiswi yang baru saja lulus. Di saat-saat akhir ujian mereka di kampus selama setahun terakhir, banyak dilaku-

kan secara online yang memiliki tantangannya sendiri.

Lalu setelah melewati wisuda yang kemungkinan besar juga dilakukan secara virtual, maka wisudawan-wisudawati harus mencari kerja secara online. Karena dibatasi secara fisik untuk berkeliling mengikuti wawancara kerja.

"Itupun banyak jenis pekerjaan yang sudah berubah karena tuntutan kemajuan teknologi. Manusia tidak hanya bersaing dengan manusia, tetapi juga bersaing dengan mesin dan robot," kata Ketua DPP PDIP bidang Politik dan Keamanan itu.

Namun menurut Puan, Kartini sangat visioner dengan perjuangannya mema-

menghadirkan manusia-manusia tangguh, kreatif, inovatif, dan adaptif, yang tetap kuat jiwa ke-Indonesia-annya. Saya percaya bahwa Generasi Milenial dan Generasi Z Indonesia adalah generasi hebat," ulas Puan.

Untuk memajukan Indonesia, menurut Cucu Proklamator RI Soekarno itu, kita membutuhkan manusia Indonesia yang menghormati nilai luhur budaya bangsa. Generasi yang memahami akar kepribadian bangsa. Yakni sebagai bangsa yang ramah, toleran, religius, dan bergotong-royong.

Kembali ke soal literasi perempuan, bukan sekali saja Puan berbicara tentang itu. "Semangat Kartini selalu



jukan pendidikan perempuan. Karena yang akan membedakan serta tetap membuat manusia unggul adalah kualitas kecerdasannya yang tak bisa dimiliki robot. Yakni kemampuan untuk memiliki nation and character building.

"Di sinilah terlihat bahwa nation and character building besar perannya untuk

menginspirasi kami meluaskan akses pendidikan dan menekan angka buta huruf," ungkap Puan dalam suasana peringatan Hari Kartini 2018, tahun yang sama ketika Puan turut mendeklarasikan Gerakan Ibu Bangsa Membaca yang bertujuan mengajak ibu-ibu seluruh Indonesia semakin giat membaca. ●

Khofifah Indar Parawansa

TENTANG RA KARTINI YANG JUGA SANTRI

Bagi Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa, peringatan Hari Kartini diartikan sebagai momen pengingat bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam penggerak ekonomi bangsa. Ia juga menyebut RA Kartini sebagai santri.

Maka, Gubernur perempuan pertama Jatim ini kemudian mengajak masyarakat Jatim untuk memahami peran perempuan di lingkungan paling kecil yaitu keluarga. Perempuan memiliki peran besar dalam urusan keuangan rumah tangga. Mereka menata, mengalokasi, serta berusaha mencukupkan keuangan yang dimiliki keluarga tersebut.

Di sinilah, kata dia, perempuan memiliki peran besar dalam stabilitas keuangan sekaligus perekonomian. Bahkan ada anekdot yang sering didengar tentang perempuan. Yakni, perempuan lebih pandai hitung-hitungan daripada lelaki. Utamanya hitungan uang belanja.

"Di kala pandemi Covid-19 dampaknya sangat dirasa untuk perekonomian rumah tangga. Pada posisi ini, perempuan diuji untuk mampu mengelola keuangan dengan baik. Mereka memeras otak agar dapur tetap ngebul," tegasnya.

Tak hanya itu, sebagian besar penggerak aktivitas UKM dan KUMKM di masyarakat adalah perempuan. Ini bukti bahwa perempuan juga memiliki peran sebagai penggerak perekonomian bangsa.

"Makanya kita ada program Jatim Puspa, pro-

gram pemberdayaan usaha perempuan. Semester II di 2020, telah digelontorkan ke perempuan yang mendapat bantuan hibah bermodal usaha," ujar Khofifah Harapannya, perempuan

bisa melakukan aktivitas lain. Seperti berjualan makanan, minuman, membuat baju, handycraft, dan beragam aktivitas lainnya. Produk tersebut menjadi komoditas ekonomi yang bisa dijual. Mereka memiliki pendapatan tambahan dari aktivitas tersebut.

Program ini memberi nilai tambah kepada perempuan. Pendapatan tambahan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Peningkatan kesejahteraan akan mendorong pertumbuhan ekonomi pada tingkat daerah maupun provinsi. Perempuan masa kini memiliki peran yang cukup kompleks. Dulu, perempuan hanya diibaratkan sebagai kanca wingking.

Jadi, program bertujuan memberi nilai tambah ke perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Endingnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah maupun provinsi.

"Perempuan masa kini memiliki peran kompleks. Dulu, hanya sebagai kanca wingking (teman di belakang) atau urusan dapur, dan pendidikan tak penting bagi mereka.



Kini berkat Kartini, kelahiran Jepara itu menjadi pendobrak pemahaman akan perempuan pada zaman dulu,” tegas Khofifah.

Pada usia 12 tahun, dia dipingit. Namun Kartini memang berbeda dengan perempuan di masa itu karena bisa berbahasa Belanda. Putri Raden Mas Adipati Ario Sosroningrat itu tetap belajar.

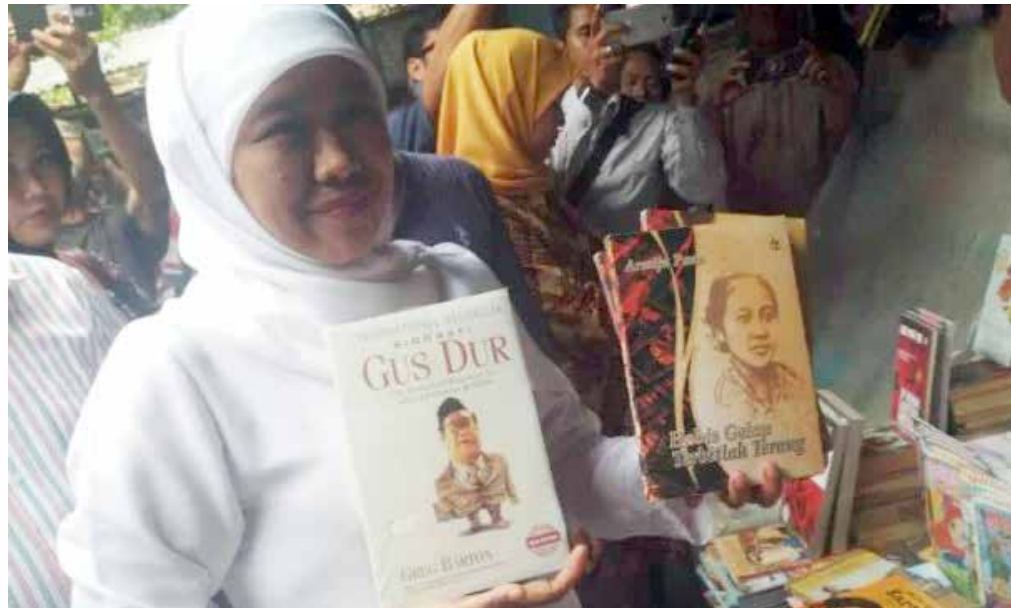
Dia menulis surat kepada teman-teman korespondensinya dari Belanda. Kartini melihat kemajuan berpikir perempuan Eropa.

Semangat Kartini untuk memajukan perempuan di Indonesia seperti di Eropa, yakni perempuan dan lelaki memiliki hak dan kewajiban yang sama. Di Indonesia, perempuan kala itu di posisi status sosial terendah.

Kartini terus mewujudkan eksistensinya. Dia berhasil menjadikan perempuan sejajar dengan lelaki. Memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tentu dengan tidak meninggalkan kodratnya.

“Di masa pandemi Covid-19 ini, perempuan juga mempunyai peran yang sama pentingnya. Bahkan, perempuan sangat dibutuhkan dalam mendorong penerapan standar protokol kesehatan rumah tangga. Mereka adalah elemen terdepan dalam mencegah kluster rumah tangga,” papar Khofifah.

Maka sudah sepatutnya bangsa menjadi seorang perempuan. Sosoknya tidak lagi berada pada urutan ke sekian. Perempuan juga sudah memiliki kes-



empatan untuk berada di depan dalam segala hal. Terutama pada konteks penggerak perekonomian bangsa.

Sedangkan dalam video yang diunggah Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Jawa Timur, Gubernur Khofifah juga menyampaikan tausiyah yang diawali dengan dalil yang menjelaskan sosok Rasulullah dan Aisyah istri Rasulullah. Betapa seorang Aisyah, istri Rasulullah merupakan seorang perempuan yang memiliki kedalaman ilmu yang luar biasa.

Di sisi lain, bertepatan dengan bulan Ramadan, bulan April juga merupakan hari lahir R.A. Kartini, salah satu pahlawan perempuan pelopor emansipasi wanita.

RA. Kartini juga menjadi santri kyai Soleh Darat, seorang ulama besar di Semarang.

Khofifah mencontohkan dua sosok perempuan yang luar biasa, di jaman nabi dan setelahnya. Ia mengemukakan bahwa bulan ini pula turun Al-Quran yang ayat pertamanya adalah Iqra' yang artinya membaca. Bulan Ramadan, bulan lahirnya RA. Kartini, juga bertepatan dengan bulan turunnya ayat pertama Al-Quran.

“Betapa ini pertemuan nilai yang luar biasa bagi perempuan Indonesia. Selain Islam mengajarkan perempuan pintar mengikuti Sayidah Aisyah ra juga adalah gemar membaca,” ungkapnya. ●





Pilgub Jambi

REKOR COBLOS ULANG PILKADA 2020

Mahkamah Konstitusi memutuskan coblos ulang di 88 tempat pemungutan suara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Jambi 2020. Inilah rekor coblos ulang terbanyak dalam rangkaian Pilkada 2020.

Usai pilkada serentak 19 Desember 2020 berlanjut rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, pasangan calon (paslon) nomor urut 1 Cek Endra-Ratu Munawaroh menolak hasil perhitungan suara. KPU Jambi menetapkan paslon nomor urut 01 Cek Endra-Ratu Munawaroh meraih 585.203 suara, paslon nomor urut 02 Fachrori Umar-Syafril Nursal 385.388 suara, dan paslon nomor urut 03 Al Haris-Abdullah Sani dengan perolehan suara 596.621 suara.

Selanjutnya Paslon Cek-Endra-Ratu Munawaroh mengajukan permohonan perselisihan ke MK. Bertindak sebagai kuasa hukumnya adalah Yusril Ihza Mahendra dan kawan-kawan.

Menurut Yusril, terdapat 13.487 suara yang tidak sah, karena pemilihnya tidak mengantongi KTP elektronik dan suket, namun dibolehkan memilih oleh KPU Jambi. "Dengan adanya pemilih yang tidak berhak ini, telah menguntungkan pasangan lain dan merugikan CE-Ratu," kata Yusril dalam sidang MK secara daring, Selasa, 26 Januari 2021.

Paslon Cek Endra-Ratu Munawaroh kemudian memohon kepada MK membatalkan penetapan suara oleh KPU Provinsi Jambi, dengan dalil terjadi pelanggaran aturan secara terstruktur, sistematis dan masif. Pelanggaran terjadi antara lain karena KPU membiarkan pemilih tanpa KTP elektronik atau suket, untuk masuk ke dalam TPS dan mencoblos.

Sedangkan selisih suara Pemohon dengan paslon nomor urut 3 Al Haris dan Abdullah Sani sebesar 11.418 suara. Selisih suara pemohon dengan paslon peraih suara terbanyak menurut KPU Jambi itu masih di bawah ambang batas selisih 1,5 persen (23.508 suara) yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Pemohon memiliki bukti-bukti bahwa selisih suara yang terpaut tipis antara Pemohon dan paslon nomor urut 3 yakni sebesar 0,72 persen. Terindikasi dari praktik pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi secara meluas yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan paslon nomor urut 3 sehingga memengaruhi perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, Pemohon berpendapat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo," kata Yusril saat memaparkan pokok permohonan secara daring.

Pelanggaran berikutnya, ketika pemungutan suara sedang berlangsung, Pemohon menemukan satu per satu



pemilih yang tidak berhak memilih tapi diberikan kesempatan memilih di sebagian besar TPS-TPS se-Provinsi Jambi. Setelah dilakukan pendataan, di setiap TPS yang diduga terdapat pemilih tidak berhak itu, rata-rata terdapat lebih dari satu orang pemilih yang tidak berhak diberikan kesempatan untuk memilih di dalam TPS dengan jumlah pemilih tidak berhak bervariasi minimal dua orang per TPS.

Sedangkan total Pemilih tidak berhak yang Pemohon temukan berjumlah 13.487 pemilih yang tidak berhak. Antara lain karena tidak memiliki KTP Elektronik dan belum melakukan rekam data elektronik di Disdukcapil.

Pemohon juga mendalilkan, berdasarkan data BPS Provinsi Jambi mengenai statistik jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin tahun 2019, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Provinsi Jambi adalah sebanyak 3.624.579 jiwa. Sementara berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan KPU Jambi (Termohon), diketahui pula jumlah nama pemilih di seluruh kabupaten se-Provinsi Jambi adalah sebanyak 2.415.862 jiwa.

Selanjutnya, kata Yusril, Cek-Endra juga memohon MK mengabulkan gugatan dengan memerintahkan KPU Jambi melaksanakan pemilihan suara ulang di lima kabupaten, yakni Muaro-jambi, Kerinci, Tanjung Jabung Timur, Batanghari dan Kota Sungaipenuh.

Tercakup di dalamnya TPS-TPS yang berlokasi di lima kabupaten itu

"Harus dilakukan PSU di lima kabupaten, 15 kecamatan dan 41 kelurahan dan desa," kata Yusril. Apabila tidak terjadi pelanggaran, kata dia, maka pasangan CE-Ratu unggul dengan perolehan suara 585.203 suara, lalu pasangan FU-Safril sebanyak 385.388 suara dan pasangan Haris-Sani hanya 583.134 suara sehingga CE-Ratu seharusnya menang dengan selisih sekitar 2.000 an suara," kata Yusril.

Sedangkan pada persidangan lanjutan yang berlangsung pada Senin, 1 Februari 2021, Muhammad Syahlan Samosir selaku kuasa hukum Termohon (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi), menolak dengan tegas dalil permohonan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang telah menyimpulkan seluruh proses Pilkada Jambi 2020 diwarnai banyaknya pelanggaran dan kecurangan. Menurut Syahlan dalil tersebut sangat tidak mendasar dan bersifat menduga-duga oleh sebab seluruh masyarakat ikut menyaksikan proses pilkada.

Berikutnya, Termohon menanggapi dalil soal laporan Pemohon mengenai pelanggaran Pilkada tidak pernah ditanggapi Bawaslu Provinsi Jambi. Menurut Syahlan, Bawaslu tidak pernah memberikan rekomendasi kepada KPU soal pelanggaran pilkada yang didalilkan Pemohon. Sementara

itu, berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Jambi terhadap penetapan rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU Provinsi Jambi, tidak ditemukan adanya pelanggaran.

Selanjutnya, Pihak Terkait PHP Gubernur Jambi melalui kuasa hukum Heru Widodo menyatakan pelanggaran pelanggaran yang dijadikan dalil dan dasar permohonan pembatalan hasil Pilkada, telah diselesaikan pene-gakan hukumnya di Bawaslu Provinsi. Dengan demikian, ungkap Heru, pene-gakan hukum terhadap permasalahan dalam permohonan a quo telah selesai dengan tuntas. Atas dasar itulah, maka beralasan bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Mahkamah agar berkenan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Urusan dalil-dalil berlanjut dengan sidang yang mengagendakan pembuktian. Dalam persidangan terakhir yang berlangsung Selasa, 23 Februari 2021, hadir sejumlah saksi pemohon untuk mendukung dalil yang telah dikemukakan sebelumnya.

Saksi Pemohon, Riyan Saputra, pelajar berusia 18, mengaku diminta menandatangani surat pernyataan dari Tim Paslon Nomor Urut 3 Al Haris dan Abdullah Sani agar tidak menandatangani surat pernyataan, karena sebelumnya Riyan pernah menandatangani surat pernyataan bahwa ia tidak mempunyai e-KTP dan tidak pernah di-

• INFO PILKADA

rekam data elektronik kependudukan.

Saksi lainnya, masih dari Pemohon, Abdul Rahman, pelajar warga Desa Danau Sarang Elang, Kabupaten Muaro Jambi. Yang dialami Abdul Rahman hampir sama dengan Riyan Saputra: tidak mempunyai e-KTP dan tidak pernah direkam data elektronik kependudukan, namun tetap dapat menggunakan hak pilih di TPS 02 Danau Sarang Elang RT 05.

Abdul Rahman menjelaskan bahwa saksi didikte oleh tim paslon nomor

seseorang yang tak dikenal, agar tidak menandatangani surat pernyataan sebelumnya.

Sedangkan KPU Provinsi Jambi sebagai Termohon) menghadirkan saksi Oka Parado yang menjelaskan terkait keterangan Saksi Pemohon mengenai pemilih yang tidak memiliki e-KTP. Oka mengatakan dirinya sudah memiliki e_KTP dan tidak pernah membuat surat pernyataan serta menggunakan hak memilih di TPS 02 di Desa Muaro Pijoan. Saksi Termohon lainnya, Tegar

MK juga melakukan pemeriksaan terhadap para Saksi Pihak Terkait (Paslon Nomor Urut 3 Al Haris dan Abdullah Sani). Saksi Chandra Wijaya menerangkan sudah memiliki e-KTP dan ikut memilih di TPS 05 Desa Sungai Lokan, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selain itu saksi Pihak Terkait berikutnya, Adel Triandra memperlihatkan e-KTP asli miliknya dan menyebutkan NIK kepada Majelis Hakim. Adel juga menggunakan hak pilihnya di



urut 3 agar menulis sendiri surat pernyataan, lalu dipaksa menandatangani surat pernyataan. "Saya didikte oleh tim paslon nomor urut 3 agar menulis sendiri surat pernyataan, lalu dipaksa menandatangani surat pernyataan itu. Isi surat pernyataan bahwa saya tidak menandatangani surat pernyataan selain surat pernyataan ini," jelas Abdul Rahman kepada Majelis Hakim yang dipimpin Wakil Ketua MK Aswanto dengan didampingi Hakim Konstitusi Suhartoyo, dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh.

Selain itu saksi Erwin warga yang berprofesi nelayan, juga diajukan pemohon. mengaku telah dipaksa menandatangani surat pernyataan oleh

Saputra, mengaku sudah memiliki e-KTP, tidak membuat surat pernyataan namun tidak ikut memilih dalam pilkada karena sakit.

Kemudian ada Saksi Termohon, Parsono yang bertugas TPS 06 di Desa Ladang Panjang, Kabupaten Muaro Jambi menerangkan ada empat orang pemilih yang tidak hadir dan tidak membuat surat pernyataan. Sementara itu Saksi Termohon, Yul Handayani sebagai guru honorer dan menjadi anggota KPPS di TPS 01 Kelurahan Rantau Indah, saat pemungutan suara ada wanita bernama Usi Amalia yang dikatakan Pemohon tidak memiliki e-KTP, tapi menurut Usi, punya e-KTP dan kemudian ikut memilih.

Kota Sungai Penuh. Hal ini dilakukan Adel untuk menampik bahwa dirinya tidak berhak menggunakan hak pilihnya dalam pilkada, seperti didalilkan Pemohon.

Sedangkan saksi ahli Bambang Eka Cahya Widodo yang pernah menjabat Ketua Bawaslu periode 2008-2012 mengemukakan di persidangan, warga negara yang sudah berusia 17 tahun pada hari pemungutan suara dan sudah kawin mempunyai hak memilih. Hal ini sesuai dengan Pasal 56 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota (UU Pilkada).

Selanjutnya Pasal 57 UU Pilkada disebutkan bahwa untuk dapat me-

milih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih dan secara de facto berlokasi di TPS yang bersangkutan. "Ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 UU a quo, maka warga negara tersebut memiliki hak memilih dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota. Bahkan bagi warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT namun memiliki e-KTP yang sesuai alamat TPS tersebut, dapat menggunakan hak memilihnya dalam batasan harus mendaftar dulu di TPS yang bersangkutan dan didaf-

hak bervariasi minimal dua orang per TPS. Adapun total Pemilih tidak berhak yang Pemohon temukan berjumlah 13.487 pemilih karena tidak memiliki KTP Elektronik dan belum melakukan rekam data elektronik di Disdukcapil.

Termasuk dalil Pemohon bahwa berdasarkan data BPS Provinsi Jambi mengenai statistik jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin tahun 2019, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Provinsi Jambi adalah sebanyak 3.624.579 jiwa. Sementara ber-

akkan asas pemilihan yang luber dan jurdil, Mahkamah berpendapat harus dilaksanakan pemungutan suara ulang di TPS-TPS sejumlah kecamatan wilayah Provinsi Jambi.

Alhasil, dalam sidang pengucapan putusan pada Senin, 22 Maret 2021 petang, Ketua Pleno Hakim Konstitusi Anwar Usman didampingi para hakim konstitusi lainnya memutuskan untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi Nomor 127/PL.02. 6/Kpt/15/Prov/



tar dalam DPTb, menggunakan hak pilihnya satu jam sebelum TPS ditutup," ujar Bambang Eka Cahya Widodo yang pernah menjabat Ketua Bawaslu periode 2008-2012.

Nah, tiba di pengucapan putusan, Mahkamah berpendapat, telah terjadi banyak pelanggaran dan kecurangan yang masif selama berlangsung Pilkada Provinsi Jambi Tahun 2020. Antara lain, pemilih yang tidak berhak memilih tapi diberikan kesempatan memilih di sebagian besar TPS se-Provinsi Jambi.

Setelah dilakukan pendataan, rata-rata terdapat lebih dari satu orang pemilih yang tidak berhak diberikan kesempatan untuk memilih di dalam TPS dengan jumlah pemilih tidak ber-

dasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan Termohon, diketahui pula jumlah nama pemilih di seluruh kabupaten se-Provinsi Jambi adalah sebanyak 2.415.862 jiwa. Menurut Mahkamah, dalil-dalil Pemohon tersebut beralasan menurut hukum, karena Pemohon dapat memberikan bukti-bukti kuat dan meyakinkan Mahkamah.

Oleh sebab itu, untuk mendapatkan kemurnian perolehan suara dan demi validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon yang akan meningkatkan legitimasi perolehan suara masing-masing pasangan calon serta mewujudkan prinsip demokrasi yang menghargai suara pemilih dan meneg-

XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 tertanggal 19 Desember 2020 sepanjang perolehan suara di 88 TPS yang ada di Provinsi Jambi.

Mahkamah juga memerintahkan KPU Provinsi Jambi untuk melakukan pemungutan suara ulang di 88 TPS yang tersebar di berbagai kelurahan/desa di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Batanghari, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Banyak yang menunggu hasil coblos ulang yang menjadi rekor dalam Pilkada 2020 ini. ●



Arsjad Rasjid

MEMASUKI BABAK KEDUA UNTUK EKONOMI INDONESIA

Belakangan Arsjad Rasjid Prabu Mangkuningrat mencuat sebagai calon kuat Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Banyak yang berharap ia menjadi generasi baru pengusaha Indonesia yang dapat memulihkan dunia usaha di masa dan pasca Covid-19. Ia menyebutnya sebagai babak kedua dalam kehidupannya.

Sebenarnya tinggal selangkah saja ia menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia. Toh jabatan yang masih disandangnya adalah Wakil Ketua Umum di organisasi para pengusaha itu untuk periode 2016-2020.

Boleh jadi kinerjanya dalam menaklukkan berbagai bisnis membuat banyak kalangan internal di Kadin Indonesia mendorongnya naik satu anak tangga, setapak lagi, sebagai Ketua Umum. Arsjad sendiri mengakui luapan dukungan itu mendorong semangatnya untuk memperbaiki iklim bisnis di Indonesia melalui pencalonan diri sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia dengan mengusung tema inklusif dan



kolaboratif.

"Entah mengapa banyak sekali dukungan dari senior Kadin, baik dari Kadin Indonesia maupun Kadin daerah," ujar Calon Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026 itu dalam acara deklarasi pencalonannya pada Jumat, 26 Maret 2021.

Bayangkan saja, dalam acara deklarasi yang berlangsung di Hutan Kota, Plataran, Senayan, Jakarta hari Jumat 26 Maret 2021, hadir sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, antara lain Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Perdagangan M Lutfi, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Hadir juga Ketua Kadin 2015 - 2021 Rosan Perkasa Roeslani dan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin MS Hidayat.

Arsjad yang masih duduk sebagai Presiden Direktur PT Indika Energy Tbk (INDY) ini menegaskan komitmennya untuk membantu dunia usaha dan mendukung pemerintah dalam pemulihan ekonomi. Kadin, ujarnya, juga harus secara terus menerus mendorong pemerataan stimulus ekonomi dan pengembangan program hingga ke sejumlah daerah.

Arsjad Rasjid memaparkan empat program dalam memajukan perekonomian lewat Kadin Indonesia. Keempatnya adalah program kesehatan, pemulihan ekonomi nasional dan daerah, kewirausahaan, serta perbaikan internal organisasi.

Saat ini, menurut dia, hampir semua sektor usaha terimbas pandemi Covid-19. Perusahaan skala besar, menengah, hingga UMKM mencatatkan penurunan kinerja keuangan dan operasional sepanjang pandemi ini.

Guna membangkitkan semua sektor usaha kembali normal, dia mengatakan, pertama adalah faktor kesehatan, yaitu penanganan virus hingga tuntas. "Jika semua sudah sehat, maka akselerasi dalam meningkatkan perekonomian akan lebih maksimal. Lalu pemulihan ekonomi perlu kolaborasi antara pusat dan daerah," ungkapnya.

Arsjad menuturkan, usaha kecil, mikro, dan menengah atau UMKM merupakan pondasi ekonomi Indonesia, sehingga perlu adanya pengemban-

gan dan pemberdayaan terutama di masa pandemi. "Saya ingin membangun Kadin tumbuh secara inklusif dan kolaboratif. Kadin sebagai rumah kita bersama. Rumah kita untuk tumbuh secara inklusif artinya kita perlu rangkul setiap pengusaha, besar maupun kecil, hingga ke pelosok Indonesia," ujar Arsyad.

Dalam deklarasi ini, sejumlah ketua Kadin daerah mendapat kesempatan menyampaikan testimoniya secara singkat. Sekitar 10 perwakilan Kadin daerah memberikan pandangannya

yang dinamis, cepat dan penuh tantangan, sehingga perlu agresivitas dan inovasi dalam memberikan jalan keluar setiap persoalan," ungkap pengusaha kelahiran Jakarta, 16 Maret 1970 ini.

Saat ulang tahunnya yang ke-50 tahun ia mendapatkan sebuah buku berjudul *half time*. Buku tersebut membahas bagaimana ada babak pertengahan di hidup manusia yang dapat digunakan untuk mengevaluasi diri. Saat yang sama, pandemi global Covid-19 baru saja menjangkau Indonesia, dua pekan sebelum peringatan hari lahir Arsyad.



secara terbuka. Secara umum, Kadin daerah menginginkan Ketua Umum Kadin Indonesia yang memiliki komunikasi yang baik dengan daerah-daerah, terutama untuk mendengarkan permasalahan yang dihadapi pengusaha daerah.

Dari sisi wawasan dan jangkauan programnya mengintegrasikan jaringan usaha dari skala kecil di pelosok hingga konglomerasi besar yang mengglobal, Arsyad memang memiliki rekam jejak yang sudah terbukti sepanjang 50 tahun perjalanan hidupnya. "Problematika pengusaha saat ini san-

"Sepanjang tahun 2020 saya terus berdoa dan berpikir demi mendapatkan jawaban apa babak kedua saya?" kata Arsyad di acara deklarasi pencalonannya.

Seiring berjalannya waktu, Arsyad malah terpapar COVID-19. Dari virus tersebut, ia merasa dampaknya adalah pengentalan darah sebelum akhirnya sembuh. Pada Januari 2021, Arsyad malah harus menjalani operasi dan memasang ring karena gangguan di jantungnya.

"Pengalaman-pengalaman tersebut mengubah pandangan saya terhadap

• INFO PROFIL

semua yang ingin saya lakukan. Alhamdulillah dengan pulihnya kesehatan saya, saya telah mendapatkan kesempatan kedua untuk berbuat lebih di hidup yang singkat ini," ujar Arsjad.

"Memang belum lama saya berniat untuk mencalonkan diri sebagai Caketum Kadin tetapi saya percaya kesempatan ini adalah suatu personal calling bagi diri saya untuk berbakti dan mengabdikan pada ibu pertiwi," tambahnya.

Niat setelah mendapatkan berbagai pengalaman tersebut ternyata men-

terang Arsjad.

Semuanya terang dan jelas jika menelusuri perjalanan Arsjad di lingkungan bisnis. Mulai saja dari saat Arsjad Rasjid bergabung dengan Indika Group pada 1996. Ia bergabung saat perusahaan tersebut pertama kali berdiri. Berbagai bisnis ditempuhnya bersama Indika: dari Production House (PH), Radio, Telekomunikasi, Stasiun Televisi sampai IT dan teknologi.

Sebelum menjabat sebagai Presiden Direktur PT Indika Energy Tbk.

– kontraktor pertambangan, dan PT Mirabha Segara Sejati Tbk. – logistik laut. Di luar sektor energi, Arsjad juga pernah menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris di PT Net Mediatama Televisi (NET.), juga menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris di PT Asuransi Cakrawala Proteksi.

Dalam menakhodai Indika Energy, Arsjad berhasil membesarkan aset perusahaan dari bernilai cuma USD 150 juta pada 2005 menjadi USD 2,5 miliar dalam jangka waktu lima tahun melalui strategi akuisisi-akuisisi. Keberhasilan Arsjad tersebut tak lepas dari ide-ide 'gila' dengan basis sinergi SDM dan value creation antarperusahaan-perusahaan yang diakuisisi.

Selain bersama Indika Energy, Arsjad tercatat pernah atau masih aktif sebagai penasihat hingga komisaris di berbagai perusahaan ternama seperti Alpha JWC Ventures hingga Grab Teknologi Indonesia.

Pengusaha berdarah campuran Palembang-Sunda-Tionghoa ini juga aktif di berbagai organisasi hingga pemerintahan. Ia juga masih aktif sebagai Wakil Ketum KADIN Bidang Pengembangan Pengusaha Nasional. Pada periode 2016-2020, Arsjad pernah dipercaya menjadi Staf Ahli Kapolri untuk Bidang Ekonomi.

Peraih Young Global Leader 2011 dari World Economic Forum (WEF) dan Best Executive di Indonesia pada tahun 2010 dari Asiamoney ini juga aktif di kegiatan sosial. Antara lain Arsjad juga aktif sebagai Ketua Pembina Indika Foundation (Yayasan Indika Untuk Indonesia), Ketua Dewan Pengawas Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB), Dewan Penasehat Indorelawan, juga secara aktif mendukung berbagai inisiatif berdampak sosial, kewirausahaan sosial (social enterprise), dan filantropi. Yang terbaru, Arsjad mengemban amanah sebagai Ketua Dewan Penyantun di Masyarakat Ekonomi Syariah (MES).

Banyak yang berharap babak kedua kehidupan Arsjad Rasjid yang menjadi panggilan pribadinya membawa dunia usaha inklusif dan kolaboratif memberi manfaat lebih banyak dengan skala yang jauh lebih luas. Bukan hanya berharap, melainkan mendukungnya juga. ●



emukan jalannya. Arsjad mendapatkan banyak dorongan mulai dari Kadin Indonesia, pengusaha daerah, hingga asosiasi yang menginginkan dia maju sebagai Caketum Kadin.

Menurut dia, dengan langkah yang diambilnya ini juga bisa membantu masyarakat dalam berusaha. Apalagi, kata Arsjad, saat ini masih banyak masyarakat yang kesulitan dalam menjalankan bisnis.

"Saya sendiri tahu betul bagaimana sulitnya merintis usaha dari bawah karena kesuksesan Indika tak terjadi tanpa momen tangis dan tumpah darah,"

– perusahaan energi terintegrasi nasional, ia duduk sebagai Direktur Utama dan CEO Grup 2016-2018 dan 2005-2013, juga sebagai Wakil Direktur Utama dan CFO Grup pada tahun 2013-2016.

Di dalam Grup Indika Energy, Arsjad sebelumnya pernah menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi di berbagai perusahaan seperti PT Kideco Jaya Agung – perusahaan batubara, PT Tripatra Engineers & Contractors – perusahaan EPC (engineering procurement and construction) minyak dan gas, PT Petrosea Tbk.

BABAK PERTAMA YANG LUAR BIASA

Lahir dari pasangan HMN Rasjid (Purnawirawan TNI AD) dan Hj Elly Suniawati, ayah Arsjad Rasjid Prabu Mangkuningrat berdarah Palembang, sedangkan ibunya berdarah Sunda-Tionghoa.

Meninggalkan Indonesia pada usia remaja, 15, untuk bersekolah di Amerika Serikat adalah bagian dari babak pertamanya. Lebih dari 35 tahun lalu. Majalah kampusnya, Pepperdine University, mengisahkan, dua anak laki-laki memperhatikan Arsjad turun dari mobil

digital Indonesia dengan televisi kabel pada pertengahan 1990-an. Tujuannya adalah untuk membantu transisi negara dari satelit ke multimedia, mirip dengan Time Warner di AS.

Di sela-sela perannya sebagai direktur pemrograman di sana dan sebagai direktur di perusahaan pemrograman yang membuat game interaktif untuk program televisi, Indonesia menghadapi krisis keuangan 1997, yang mengharuskan perusahaan di seluruh Asia merestrukturisasi bisnis. Namun,

sebuah perusahaan petrokimia milik British Petroleum (BP), PT PENI, satu-satunya yang beroperasi di Indonesia pada saat itu. "Kami mengusulkan kepada mereka bisnis kimia yang lebih baik," kenang Rasjid.

"Kami bukan penawar tertinggi, tetapi kami dapat merekomendasikan paket yang benar-benar disukai BP, jadi kami membeli perusahaan itu seharga 50 juta dolar AS," ungkap Arsjad

Tertantang oleh kendali manajemen perusahaan, Rasjid dan timnya



dan bergegas membantu. Salah satunya Agus Lasmono. Hari itu Arsjad dan Agus mulai menjadi teman dekat ketika mereka mengetahui bahwa mereka berdua berasal dari negara yang sama, 8.000 mil jauhnya dari tempat mereka berdiri. Selanjutnya, Arsjad, Agus, dan Wisnu Wardhana bergabung ke Pepperdine. Maka, pada 25 tahun ke depan, ketiganya bekerja sama berhasil mengembangkan Indika Energy di Indonesia.

Mungkin banyak yang belum mengetahui, sepulang dari AS, Arsjad sempat bekerja di Mitsubishi Motors sebagai wakil direktur keuangan. Setelah terjun ke industri otomotif, dia beralih persneling dan menjadi pemain kunci dalam mengembangkan kehadiran

haluan bisnis mulai berubah pasca krisis dengan prospek bisnis energi.

Ketika proyek pembangkit listrik diusulkan kepada tim, "kami ingat keluarga Wishnu berbisnis energi. Jadi Agus dan saya mendatangnya untuk berdiskusi apakah bisa berbisnis bersama?. Dari situlah Indika memulai," kata Arsjad mengenang.

Di Indika Energy itulah Arsjad semakin memperluas jaringan bisnisnya dengan berbagai budaya berbeda. Setelah bekerja di perusahaan Jepang, Mitsubishi, di Indika Arsjad berbisnis dengan pengusaha Malaysia, China, Inggris, dan bangsa-bangsa lainnya.

Pada 2002 Indika memulai strategi akuisisinya dengan mengambil alih

menjualnya satu tahun kemudian seharga 60 juta dolar AS. Dari strategi akuisisi inilah Indika makin berkembang mulai dari produksi batubara (PT Kideco Jaya Agung); jasa rekayasa, pengadaan, dan konstruksi minyak dan gas (PT Tripatra Engineers and Constructors); teknik, pertambangan, dan konstruksi batubara (PT Petrosea Tbk); jasa logistik dan pengiriman (PT Mitrabahera Segara Sejati Tbk); dan proyek pembangkit listrik (PT Cirebon Electric Power).

Alhasil, justru semangat untuk memajukan perekonomian Indonesia malah semakin menggebu-gebu. Setelah melewati babak pertama yang luar biasa, Arsjad Rasjid memasuki babak kedua yang lebih menantang. •



PT Freeport Indonesia

IZIN EKSPOR DAN LOKASI SMELTER ITU

PT Freeport Indonesia mendapat izin ekspor konsentrat tembaga selama setahun pada 15 Maret 2020, sementara pembangunan smelter yang menjadi syaratnya malah mandek. Sebenarnya bukan hanya Freeport Indonesia yang mendapat izin karena ketentuannya menyangkut ekspor mineral logam.

Jadi, dalam kesempatan rapat kerja (raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, beberapa anggota Komisi VII DPR RI mencecar Pak Menteri soal izin ekspor konsentrat tembaga untuk PT Freeport Indonesia (PTFI), bahan baku yang memerlukan pengolahan lagi di smelter. Bagaimana bisa terjadi?

"Di regulasi minerba ini tertera, apa-

bila tidak tercapai, maka izin ekspor dicabut. Ini sudah dilakukan dengan perusahaan lain yang melanggar. Nah, kenapa PTFI nggak diberlakukan ini?" kata Muhammad Nasir dari Fraksi Demokrat dalam raker di Kompleks Parlemen, Senin 22 Maret 2021.

Menurut Nasir yang adik kandung mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Nazaruddin itu, jika mengacu pada aturan yang masih berlaku,

Freeport Indonesia seharusnya sudah kehilangan izinnya. "Kenapa izin PTFI nggak dicabut?" sambungnya

Izin ekspor itu tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM nomor 46.K/MB.04/MEM.B/2021 tentang Pemberian Rekomendasi Penjualan ke Luar Negeri Mineral Logam pada Masa Pandemi COVID-19 yang diteken Arifin. Sedangkan aturan minerba yang disebut Nasir tadi adalah Peraturan Menteri ESDM Nomor 50 tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Minerba, izin ekspor baru terbit jika pembangunan smelter mencapai target.

Nah, Menteri Arifin menyebut dalam aturan sebelumnya memang pemerintah berhak tidak mengeluarkan izin ekspor bagi perusahaan yang tidak menyelesaikan pembangunan smelter

sesuai target. Namun, akibat adanya pandemi, aturan tersebut dikecualikan.

Arifin menambahkan, penyetoran izin ekspor akan berpengaruh pada penerimaan negara. Belum lagi, dampak sosial karyawan di Freeport akibat tidak bisa ekspor.

"Untuk itu kita berikan izin ekspor dengan tetap memberlakukan denda progres konstruksi yang masanya akan didudukkan (dirundingkan). Denda 20 persen dari revenue (pendapatan) tahun berjalan. Tapi dilihat periodenya," kata Arifin menjawab.

Sebenarnya, bukan hanya Freeport Indonesia yang mendapat fasilitas izin ekspor bahan mentah tambang, lantaran kebijakan Menteri ESDM tadi menyangkut mineral logam, yang berarti bukan hanya tembaga yang menjadi spesialis Freeport. Tambang nikel pun akan tercakup dalam ketentuan ini.

Toh Freeport Indonesia mengaku, kebijakan Menteri ESDM terkait ekspor mineral logam itu memungkinkannya mengeksport konsentrat tembaga selama satu tahun ke depan. Terhitung sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai 15 Maret 2022 dengan volume dua juta ton konsentrat.

"Kami menyambut baik, bahwa pemerintah Indonesia telah mengeluarkan izin ekspor PTFI untuk satu tahun ke depan. Mulai 15 Maret (izin dikeluarkan), dua juta ton konsentrat," ungkap Vice President Corporate Communications PT Freeport Indonesia Riza Pratama, Selasa, 23 Maret 2021.

Soal denda yang disebut oleh Menteri Arifin akan didudukkan (didiskusikan), Freeport juga akan terus melakukan diskusi secara kooperatif dengan pemerintah untuk merealisasikan rencana produksi juga kontribusi dari Freeport. "Termasuk bea keluar ekspor sebagaimana diatur dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB)," jelasnya.

Terkait realisasi pembangunan smelter yang belum mencapai target, Riza mengakui hal itu lantaran dampak dari pandemi Covid-19. "Seperti am-

anat dalam Kepmen ESDM yang baru dikeluarkan terkait denda, pemerintah dan PTFI tengah mendiskusikan dan mendetailkan aktivitas-aktivitas pembangunan smelter mana saja yang terdampak oleh pandemi Covid-19," ujarnya.

Berdasarkan laporan Freeport, hingga Juli 2020, pembangunan smelter katoda tembaga di Java Integrated Industrial and Port Estate (JIPE) Gresik, Jawa Timur, baru mencapai 5,86 persen dengan biaya USD 159 juta. Padahal target tahun lalu seharusnya sudah mencapai 10,5 persen. Sedangkan untuk smelter precious metal refinery (PMR) hingga Juli 2020 baru mencapai 9,79 persen dengan biaya USD 19,8 juta, padahal targetnya 14,29 persen. Ditjen Min- erba Kemen- ESDM me -

nyebut keterlambatan ini terjadi karena pasokan barang dan tenaga kerja yang terganggu di tengah pandemi Covid-19.

Mengenai tersendatnya pengembangan smelter ini juga mendapat sorotan Nasir Fraksi Partai Demokrat di raker dengan Menteri ESDM. "Saya minta ada ketegasan. Yang lain suruh bangun, sudah pada selesai. Ini Freeport bilang bangun di Gresik, sekarang ke Halmahera, nggak jadi juga. Masa kita dibohongi terus. Ini harus tegas pimpinan," kata Nasir.

Hal serupa dikemukakan oleh Ridwan Hisjam dari Fraksi Golkar. Dia menyebut, Freeport yang terus menunda pembangunan smelter hanya akal-akalan saja agar tidak menyelesaikan proyek ini.

"Jangan mau diakal-akali. (Smelter) ini kan urusan hulu dan hilir. Jadi saya usulkan, sudahlah kasih tahu ke Presiden (Jokowi) jangan mau ditipu lagi. Terus



Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif

terang (2018 Indonesia berikan IUPK ke PTFI) untuk menaikkan elektabilitas biar terpilih lagi. Masa mau ribut lagi kita? Lebih baik diselesaikan, nggak ada waktu lagi,” ujar Ridwan yang seperti Nasir terpilih dari daerah pemilihan

ernya, IUPK perusahaan akan dicabut. “Perlakuan semua perusahaan sama,” katanya.

Menurut Dirjen Ridwan, soal izin ekspor mineral logam, perusahaan yang boleh melakukan ekspor tersebut

luar negeri pada periode evaluasi.

Smelter merupakan pabrik pengolahan dan pemurnian barang tambang menjadi produk jadi. Pemerintah sedang mendorong perusahaan tambang melakukan nilai tambah tersebut. Kewajibannya pun tertulis pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara atau UU Minerba pasal 102 ayat 1.

Nah, dengan adanya Keputusan Menteri ESDM yang baru, bertiup angin segar bagi perusahaan yang belum menyelesaikan pabrik pemurniannya. PT Freeport Indonesia salah satu saja sebenarnya.

Sedangkan Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Sugeng Mujiyanto mengatakan relaksasi aturan itu tidak akan berdampak pada pembangunan smelter. Relaksasinya hanya diberikan setahun. Setelah itu, aturan sebelumnya akan berlaku kembali. “Target smelter-nya tetap,” ujarnya.

Ridwan Djamaluddin juga mengungkapkan, pemerintah telah memberikan surat teguran kepada PT Freeport Indonesia (PTFI) atas terlambatnya konstruksi pembangunan smelter. Saat ini pembangunannya pun masih dalam tahap pembahasan dengan PT Chiyoda, sebagai partner smelter di Gresik, Jawa Timur.

Kegiatan uji pembebanan tiang atau piling test yang seharusnya berjalan pada September 2020, tertunda menjadi November 2020. Ditjen Minerba lalu mengirimkan surat teguran kepada Freeport untuk segera melakukan pengujian tersebut. Tim dari Ditjen Minerba juga akan melakukan pengawasan langsung ke lapangan terkait pelaksanaannya.

Terkait keinginan Freeport memindahkan smelter-nya ke Weda Bay, Maluku Utara, Ridwan mengatakan perusahaan belum secara resmi menyampaikan skema kerja samanya. Freeport rencananya akan menggandeng perusahaan asal Tiongkok, Tsingshan, dalam proyek tersebut.

Pemerintah saat ini masih mengevaluasi rincian proyek di Gresik. “Khususnya dari aspek keekonomian terkait pengajuan perubahan kapasitas produksi smelter dari dua juta ton menjadi 1,7 juta ton per tahun,” kata Ridwan. ●



Muhammad Nasir



Ridwan Hisjam

Jawa Timur, tempat smelter itu dibangun.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Minerba Ridwan Djamaluddin mengatakan, hingga saat ini baru dua smelter yang sudah selesai. Dia menuturkan, jika hingga 2023 Freeport tidak menyelesaikan smelt-

adalah pemegang izin usaha pertambangan (IUP) operasi khusus dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Meskipun boleh ekspor, para pemegang izin usaha itu tetap terkena sanksi administratif karena progres smelter yang lambat. Pemerintah menerapkan denda dari nilai kumulatif penjualan ke

SMELTER SANA SMELTER SINI

Kepastian lokasi pembangunan smelter Freeport Indonesia malah menjadi kurang pasti. Sementara pembangunan smelter di Gresik, Jawa Timur belum mencapai target penyelesaian, tersiar kabar PT Freeport Indonesia dan Tsingshan Steel, keduanya yang berkolaborasi di Gresik, bakal membangun smelter di Wade Bay, Halmahera Tengah yang memiliki tambang nikel.

Sedangkan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, untuk lokasi Wade Bay itu, pemerintah mendorong pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) terutama di sisi kelistrikan. Pemerintah akan membangun pembangkit EBT di Wade Bay, Halmahera Tengah, untuk menyokong kegiatan industrialisasi di daerah setempat.

Ia mengatakan pembangkit EBT yang akan dibangun yakni Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atau solar panel. Pembangkit EBT ini berkapasitas 2.000 megawatt (MW). "Kita mulai beralih dari

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) ke EBT. Kita akan pasang solar panel, kita butuh 2.000 MW dan kita butuh lahan 2000 hektare," kata Luhut, Rabu, 24 Maret 2021.

Tapi, soal smelternya sendiri, Direktur Center for Indonesian Resources Strategic Studies (Cirrus) Budi Santoso mengatakan konsep hilirisasi antara lain dengan kewajiban membangun smelter sebagai pengolah mineral logam bahan baku, telah cacat sejak pemerintah mencanangkannya pada 2009 atau ketika UU Minerba lama disahkan. Alasannya, hilirisasi itu memerlukan biaya mahal dan teknologi yang rumit.

Pembangunan smelter memang menjadi salah satu syarat bagi perusahaan untuk mendapatkan rekomendasi ekspor mineral. Progres pembangunan harus mencapai 90 persen dari rencana per 6 bulan. Jika tidak mencapai 90 persen dari target periode tersebut, rekomendasi eksportnya akan dicabut dan ada sanksi finansial berupa denda sebesar 20 persen dari nilai penjualan kumulatif.

"Tujuan hilirisasi adalah supaya tambang mineral memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Bukan hanya sekadar pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP)," ungkapnya. Menurut dia, pemerintah perlu membuat koreksi

mendasar. Bukan hanya relaksasi yang terkesan menjamu tambang-tambang asing semata.

Budi melihat, perusahaan nasional juga perlu penguatan. Perbaikannya terutama dalam hal perizinan lintas departemen, lalu masalah modal dan teknis. "Jangan sampai pengusaha domestik yang tidak berpengalaman dipaksa mengikuti standard internasional," sambungnya.

Sedangkan di mata Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan, pemberian izin ekspor mineral logam yang masih bahan baku itu memang dilematis. "Memang, buat saya, ini seperti pemerintah menjilat ludah sendiri karena kembali memberikan relaksasi bagi pengusaha terkait dengan hilirisasi mineral," ungkapnya.

Alasannya, pemerintah selalu menegaskan hilirisasi adalah utama. Kewajiban nilai tambah bagi sumber daya alam harus pelaku usaha laksanakan. Ekspor produk mineral mentah, seperti bijih nikel, pun dilarang sejak 1 Januari 2020.

Mamit mengatakan, relaksasi ini seharusnya tidak berlangsung lama. Pembangunan smelter akan semakin tertunda apabila pemerintah terus mengizinkan ekspor mineral logam. "Pihak yang untung saya rasa perusahaan yang memang selama ini lambat dalam membangun smelter," ujarnya.

Relaksasi hanya menjadi buying time (mengulur waktu) bagi kalangan pengusaha. Dengan membaiknya ekonomi dan penanganan Covid-19, harapannya, pemerintah dapat lebih tegas kepada para perusahaan tersebut. "Karena ini amanat UU Minerba," kata Mamit.

Sejauh ini total realisasi fasilitas pemurnian mineral hingga 2020 sebanyak 19 smelter di tahapan yang berbeda-beda. Pada 2021 ditargetkan mencapai 23 smelter, 2022 sebanyak 28 smelter, hingga 2024 pemerintah menargetkan 53 smelter. Semoga saja pelaku bisnis dan regulator dapat duduk bersama menemukan jalan terbaik. ●



MENEGAKKAN BATANG JADI KAWASAN INDUSTRI

Bukan membangkitkan batang terendam, tapi mirip belaka.

Kawasan Industri Terpadu (KIT) di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menjadi upaya penting pemerintah untuk memulihkan ekonomi di masa dan pasca pandemi Covid-19.

Belum setahun, Presiden Joko Widodo sudah dua kali mengunjungi proyek pembangunan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah. Menyimak penjelasan Presiden Joko Widodo ketika berkunjung ke KIT Batang kali ini, yang sudah tertangani hampir 450 hektare dari total rencana pengembangan hingga 4.300 ha.

Yang 450 ha itu siap untuk menerima investasi bidang teknologi. "Nanti Mei akan ada groundbreaking, peletakan batu pertama untuk industri kaca,

mungkin akan menjadi industri kaca terbesar di Asia Tenggara. Setelah itu juga ada lagi industri prekursor, katoda, yang akan juga mulai dibangun di bulan Juni, atau Juli, insyaallah, dan seterusnya," kata Presiden Jokowi dalam kunjungan yang berlangsung pada Rabu, 21 April 2021.

Selanjutnya Presiden berharap KTI Batang dapat segera berkembang dan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya. serta membuka peluang seluas-luasnya. "Sehingga juga ada arus modal masuk atau capital in-



flow pada negara kita untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional kita,” ujarnya.

Harap maklum, KTI Batang semula menjadi harapan relokasi ketika lebih dari 100 perusahaan asing meninggalkan China. Namun, harapan itu belum terealisasi, antara lain terkendala oleh pandemi global Covid-19 yang masih berlangsung. Maka upaya banting setir mengandalkan sumber daya di dalam negeri menjadi pilihan.

Jadi, dalam kunjungan pendahuluan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia berpesan agar proyek pembangunan infrastruktur Kawasan Industri Terpadu Kabupaten Batang, Jawa Tengah, melibatkan pengusaha lokal untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi setempat.

“Saya berpesan kalau ada sub kontraktor lokal dan khususnya dari Kabu-

paten Batang, jangan ambil dari luar daerah karena hal itu menjadi komitmen dalam hal membangun perekonomian dan bertujuan menjadikan daerah ini sebagai pusat perputaran ekonomi,” katanya saat berkunjung ke KIT Batang, Sabtu, 20 Oktober 2020 lalu.

Kala itu Bahlil mengungkapkan progres pembangunan infrastruktur KIT Batang, masih kurang maksimal. “Oleh sebab itu kami datang ke KIT Batang untuk melakukan koordinasi supaya pembangunan infrastruktur guna mempercepat peningkatan perekonomian berjalan optimal,” katanya.

Menurut dia, sebenarnya KIT Batang sudah menjadi incaran investor, bahkan sudah ada beberapa investor melirik KIT untuk menanamkan modalnya di daerah itu. “Percepatan pembangunannya harus cepat dilakukan karena sudah ada empat investor yang melirik KIT Batang,” katanya.

Bahlil menyebutkan sejumlah investor yang sudah berkoordinasi dengan BKPM tersebut antara lain dari Korea Selatan, China, dan pengusaha dalam negeri yang bergerak di bidang nikel. Pada tahap awal, kata dia, KIT Batang akan menjadi tempat untuk industri hilirisasi nikel menjadi baterai, kemudian industri kaca yang berorientasi ke ekspor dengan 80 persen produknya akan dikirim ke luar negeri.

Ia mengatakan KIT Batang akan menjadi pusat ekosistem bisnis kecil hingga tingkat industri besar. “Karena itu, KIT Batang akan dibangun ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Jadi KIT Batang, nantinya akan menjadi penghubung industri kecil hingga besar,” katanya.

Soal percepatan itu sudah menjadi amanat dengan keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79/2019 terkait percepatan pembangunan ka-

wasan ekonomi di sejumlah kota dan kabupaten Jawa Tengah serta Perpres Nomor 109/2020 terkait percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Sebagai operator di KIT Batang, sudah terbentuk pula PT Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) yang merupakan konsorsium tiga Badan Usaha Milik Negara dan satu perusahaan daerah Kabupaten Batang. PT Pembangunan Perumahan (PP) memiliki saham 35 persen, Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW) sebesar 30 persen, PTPN IX

2020, percepatan menjadi prioritas.

"Untuk menarik investor menanamkan investasinya, paling tidak ada tiga komponen yang harus diperhatikan. Pertama, harga lahan yang murah atau kompetitif. Kedua, perizinan yang cepat, murah mudah dan pasti. Ketiga, pelayanan yang prima," ungkap Rachmadi.

Ia mengatakan, secara maraton rapat koordinasi dilakukan setiap minggu baik tiga pilar utama, PTPN IX, PT PP dan PT KIW, ditambah stakeholder

PT KAI sebagai operator merevitalisasi jalur kereta api dengan fokus stasiun Plabuan adalah stasiun kereta api kelas III yang terletak di Ketanggan, Gringsing, Batang. Tidak hanya merevitalisasi stasiun Plabuan, termasuk mempersiapkan dryport,

Kemenhub juga menugaskan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan PT Pelindo untuk merevitalisasi pelabuhan tua Batang. "Ini sejalan dengan gagasan Menteri Erick Thohir menarik investasi Jepang dan AS, bakal menyulap pelabuhan peninggalan Belanda terkoneksi dengan kawasan industri Batang," tandas Rachmadi.

Hingga akhir 2020, progres pembangunan Kawasan Industri Terpadu di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, pada lahan seluas 450 ha sudah mencapai 51 persen. Diharapkan pada 2021 kawasan ini sudah dapat digunakan oleh para investor.

"Progres pembangunan KITB di lahan 450 hektare sudah 51 persen, sedangkan untuk perizinan ditargetkan rampung Januari 2021," kata Direktur Utama PT Kawasan Industri Terpadu Batang Galih Saksono di Kabupaten Semarang, Rabu, 23 Desember 2020.

Ia menjelaskan, percepatan pengembangan KIT Batang sudah on the track. Pihaknya optimistis pekerjaan di lapangan maupun administrasi yang dilakukan dapat segera mengakomodasi kebutuhan para investor.

"Harapannya semua berjalan sesuai target yang ditentukan oleh pemerintah sehingga secepatnya menyerap tenaga kerja dan meningkatkan perekonomian di Indonesia secara optimal," ujarnya usai menggelar rapat umum pemegang saham (RUPS) perdana secara daring di Kampoeng Kopi Banaran Bawen Kabupaten Semarang.

Terlebih KIT Batang masuk dalam daftar proyek strategis nasional yang tercantum dalam Peraturan Presiden Indonesia Nomor 109 tanggal 17 November 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Pembangunan KIT Batang berkonsep smart and sustainable industrial estate untuk merespons revolusi industri 4.0 di Indonesia maupun global.



dengan 25 persen, dan Perusda Aneka Usaha milik Kabupaten Batang yang memegang 10 persen saham.

Salah satu strategi konsorsium ini dikemukakan oleh Direktur Utama PT KIW, Rachmadi Nugroho. Mantan direktur utama PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) ini menegaskan, setelah kunjungan Presiden Jokowi di lahan calon KIT Batang pada akhir Juni

yang lain sebagai supporting. "Seluruhnya berbagi tugas. Kemen PUPR dan Bina Marga berencana membuka exit tol dengan harapan bisa langsung akses ke kawasan industri. Adapun exit tol yang ada tersedia berjarak 16 kilometer menuju kawasan industri," jelasnya.

Gerak cepat juga dilakukan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebagai regulator untuk menugaskan

"Pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur KIT Batang pada akhir tahun seperti pengadaan air baku dan air bersih, jaringan listrik, jalur sistem telekomunikasi, jaringan gas, dan sebagainya," katanya.

Nah, dalam kunjungan pada 21 April 2021, Presiden Jokowi menegaskan akan mengecek secara rutin kawasan industri di Batang ini. "Inilah yang akan kita jadikan contoh untuk nanti kawasan-kawasan industri yang lain, yang berada di provinsi-provinsi, baik di Jawa maupun di luar Jawa," ungkapnya.

Tampak mendampingi Presiden dalam kunjungan kali ini antara lain Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dalam kesempatan itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan, dalam mendukung percepatan pengembangan KIT Batang, kementeriannya telah memulai pembangunan secara terpadu infrastruktur dasar seperti konektivitas, air baku dan air minum, pengelolaan sampah dan sanitasi serta penyediaan perumahan melalui sebuah rencana induk pembangunan infrastruktur.

Senada dengan semangat mengandalkan sumber daya lokal, Menteri Basuki mengatakan dalam proses pembangunan infrastruktur KIT Batang diharapkan semaksimal mungkin memanfaatkan tenaga kerja setempat dan produk dalam negeri. "Pembangunan infrastruktur yang menggunakan dana APBN harus menggunakan produk dalam negeri, atau kalau pun produk dari luar, harus punya pabrik di sini," tegas Menteri Basuki.

Infrastruktur yang dibangun antara lain simpang susun akses menuju KIT Batang yang terhubung dengan Jalan Tol Batang-Semarang. Selain itu, akses jalan KIT Batang sepanjang 3,1 km dengan anggaran Rp450 miliar, progresnya saat ini 49 persen. Kemudian pembangunan jalan kawasan 1A sepanjang empat km dan Jembatan Kali Mata Air sepanjang 120 meter dengan biaya Rp185 miliar. Kontraktor pelaksana proyek PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dengan progres fisik 45 persen.

Dukungan konektivitas juga tak ketinggalan dengan membangun jalan kawasan Ruas 1B sepanjang 3,6 km dan Jembatan Kali Kembar sepanjang 80 meter. Infrastruktur ini dibangun dengan biaya APBN sebesar Rp163 miliar dengan kontraktor PT PP-MO (KSO) sesuai kontrak pekerjaan Desember 2020-Juni 2021.

Di bidang Sumber Daya Air, Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana Ditjen SDA menyiapkan pembangunan Bend-

PUPR juga menyiapkan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu berkapasitas 35 ton per hari, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berkapasitas 285 liter per detik, dan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) berkapasitas 18.000 m³ per hari.

Kemudian Kementerian PUPR membangun 10 tower Rumah Susun (Rusun) bagi pekerja di kawasan KIT Batang setinggi lima lantai dengan luas 5.735 m² dengan kapasitas 257 orang per tower. Kehadiran Rusun yang lokas-



ung Sungai Urang seluas 29,32 m³ dan Bendung Kedung Langgar seluas 142 hektar untuk memenuhi kebutuhan air baku serta penanganan drainase di empat titik, yakni Mata Air sepanjang 400 meter, Brontok 770 meter, Pelabuhan 861 meter, dan Pesanggrahan 100 meter. Progres fisik pembangunan drainase sudah mencapai delapan persen.

Di lokasi KIT Batang, Kementerian

inya dekat dengan tempat kerja diharapkan dapat memberikan nilai efisiensi tinggi bagi para pekerja.

Jadi, seperti kata Presiden Jokowi, kita nantikan groundbreaking atau peletakan batu pertama KIT Batang. Mirip belaka dengan peribahasa membangkitkan Batang. Bukan batang terendam, melainkan Batang menjadi kawasan industri. •



TARGET TAHUN PERTAMA KEPALA DAERAH

Banyak hal menjadi arahan Presiden Joko Widodo kepada para peserta Rapat Koordinasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak Tahun 2020. Namun, yang pertama kali menjadi penekanan adalah orientasi sasaran dan hasil perencanaan kerja.

Malah terkesan Presiden Joko Widodo menyentil kepala daerah yang gemar membaca laporan namun jarang ke lapangan. Padahal, kata Presiden Jokowi, laporan tersebut seharusnya ditindaklanjuti kebenarannya dengan pengecekan di lapangan.

Menurut Jokowi, jabatan yang diberikan kepada para kepala daerah adalah kehormatan, tetapi sekaligus juga sebuah tanggung jawab yang

besar dan berat. "Oleh sebab itu, jangan sampai Saudara-saudara ini hanya mengikuti prosedur. Harus goal oriented. Harus result oriented. Orientasinya adalah hasil. Harus berani berinovasi, bukan sekedar mengikuti rutinitas, hati-hati ini," ungkap Presiden di Istana Negara Jakarta, dalam acara yang berlangsung secara virtual, Rabu, 14 April 2021.

Karena itu, Kepala Negara meminta agar para kepala daerah jangan hanya

puas membaca laporan saja dalam bekerja, melainkan harus langsung melakukan pengecekan dan kontrol di lapangan. Inovasi, kecepatan, ketepatan kebijakan adalah hal yang sangat diperlukan saat ini sehingga para kepala daerah perlu bekerja dengan menggunakan skala prioritas.

"Bapak, ibu, dan saudara sekalian harus membuat kebijakan yang fokus dengan skala prioritas yang jelas sehingga nanti alokasi anggarannya



juga lebih fokus dan terkonsentrasi. Saya melihat satu provinsi ada yang mata anggaran kegiatannya sampai 40 ribu. Menurut saya, semakin sedikit kegiatan secara manajemen akan semakin gampang mengontrol dan mengeceknya dan hasilnya akan kelihatan," paparnya.

Terkait dengan anggaran, Presiden pun berpesan agar para kepala daerah cukup membuat beberapa kegiatan besar dengan anggaran yang terkonsentrasi ke kegiatan tersebut dibandingkan dengan dibagi ke banyak kegiatan kecil. Dengan demikian, hasilnya akan bisa dilihat dan dirasakan oleh masyarakat.

"Sebagai contoh, ada anggaran di sebuah kabupaten Rp2 triliun misalnya. Hati-hati, saya titip yang namanya belanja aparatur, belanja pembangunan, belanja modal dilihat lebih besar yang mana. Usahakan agar belanja pembangunan, belanja modal itu lebih besar dari belanja aparatur. Kalau

sudah ketemu belanja pembangunan belanja modal, jangan sampai yang namanya anggaran itu dibagi rata ke masing-masing unit atau dinas. Hati-hati," jelasnya.

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Saat ini pemerintah masih berfokus pada upaya percepatan pemulihan kesehatan dan ekonomi. Keduanya berjalan beriringan dengan menjaga keseimbangan penanganan antara keduanya. Kepada para peserta Rapat Koordinasi Kepala Daerah Tahun 2021 Presiden Jokowi juga meminta para kepala daerah untuk mampu mengelola keduanya dengan baik dan seimbang.

"Gas dan remnya harus dilakukan secara tepat karena yang namanya Covid-19 ini barangnya tidak kelihatan.

Jangan sampai terlalu mendahulukan ekonomi kemudian tidak memperhatikan penyebaran Covid-19, yang terjadi kenaikan kasus meningkat, pertumbuhan ekonominya justru tertekan turun," ujarnya dari Istana Negara, Jakarta.

Oleh sebab itu, pencegahan penyebaran pandemi harus menjadi prioritas. Sementara penanganan pasien yang terpapar Covid-19 juga harus dilakukan secara konsisten. Kepala Negara juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak tergesa untuk membuka sektor-sektor yang ada di daerahnya. Sebaliknya, lakukan pembukaan sektor secara bertahap dan sangat berhati-hati agar tidak terjadi lonjakan kasus baru di kemudian waktu.

"Bulan Januari yang lalu misalnya, saya enggak usah sebut negaranya, turun anjlok (kasus penyebaran). Begitu dibuka (sektor ekonomi), bulan Maret lompatannya naik tinggi sekali. Hati-hati dengan itu. Jangan sampai karena kasusnya sudah turun kemu-

dian tergesa-gesa untuk membuka sektor-sektor yang ada,” kata Presiden.

Di Indonesia sendiri, pada Januari lalu kasus aktif harian sempat menyentuh angka 14 ribu bahkan mencapai 15 ribu. Namun, beberapa waktu belakangan, angka kasus harian relatif terkendali di angka 4 ribu hingga 6 ribu berkat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro yang disertai dengan kebijakan vaksinasi massal.

Presiden juga meminta daerah untuk menerapkan kebijakan PPKM berskala

membantu masyarakat di lapisan bawah yang terdampak pandemi. Salah satu caranya, memperbanyak program-program padat karya yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan di daerah.

“Saya minta agar APBD ini bisa memberikan pekerjaan kepada masyarakat di lapis bawah. Dengan cara perbanyak program-program padat karya untuk penciptaan lapangan pekerjaan sambil menunggu ekonomi kembali pulih sepenuhnya,” ujarnya.

Pemerintah daerah juga harus bersegera mengeksekusi bantuan sosial

penuh demi membuka seluas-luasnya kesempatan kerja bagi masyarakat.

“Daerah baik provinsi, kabupaten, maupun kota jangan memperlambat yang namanya izin investasi karena investasi menciptakan lapangan pekerjaan,” tuturnya.

Investasi yang masuk ke suatu daerah pada gilirannya juga akan menggerakkan perekonomian daerah tersebut. Ketidaksiapan untuk melayani perizinan investasi berarti akan turut memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah yang juga akan memperlambat



mikro untuk mencegah penyebaran virus korona meluas di wilayahnya.

“Isolasi lingkungan terkecil sebelum kasus itu menyebar lebih luas lagi. Jadi jangan sampai kita itu me-lockdown kota atau kabupaten. Kalau di satu kabupaten kasusnya hanya terjadi di satu atau dua desa, ya desa itu yang diisolasi sehingga tidak menyebar lebih luas,” ucapnya.

Selain itu, Kepala Negara juga meminta dukungan penuh terhadap program vaksinasi massal yang dijalankan di seluruh wilayah Indonesia. Dengan PPKM berskala mikro, kebijakan vaksinasi massal, dan penegakan protokol kesehatan yang baik maka pemulihan kesehatan dapat dilakukan dengan segera.

Selanjutnya Presiden Joko Widodo menyerukan agar para kepala daerah memanfaatkan APBD mereka untuk

yang sangat dibutuhkan warganya. Pemerintah pusat sendiri telah mengalokasikan bantuan sosial yang juga diberikan kepada masyarakat di daerah. Namun, apabila terdapat sejumlah titik di daerah yang masih belum tersentuh bantuan tersebut, maka pemerintah setempat dapat langsung bergerak cepat untuk turut memberikan bantuan sosial.

“Bantu juga usaha mikro, kecil, dan menengah baik itu permodalan, produksi, maupun pemasarannya. Karena ini akan menggerakkan ekonomi daerah,” imbuhnya.

Tak kalah penting, Presiden Joko Widodo kembali menekankan soal investasi di daerah yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Saat ini Indonesia telah memiliki Undang-Undang Cipta Kerja yang implementasi pelaksanaannya harus didukung

pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, investasi juga akan memberikan pemasukan kepada negara dan daerah. Dari aktivitas investasi itu lah negara maupun daerah dapat menarik pajak dan retribusi.

“Sebanyak 76 persen pendapatan negara itu diperoleh dari pajak. Besar sekali. Kalau ada investasi baru mendirikan perusahaan, pabrik, atau industri artinya ada yang kita pungut pajaknya. Ada tambahan lagi,” kata Presiden.

Oleh sebab itu, Presiden kembali mengingatkan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dan dukungan penuh bagi dunia usaha yang hendak melakukan investasi. Apabila hal demikian dapat dilakukan, maka pemulihan ekonomi daerah dan nasional diyakini akan dapat dengan mudah dilakukan. ●

MASIH 85 PASANGAN MENUNGGU PELANTIKAN

Kementerian teknis yang menyelenggarakan Rakor Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020 pada Rabu, 14 April 2021 tentulah Kementerian Dalam Negeri. Nah, sebelum Presiden mengemukakan arahan dalam acara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan laporan kepada Presiden.

Mendagri Tito menjelaskan, sampai acara Rakor berlangsung, tercatat 185 pasangan kepala daerah hasil Pilkada 2020 yang telah dilantik. Sedangkan Pilkada 2020 mencakup 270 wilayah pemerintahan mulai dari kabupaten, kota, hingga provinsi.

Dari 185 yang telah dilantik, antara lain lima pasangan gubernur dan wakil gubernur, 152 pasangan bupati dan wakilnya, dan 28 pasangan wali kota dan wakilnya. "Semua, 185 pasangan Kepala Daerah yang telah dilantik, hadir secara virtual pada rapat koordinasi ini untuk mendapat arahan dan petunjuk dari Bapak Presiden," kata

Mendagri Tito.

Lebih jauh lagi, Tito menjelaskan, dari total 185 pasangan tersebut, 114 orang antaranya merupakan pejabat petahana atau pernah menduduki kursi kepala daerah atau wakil kepala daerah. Sedangkan sisanya, sebanyak 255 orang merupakan kepala daerah atau wakil kepala daerah yang baru kali pertama menjabat.

Mendagri menambahkan, jumlah pasangan kepala daerah yang belum dilantik sebanyak 85 pasangan. Jumlah itu terdiri dari empat pasangan gubernur, 72 pasangan bupati, dan sembilan pasangan wali kota. Tito mengatakan, pasangan yang belum dilantik direncanakan bakal dilantik secara serentak pada akhir April 2021 dan Juli 2021.

Mendagri juga menjelaskan, penyebab pasangan kepala daerah yang belum dilantik antara lain akibat hasil Pilkada 2020 berlanjut di Mahkamah Konstitusi (MK) karena terjadi perselisihan hasil penghitungan suara. Sebagian sudah diputus, namun sebagian

lagi berlanjut ke pemilihan suara ulang.

Berdasarkan keputusan MK, masih ada 14 daerah yang melaksanakan pemilihan suara ulang. Selain perkara di MK, penundaan pelantikan kepala daerah juga disebabkan oleh masa jabatan kepala daerah yang lama belum rampung.

Selain arahan dan pembekalan dari Presiden Joko Widodo, sejumlah pejabat negara juga turut memberi pengarahan, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Kegiatan ini ditutup oleh Mendagri, dengan mengangkat tema utama kegiatan adalah Stabilitas Politik dan Keamanan, Pemulihan Ekonomi, serta Penanganan Covid-19. Termasuk di dalamnya adalah efektivitas fiskal (anggaran), upaya peningkatan investasi, dan lapangan kerja padat karya di daerah. ●





HIKMAH KEHILANGAN KRI NANGGALA BESERTA AWAKNYA

Duka cita mendalam atas kehilangan idealnya memicu upaya mitigasi agar pengalaman pahit tak berulang. Kehilangan kapal selam KRI Nanggala beserta 53 awaknya juga.

Semula hilang kontak dan masih banyak yang berharap KRI Nanggala beserta 53 awaknya selamat. Namun, sejumlah temuan serpihan dan benda yang berada di kapal selam itu di permukaan laut menjadi bukti bahwa kapal itu tenggelam.

Mengenai temuan itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Yudo Margono mengungkapkan, kepingan dan bagian atau komponen kapal selam tidak akan terangkat ke luar kapal apabila tidak ada tekanan dari luar atau terjadi keretakan di peluncur torpedo. Kondisi ini terjadi mengingat lokasi terakhir kapal berada di kedalaman 850 meter.

"Dengan demikian, adanya bukti-bukti otentik diyakini milik KRI Nanggala sehingga saat ini kita isyarakatkan sub-miss kita tingkatkan menuju fase sub-sunk. Fase sub-sunk kita siapkan untuk evakuasi ABK," ujar KSAL dalam keterangan kepada media, Sabtu, 24 April 2021.

Sub-miss adalah istilah teknis yang bermakna status kapal selam dipastikan hilang. Namun, masih ada harapan selamat karena belum ada tanda-tanda tenggelam. Sebelum tahap sub-miss, dikenal pula istilah sub-look, hilang dari pengamatan setelah kapal-kapal lainnya mencoba mengontak namun tanpa jawaban.

Pada tahap sub-miss, pemilik kapal

selam akan menyatakan status tersebut dan melapor ke Ismerlo (International Submarine Escape and Rescue Liaison Office), lembaga di bawah kendali Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) yang siap membantu mengkoordinasikan bantuan pencarian dan penyelamatan kapal selam bermasalah.

Demikianlah, saat KRI Nanggala dalam status sub-miss, Ismerlo mengirim pesan darurat ke seluruh dunia. Negara-negara NATO dan ASEAN langsung mengirim bantuan ke kawasan laut tempat kapal selam terpan-tau terakhir kalinya. Tercatat antara lain, Singapura mengirim kapal penyelamat kapal selam (Submarine Rescue Ves-



sel) MV Swift Rescue dan Malaysia yang mengirim MV Mega Bakti.

Tercatat pula India mengirimkan Submarine Rescue Vessel (SRV) SCI Sabarmati. Sedangkan Australia mengirimkan Fregate HMAS Ballarat & Tanker HMAS Sirius. Sedangkan Amerika Serikat mengirimkan satu unit pesawat pemburu kapal selam Boeing P-8 Poseidon.

Pesawat P-8 Poseidon milik Angkatan Laut Amerika Serikat mendarat di Bandara Ngurah Rai, Bali, pada Sabtu, 24 April 2021 pukul 03.00 WITA. Dalam keterangan kepada media, juru bicara Departemen Pertahanan AS, John F Kirby, mengatakan pengiriman pesawat P-8 adalah "untuk membantu pencarian kapal selam Indonesia yang hilang".

"Indonesia adalah sahabat yang baik dan mitra strategis, Kami semua sangat bersedih melihat laporan mengenai kapal selam mereka. Simpati dan doa kami untuk para pelaut Indonesia, Angkatan Laut Indonesia, dan tentu semua keluarga mereka," kata Kirby.

Kirby mengatakan bahwa Pesawat P-8 Poseidon adalah pesawat patroli

maritim yang didesain secara khusus untuk mencari beragam hal, khususnya kapal selam. "Alat yang canggih ini dapat membantu menuntun pemerintah Indonesia untuk mendapatkan kemungkinan lokasi (pencarian) yang lebih baik," ujarnya.

Total tercatat 20 kapal dan lima pesawat dikerahkan untuk mencari kapal selam berawak 53 orang itu pada Sabtu, 24 April 2021 pagi. Alhasil, dari berbagai upaya itu, temuan awalnya

adalah serpihan benda yang berada di KRI Nanggala. Barang-barang yang ditemukan antara lain, botol oranye berisi grease pelumasan naik-turunnya periskop kapal selam. Kemudian alas yang biasanya dipakai ABK untuk salat.

Menurut Laksamana Yudo Margono, barang-barang tersebut diyakini bagian dari KRI Nanggala berdasarkan kesaksian mantan ABK Nanggala dan komunitas kapal selam. Ia menambahkan, tim pencarian yang mencakup



pesawat dan kapal sejumlah negara mendeteksi KRI Nanggala pada kedalaman 850 meter.

"Ini sangat riskan dan memiliki kesulitan tinggi. Dengan kesulitan ini kita tetap jalankan untuk melaksanakan prosedur pengangkatan maupun evakuasi berikutnya," kata KSAL.

Sebelumnya, Laksamana Yudo mengungkapkan, KRI Nanggala 402 memiliki persediaan oksigen untuk 72 jam, atau sekitar tiga hari setelah hilang

Korea Selatan dan selesai pada 2012, KSAL mengungkapkan bahwa KRI Nanggala 402 sebelum hilang kontak tengah mengikuti latihan penembakan rudal dan torpedo.

Latihan yang digelar TNI AL itu diikuti 21 kapal KRI, lima pesawat dan dua kapal selam, termasuk KRI Nanggala 402. Namun, sejak hilangnya kapal selam dengan 53 awak itu, latihan dihentikan dan kini semuanya terfokus pada pencarian.



kontak pada Rabu, 21 April 2021 pukul 03.00 WITA. Dengan begitu, cadangan oksigen di kapal tersebut diperkirakan hanya mampu bertahan hingga Sabtu, 24 April 2021 dini hari.

Kapal selam KRI Nanggala 402 adalah satu dari lima kapal selam milik Indonesia. Sempat diperbarui dan dilengkapi lagi selama dua tahun di

Sambil menunggu perkembangan lebih lanjut, teknologi kapal selam mutakhir berupaya menciptakan desain, teknologi, juga persenjataan baru untuk kapal selam masa depan. Kapal-kapal selam peninggalan Perang Dingin (masa antara usainya Perang Dunia II hingga runtuhnya Uni Soviet) sedang mengalami regenerasi termasuk kapal

selam konvensional - lebih kecil tetapi masih berguna - dengan modifikasi agar dapat bertahan di bawah air selama berminggu-minggu.

Sejauh ini kapal selam non-nuklir menggunakan mesin pembakaran yang membutuhkan oksigen untuk bekerja. Ini baik-baik saja di permukaan. Tetapi, saat berada di kedalaman laut, kapal selam harus mengandalkan daya baterai untuk beroperasi.

Tergantung pada jenis baterainya, kapal selam tidak dapat berada di kedalaman hingga waktu lama dan perlu muncul kembali untuk mengisi ulang baterainya. Ini membuatnya rentan dan terbuka untuk terdeteksi, oleh musuh tentunya.

Maka, muncul inovasi berupa Air Independent Propulsion (AIP), teknologi yang memecahkan masalah itu dan memungkinkan kapal selam tetap berada di kedalaman dan relatif aman untuk waktu yang lama - berminggu-minggu, bukan berhari-hari.

Pertama kali ditemukan di Swedia pada 1990-an, AIP sekarang digunakan di sebagian besar kapal selam non-nuklir oleh 20 angkatan laut. Inovasi AIP adalah terobosan bagi keterbatasan penggunaan kapal selam bertenaga nuklir yang hanya beberapa negara saja mampu memilikinya.

Sebagai perbandingan, kapal selam bertenaga nuklir. Sangat mahal untuk diproduksi, reaktor kapal selam ini memungkinkannya untuk tetap melenggang di bawah permukaan hampir tanpa batas waktu. Kapal selam nuklir dapat mendesalinasi (membuat tawar) air laut sehingga dapat diminum awaknya, juga menghasilkan oksigen dari air laut untuk dihirup oleh para awak.

Jangkauan mereka hampir tidak terbatas, memungkinkan mereka melakukan perjalanan ke mana saja di lautan dunia, sarat dengan muatan rudal nuklir yang sangat berbahaya. Mereka tetap tersembunyi, jaminan bahwa jika musuh menyerang negara asalnya dalam serangan mendadak, kapal selam itu akan mampu memberikan serangan balasan, serangan nuklir kedua.

Dengan pemikiran tersebut, kapal selam serang juga berkeliaran di lautan, bertindak sebagai garis perta-

hanan. Cepat dan ramping, mereka dirancang untuk menenggelamkan kapal selam lain, terutama pembawa rudal musuh yang bernilai tinggi. Permainan kucing dan tikus tanpa ujung dan mematikan ini dimainkan setiap hari di bawah permukaan lautan dunia saat masing-masing pihak mengasah keterampilan yang dibutuhkan untuk menghancurkan yang lain jika terjadi perang.

Kapal selam memiliki fitur unik yang membuatnya mematikan, yang utama adalah kemampuan silumannya yang tak terdeteksi. Mampu melakukan perjalanan di bawah air tanpa terdeteksi, mereka dapat menyerang tanpa

bung ini terbuat dari bahan yang dirancang untuk menyerap gelombang sonar - versi sonik dari radar bawah air - daripada memantulkannya kembali, membuatnya lebih mudah dideteksi.

Kemajuan teknologi seperti itu memungkinkan kapal selam tetap tidak terdeteksi tetapi perkembangan konstan dalam teknologi anti-kapal selam mengimbangi - dengan cara baru yang lebih baik untuk mendeteksi kapal selam, membuatnya rentan terhadap kehancuran.

Namun, untuk kapal selam pada umumnya, masa depan terlihat semakin otomatis. Kapal selam akan dapat berbuat lebih banyak dengan awak

curkan target mereka tanpa ada yang mendeteksi keberadaan mereka.

Dengan senjata yang disempurnakan seperti rudal hipersonik yang sedang dikembangkan, kapal selam semakin mematikan melalui regenerasinya. Sementara negara-negara besar bertahan dengan tenaga penggerak nuklir, negara-negara lain berinvestasi pada alternatif yang lebih murah namun berkemampuan tinggi.

Kemajuan baru dalam sel bahan bakar berarti bahwa kapal selam non-nuklir baru ini dapat bertahan di bawah air selama berminggu-minggu jika tidak berbulan-bulan. Perkembangan teknologi dan desain sensor memung-



peringatan, yang paling kuat di antara mereka mengandung persenjataan rudal yang dapat menghancurkan benda hanya dengan sekali meluncurkan senjata mematkannya.

Semakin minim suaranya, semakin siluman kapal selam itu. Suara adalah segalanya di bawah laut dan miliaran dolar telah diinvestasikan ke dalam properti akustik yang akan meredam mesin kapal selam, serta dalam desain lambung yang lebih baik yang memungkinkan air mengalir lebih tenang di atas permukaan kapal selam. Lam-

yang lebih kecil atau, dalam banyak kasus, tidak ada awak sama sekali. Misalnya, drone laut milik asing yang juga sudah pernah ditemukan bergerak di bawah permukaan laut wilayah Indonesia.

Seiring berkembangnya teknologi pendeteksian, kemampuan tersembunyi dari kapal selam sebagai angkatan laut yang berlawanan akan mencoba mengecoh satu sama lain. Pembunuh diam-diam ini dapat mengawasi dan melaporkan aktivitas musuh dan, dalam beberapa kasus, menghancu-

kinkan mereka untuk bekerja dengan kru yang jauh lebih kecil sambil tetap meningkatkan jangkauan misi yang dapat mereka lakukan. Singkatnya, kapal selam akan tetap perlu dan persaingan hingga pertempuran di bawah permukaan laut akan memasuki fase baru dan penting.

Pada kondisi ini, duka cita mendalam idealnya menjadi pemicu untuk mencegah pengalaman pahit kehilangan KRI Nanggala 402. Semoga pengorbanan jiwa dan raga dan kepahlawanan segenap awaknya tidak sia-sia. •



TETAP OLIMPIADE MESKI MASIH PANDEMI

Setelah mundur dari jadwal yang seharusnya berlangsung 2020, Olimpiade Tokyo 2021 akan berlangsung tanpa penonton dari luar Jepang. Semuanya memang dampak pandemi global Covid-19.

Toh persiapan terus berlangsung. Malah Presiden Olimpiade Tokyo 2020 Seiko Hashimoto mengatakan bahwa pembatalan pertandingan yang dijadwalkan dibuka dalam tiga bulan ke depan tak pernah menjadi pertimbangan, bahkan ketika ibu kota Jepang berjuang dengan kebangkitan infeksi virus corona.

"Kami melakukan upaya terbaik kami untuk mempersiapkan pen-

anggulan virus corona sehingga (publik) dapat memahami bahwa Olimpiade Tokyo dapat diadakan," kata Seiko Hashimoto kepada media, Jumat, 23 April 2021 sebelum pemerintah mengumumkan keadaan darurat COVID-19 untuk Tokyo, seperti serta prefektur barat Osaka, Kyoto dan Hyogo.

Sementara hitungan tiga bulan hingga pembukaan Olimpiade terus berjalan, ada banyak pertanyaan

yang belum terjawab, termasuk apakah penonton diperbolehkan berada di tempat pertandingan sama sekali. Sebelumnya, panitia sudah memutuskan melarang para penonton dari luar Jepang masuk arena pertandingan.

Jajak pendapat media terus menerus menunjukkan bahwa kebanyakan orang di seluruh Jepang tidak mendukung penyelenggaraan pertandingan musim panas ini. Seiring dengan tanggapan masyarakat



Jepang, pemerintah dan panitia penyelenggara berupaya meyakinkan publik bahwa Olimpiade masih mungkin berlangsung.

Dalam upaya untuk memastikan bahwa langkah efektif melawan virus akan diambil selama pertandingan, panitia telah memutuskan untuk membentuk panel ahli kesehatan, dengan pertemuan pertama akan diadakan Jumat depan, kata sumber yang mengetahui masalah tersebut. Anggota panel diharapkan bertemu sekitar empat kali sebelum upacara pembukaan pada 23 Juli, menurut sumber tersebut.

Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga juga mengulang janjinya bahwa permainan akan "aman dan terjamin." Suga mengumumkan keadaan darurat, yang memerlukan tindakan anti-virus yang lebih ketat seperti melarang restoran dan bar menyajikan alkohol, yang akan mulai berlaku pada Minggu, 25 April hingga 11 Mei 2021, mencakup liburan Minggu Emas yang akan datang.

Gubernur Tokyo Yuriko Koike mengatakan, periode sekitar dua minggu akan sangat penting dalam menahan penyebaran virus menjelang Olimpiade. Sedangkan Presiden Komite Olimpiade Internasional Thomas Bach berencana mengunjungi Jepang pada 17 dan 18 Mei untuk menghadiri upacara kirab estafet obor Olimpiade dan bertemu dengan Suga. Penyelenggara juga akan merilis versi kedua dari "buku panduan" pedoman COVID-19 untuk atlet, yang diharapkan menjamin bahwa atlet diharuskan untuk melakukan tes virus setiap hari.

Sedangkan Hashimoto mengungkapkan bahwa dia akan mengadakan pertemuan minggu depan dengan perwakilan IOC dan tiga penyelenggara lainnya - Komite Paralimpiade Internasional, pemerintah pusat dan metropolitan Tokyo. Salah satu masalah utama yang akan dibahas selama pertemuan online lima pihak adalah

berapa banyak penonton domestik yang diperbolehkan memasuki tempat pertandingan.

Mengenai masalah tersebut, Hashimoto mengatakan ingin memetakan garis besar masalah tersebut pada akhir bulan ini. Namun, dia menyarankan pada hari Rabu bahwa penyelenggara mungkin tidak membuat



keputusan akhir tentang masalah penonton hingga akhir Juni karena kebutuhan untuk memantau situasi infeksi di Jepang dengan cermat.

Kelima badan penyelenggara memutuskan pada Maret lalu untuk mengadakan Olimpiade Tokyo dan Paralimpiade tanpa penonton dari luar negeri sebagai bagian dari upaya untuk mencegah penyebaran virus selama pertandingan. Namun, Hashimoto mengatakan beberapa acara uji coba akan diadakan selama keadaan darurat untuk meninjau pelaksanaan, tetapi panitia mungkin membatalkan beberapa antaranya dalam upaya untuk mencegah penyebaran virus.

Pertandingan atletik di Stadion Nasional pada 9 Mei yang direncanakan

apa pun untuk membuat Olimpiade aman, sehingga mereka bisa mendapatkan kepercayaan dari publik, yang sebelumnya menunjukkan dukungan kuat untuk Olimpiade sebelum pandemi bermula pada tahun lalu.

"Semangat orang-orang ada di sana. Kami ingin mengembalikan perasaan ini, sehingga kami dapat mengubah kekhawatiran mereka menjadi kegembiraan dan harapan untuk Olimpiade Musim Panas," kata Hashimoto, yang berkompetisi di tujuh Olimpiade Musim Panas dan Musim Dingin sebagai atlet sepeda dan skater.

"Ini mengharuskan kami untuk melakukan pekerjaan dengan baik di bidang keselamatan dan keamanan. Jadi kami akan melakukan apapun,"

dan ingin berpartisipasi dalam estafet obor, yang dimulai pada 25 Maret. Olimpiadenya sendiri dijadwalkan pada 23 Juli hingga 8 Agustus, dan Paralimpiade mulai 24 Agustus hingga 5 September.

Di sisi lain, organisasi sepak bola dunia, FIFA, telah mengundi babak fase grup cabang olahraga populer itu untuk persiapan Olimpiade Tokyo 2020. Sebanyak 16 tim mewakili lima benua termasuk tuan rumah Jepang terbagi ke dalam masing-masing empat grup.

Grup A akan menghimpun Jepang, Afrika Selatan, Meksiko, dan Prancis. Sedangkan di Grup B berkumpul Selandia Baru, Korea, Honduras, dan Rumania. Selanjutnya Grup C berisi Mesir, Spanyol, Argentina, dan Australia. Terakhir di Grup D ada Brasil, Jerman, Pantai Gading, dan Arab Saudi.

Salah satu hasil menarik dalam hasil undian ini, antara lain, Brasil akan berjumpa Jerman di Grup D. Brasil adalah juara bertahan medali emas ajang ini, dimana mereka memenangkannya saat menjadi tuan rumah pada Olimpiade 2016 lalu di Rio de Janeiro. Di Grup C Spanyol meraih medali emas 1992 akan berhadapan dengan Argentina, dua kali pemenang medali emas (2004,2008).

Setelah sebelumnya hanya diperuntukan untuk pemain nonprofesional, baru pada tahun 1984 IOC memperbolehkan pemain profesional untuk ambil bagian. Kemudian pada 1992 IOC membatasi batasan usia untuk tim putra yakni U-23 dan tambahan tiga pemain senior.

Pemain bintang seperti Lionel Messi, Samuel Eto'o hingga Neymar pernah tampil di ajang Olimpiade. Jepang sendiri menyiapkan enam stadion untuk menggelar ajang ini, yang akan dimulai 22 Juli hingga partai final pada 7 Agustus 2021 mendatang.

Sementara itu untuk tim wanita tercipta grup maut yang mempertemukan juara empat kali ajang ini, yakni AS dengan Swedia dan juga Australia. Untuk sepak bola perempuan ini Grup E berisi Jepang, Kanada, Britania Raya, dan Chile. Sedangkan Grup F terdiri dari China, Brasil, Zambia, dan Belanda. Selanjutnya Grup G berisi Swedia, AS, Australia, dan Selandia Baru. ●



memiliki sekitar 20.000 penonton, misalnya, akan diadakan secara tertutup. Acara uji coba telah berlangsung sejak 2018 dan dianggap sebagai bagian penting dari persiapan. Tapi tahapan itu terhenti menyusul penundaan Olimpiade Tokyo pada Maret tahun lalu dan baru dilanjutkan pada awal bulan ini.

Sebelumnya, Hashimoto berjanji menghidupkan kembali semangat rakyat Jepang untuk Olimpiade Musim Panas dan "mengubah kekhawatiran mereka menjadi kegembiraan."

Hashimoto, yang bertanggung jawab atas kepanitiaan penyelenggara Olimpiade mengakui rendahnya dukungan masyarakat Jepang melangsungkan Olimpiade selama pandemi Covid-19. Namun ia menegaskan penyelenggara akan melakukan

kata dia.

Pernyataan Hashimoto kontras dengan pendahulunya, Yoshiro Mori, yang mengatakan Jepang akan mengadakan Olimpiade Musim Panas ini terlepas dari situasi pandemi. Pernyataan Mori membuat marah banyak anggota masyarakat, yang merasa dia mengabaikan kekhawatiran tentang lonjakan kasus Covid-19 pada saat itu.

Mori mengundurkan diri pada Februari lalu setelah menghadapi kritik keras karena membuat pernyataan seksis. Beberapa sukarelawan Olimpiade mundur dan beberapa pelari mundur dari estafet obor sebagai protes atas pernyataan Mori.

Sedangkan Hashimoto mengatakan dia akan menyambut mereka yang ingin kembali sebagai sukarelawan

BAGAIMANA DENGAN KEIKUTSERTAAN INDONESIA?



Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Raja Sapta Oktohari menegaskan hingga akhir April 2021 kontingen Merah Putih tetap akan mempersiapkan diri menuju Olimpiade Tokyo meski pemerintah Jepang telah menerapkan keadaan darurat COVID-19 di negaranya. Okto, sapaan akrabnya, mengaku tidak keberatan dengan keputusan panitia penyelenggara melarang kehadiran penonton luar negeri dalam pesta empat tahunan itu.

Yang terpenting saat ini, menurutnya, adalah bagaimana Olimpiade bisa tetap terselenggara dengan aman. "Sejauh ini saya sudah tanya sama pihak Jepang kalau Olimpiade Tokyo tetap digelar sesuai rencana. Meski tidak ada penonton asing, ya tidak masalah buat kami," ungkap Okto di Jakarta, Jumat, 23 April 2021.

Apabila Olimpiade 2020 Tokyo sukses terselenggara, Okto menyebut hal itu bakal menjadi momen yang tak terlupakan apalagi seluruh pihak di dunia sudah sangat menantikan pelaksanaan pesta olahraga terakbar sejagad itu. Ia menambahkan, KOI juga akan mulai bersafari ke beberapa pelatnas untuk menengok persiapan para atlet menuju Olimpiade Tokyo yang akan digelar kurang dari 100 hari lagi itu.

"Mulai pekan depan kami akan reli ke cabor-cabor. Kami berencana pada Selasa, 27 April 2021 sore akan ke Pelatnas Cipayung bersama tim CdM (Chief de Meeting)," tuturnya.

Okto berbicara setelah pada Jumat, 23 April 2021 pemerintah Jepang menerapkan status keadaan darurat COVID-19 di Tokyo dan tiga wilayah lainnya tepat tiga bulan sebelum upacara pembukaan Olimpiade Tokyo yang dimulai pada 23 Juli mendatang.

Aturan ini bertepatan dengan libur Golden Week yang merupakan masa kunjungan paling sibuk di Jepang dalam tahun ini, dan bisa melibatkan penghentian operasi kereta dan bus demi mengendalikan pergerakan. Skala pandemi di Jepang kian membuat was-was para pejabat dan pekerja medis kendati pemerintah dan penyelenggara Olimpiade Tokyo tetap bertekad mewujudkan perhelatan tersebut berjalan sesuai rencana.

Presiden Komite Olimpiade Internasional (IOC) Thomas Bach mendukung langkah pemerintah Jepang dalam menerapkan keadaan darurat di Tokyo. Namun ia menilai keputusan itu tidak ada kaitannya dengan Olimpiade.

"Jika langkah ini diambil, saya pikir keputusan itu akan sejalan dengan pendekatan yang sangat hati-hati dari pemerintah Jepang, pemerintah metropolitan Tokyo dan semua otoritas Jepang," kata Bach.

"Keputusan itu merupakan tindakan preventif dan ditetapkan untuk waktu yang terbatas. Ini sejalan dengan kebijakan pemerintah secara keseluruhan tidak ada kaitannya dengan Olimpiade," tandasnya. ●



DIGITAL NOMAD DAN IMIGRASI KITA

Oleh: Zulfikar Dilahwangsa

Kasus Kristen Gray tentang gaya hidup digital nomad di Indonesia adalah wake up call bagi keimigrasian Indonesia mengantisipasi regulasi yang mencakup gaya hidup baru ini. Penyesuaian regulasi adalah salah satu jalan menghadapinya.

Akhir-akhir ini digital nomad menjadi istilah yang banyak diperbincangkan di media sosial. Viralnya pembahasan mengenai digital nomad disebabkan oleh cuitan Kristen Gray di Twitter mengenai enaknya hidup di Bali pada saat pandemik seperti saat ini.

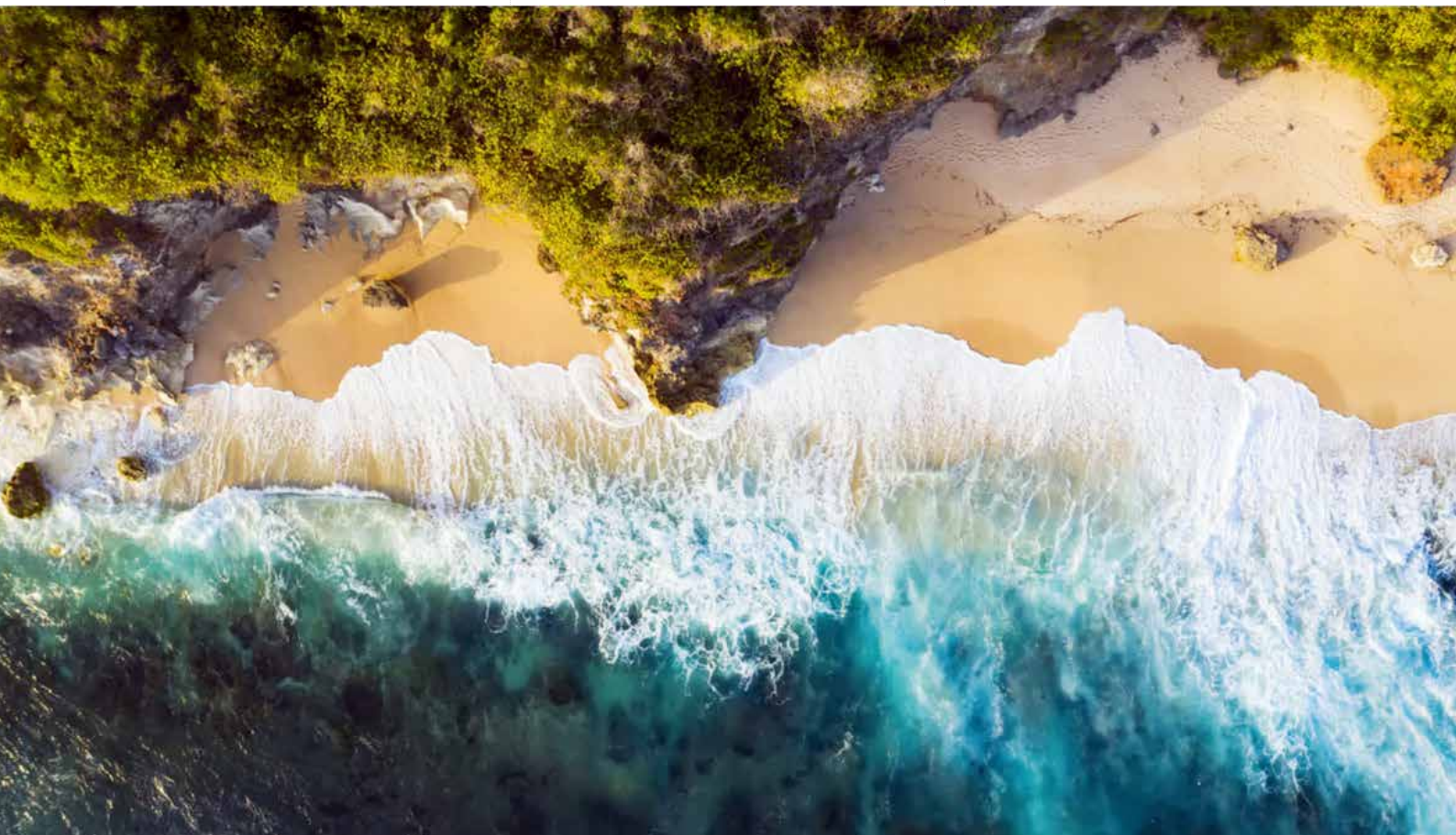
Gray menjelaskan bahwa hidup di Bali sangat nyaman, aman, murah, sehingga mendukung gaya hidup mewah dan "queer-friendly". Dengan

kata lain Gray (juga) menyatakan bahwa masyarakat Bali terbuka terhadap komunitas LGBTQ (lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer).

Digital nomad sendiri diartikan sebagai gaya hidup baru ketika orang-orang lepas dari keterbatasan waktu dan lokasi untuk bekerja berkat kemajuan teknologi dan jaringan komunikasi berkecepatan tinggi. Perbedaan mendasar antara digital nomad dengan wisatawan konvensional

terletak pada cara mereka melakukan pekerjaan.

Jadi, digital nomad melakukan kegiatan seperti wisatawan pada umumnya, seperti mengunjungi atraksi wisata. Namun, mereka juga melakukan pekerjaan berbasis online untuk mendukung gaya hidupnya. Sejauh ini digital nomad kebanyakan berprofesi sebagai digital marketing, content creator, dan web developer. Namun, banyak bisnis memungkinkan gaya



hidup serupa.

Gaya hidup nomaden ini menjadi tren di banyak negara Eropa dan Amerika. Beberapa negara, misalnya Lithuania, memberikan visa khusus bagi para penggiatnya. Dibanding dengan negara lain, peraturan keimigrasian Indonesia belum mengenal tren ini. Hal ini yang membuat kasus Kristen Gray cukup problematis.

Di satu sisi, dari perspektif hukum keimigrasian Indonesia, Kristen Gray tidak melanggar peraturan untuk bergiat sebagai digital nomad. Akan tetapi di sisi lain, banyaknya atensi dari publik atas kasus ini mengharuskan imigrasi untuk mengambil kebijakan. Kristen Gray kemudian dideportasi.

Dari keterangan Kemenkumham Bali, Jamaruli Manihuruk, Grey dideportasi karena diduga menyebarkan informasi yang meresahkan masyarakat tentang Bali yang terbuka terhadap kelompok LGBTQ dan juga memberikan informasi bahwa di tengah pandemi ini, akses ke Bali cukup mudah. Berdasar atas Pasal 75 ayat (1) UU No. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, maka Gray dapat dideportasi dengan alasan membahayakan ketertiban umum.

Website nomadlist, yaitu tempat para digital nomad bertukar informasi dan terkoneksi, menempatkan Canggu di Bali sebagai destinasi favorit kedua di dunia setelah Portugal. Nomad score diberikan atas pertimbangan murahness biaya hidup, kecepatan internet, atraksi wisata, dan keamanan terhadap wisatawan.

Belum ada data yang menjabarkan jumlah pasti digital nomad di Indonesia, namun dengan dipilihnya Bali sebagai destinasi kedua terbaik bagi digital nomad di dunia, maka angka digital nomad diprediksi akan terus bertambah. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Mulyana dkk, digital nomad di Canggu didominasi oleh warga negara kebangsaan Jerman, Australia, dan Amerika Serikat.

Nah, viralnya cuitan Kristen Gray tentang gaya hidup digital nomad di Indonesia adalah wake up call bagi keimigrasian Indonesia untuk membuat peraturan yang mengatur mengenai gaya hidup baru ini. Apakah

membuat visa khusus untuk digital nomad atau mengetatkan peraturan keimigrasian dalam pemberian visa? Namun banyaknya atensi publik terhadap kasus Kristen Gray mengungkapkan beberapa fakta.

Pertama, keberadaan digital nomad semakin memperjelas adanya gap kesejahteraan antara masyarakat Indonesia dan wisatawan pada umumnya. Dengan memanfaatkan perbedaan pendapatan dan biaya hidup yang relatif rendah, digital nomad dapat hidup mewah di negara tujuan. Fenomena gentrifikasi kemudian tidak dapat dihindarkan, yaitu fenomena masyarakat pendatang atau digital nomad dalam mengakses akomodasi yang lebih baik

dari masyarakat setempat. Hal ini kemudian mengakibatkan termarginalnya masyarakat setempat di kampung halaman mereka sendiri.



Kedua, sumber daya manusia kita masih tertinggal dibanding negara lain. Walaupun Indonesia masuk sebagai negara kelima pengguna internet terbesar di dunia, namun mayoritas penggunaan internet masyarakat Indonesia masih untuk tujuan leisure atau hiburan, tidak dalam rangka kegiatan produksi. Disparitas sumber daya manusia di zaman hyper-connectivity ini semakin terasa di daerah pedesaan yang hanya berfokus pada ekonomi konvensional, seperti berdagang atau menyewakan akomodasi di daerah wisata.

Ketiga, masyarakat Indonesia masih konservatif terhadap nilai-nilai luar. Dengan banyaknya arus masuk

digital nomad ke Indonesia, maka dengan tidak langsung masyarakat Indonesia akan banyak terekspose terhadap nilai-nilai luar. Pada kasus Gray, atensi publik Indonesia terfokus terhadap pernyataan "queer-friendly", yaitu pernyataan Gray yang menyebutkan bahwa Indonesia, khususnya masyarakat Bali, terbuka terhadap kelompok minoritas LGBTQ.

Sontak publik beraksi terhadap pernyataan Gray tersebut, sehingga opini publik terbentuk dan imigrasi harus mendeportasi Gray. Di sini kemudian

muncul pertanyaan, apakah masyarakat kita siap terekspos nilai-nilai di luar nilai konservatif yang dianutnya?

Keimigrasian Indonesia harus mempertimbangkan ketiga alasan di atas. Seperti yang selalu disebutkan di literatur hubungan internasional

bahwa globalisasi membawa manfaat sekaligus tantangan. Manfaat yang dibawa oleh digital nomad ini tentu tidak bisa disangkal. Sektor pariwisata merupakan sektor unggulan non-migas. Namun di sisi lain, ada dampak non-riil yang perlu dipertimbangkan.

Perubahan adalah keniscayaan. Dengan perkembangan teknologi, perubahan ini kemudian bergulir semakin cepat. Keimigrasian Indonesia perlu sigap mengantisipasinya. Gray hanya satu kasus, namun digital nomad adalah gejala yang mengglobal dan pasti menjangkau Indonesia. •

Penulis adalah Praktisi Imigrasi Bekerja di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar, Sulawesi Selatan



DI NEGERI ORANG SAAT RAMADAN

Berada di negeri orang ketika Ramadan tiba, masih banyak warga Indonesia yang menjalankan puasa. Pulang mudik ke Indonesia pun mungkin terhalang pandemi Covid-19, sebagaimana perjalanan mudik di dalam negeri. Bagaimana dengan para pesohor?

Sejumlah pesohor masih berada di negeri orang pada Ramadhan 1442 Hijriyah tahun ini. Acha Septriasa, misalnya, yang kini bermukim di Sydney, Australia, bersama suaminya Vicky Kharisma.

Selisih waktu antara

Jakarta dan Sidney sebagai kota tempat tinggal Acha Septriasa adalah tiga jam lebih awal. Acha pun menyapa para penggemarnya melalui akun Instagram miliknya. "Gimana puasa nya hari ini? Semoga tetap semangat ya," kata Acha Septriasa di laman Instagramnya.

Karena waktunya lebih dahulu Sidney, maka Acha Septriasa pun berbuka dulu dibandingkan yang ada di Indonesia. Ia juga menceritakan bagaimana pengalaman puasanya selama di luar negeri. "Btw aku baru aja buka puasa di sini, kalau diinget-inget jam-jam lapar ku jam 1-2 siang..," ujar pemeran film *Heart* itu.

Saat berpuasa, memang waktu berbukalah yang dinantikan. Biasanya setelah mengonsumsi hidangan berbuka, semua rasa lapar dan haus langsung hilang.

Sama saja dengan Acha. "Setelah buka puasa 15 menit dari beduk, sepertinya rasa lapar dan haus itu hilang..," ungkapnya.

Memang ada beduk di Sydney? Maksudnya pasti ketika saat berbuka tiba.

Masih di Australia, pesohor lain yang berpuasa di sana adalah Amanda Rawles. Tengah melanjutkan studinya di Australia, ibadah puasa di Negeri Kanguru membuat

Amanda sangat merindukan suasana Ramadan dengan takjil setiap jelang berbuka puasa. "Karena aku seka-





rang lagi ada di Australia, jadi jujur aku lagi kangen banget sama makanan takjil di Indonesia,” kata Amanda.

Dengan bantuan mamanya melalui sambungan video call, Amanda membuat sendiri biji salak yang terbuat dari ubi merah dan sagu, yang disiram dengan kuah santan dan gula merah. Setelah beberapa lama berkulat di dapur, Amanda dan adiknya Aiden mencicipi takjil biji salak tersebut saat waktu berbuka puasa.

Nah, di Australia juga, Cindy Claudia Harahap, aktris sinetron sekaligus penyanyi era 1990-an ini lebih menikmati keseharian bersama suami dan anak-anaknya di Perth, Australia. Istri Thariq Mahmud Eben yang menikah pada 1998 ini pun terlihat bahagia bersama sang suami. Terbukti dari sejumlah unggahan Cindy Claudia di media sosialnya.

Meskipun sang suami sibuk, kehidupan Cindy Claudia di Australia tetap berwarna lantaran ia sudah memiliki tiga orang anak. Putri sulung mending Rinto Harahap ini juga beberapa kali menyapa penggemar di media sosial saat berada di rumah.

Cindy Claudia Harahap sudah menetap di Australia semenjak tahun 1998. Lahir dari orang tua yang berbeda agama, artis cantik satu ini menganut agama Islam dan tetap berpuasa. Pada tahun-tahun sebelumnya, malah Cindy berkesempatan menjalani Ramadan di Tanah Suci.

Beralih ke Singapura, sejak menikahi Sultan Yaar Jorik Dozy, pesohor Nadia Vega menetap di Singapura



bersama suaminya. Berbuka puasa di luar negeri pun sudah menjadi tradisi tahunan baginya.

Ia juga mengajari suami yang merupakan mualaf soal berpuasa. Mereka pun bersama-sama menjalankan ibadah puasa di Singapura.

Awalnya, Nadia meninggalkan Indonesia untuk kuliah di salah satu universitas di Melbourne, Australia. Ia sempat pulang ke Indonesia setelah

lulus, lalu melanjutkan bekerja di Singapura.

“Aku officially enam tahun (tinggal di Singapura), satu tahun kerja bolak-balik, setelah menikah masih bolak-balik juga,” ujar Nadia Vega, via Zoom, belum lama ini.

Pada 2015, Nadia resmi dipersunting pria bule asal Belanda yang juga seorang animator film-film Hollywood, Sultan Yaar Jorik Dozy. Setelah menikah, mereka memutuskan tetap tinggal di Singapura dan melanjutkan karir di sana.

Selama merantau di negeri orang, Nadia sering merasa kangen dengan keluarga di Tanah Air. Artis kelahiran 33 tahun silam ini juga kangen lho makan masakan khas Indonesia. Sayangnya, ia harus menahan rindunya karena kondisi pandemi Covid-19.

Tentunya bukan hanya pesohor saudara sebangsa kita yang menjalani puasa Ramadan di negeri orang. Para pesohor itu sekadar contoh banyak warga Indonesia di luar negeri masih menjalani puasa dan terhalang mudik karena pandemi. ●





AJAKAN MENGELOLA LAUTAN UNTUK MASA DEPAN

Menjadi negara industri dengan pertanian yang tangguh semakin menjauh dari kenyataan. Adakah lautan masih memberi harapan?

Bagi Indonesia, lautan sangat penting bagi perekonomian dan kesejahteraannya. Dengan lebih dari 17.500 pulau dan tiga perempat wilayahnya di laut, lautan merupakan pusat kemakmuran Indonesia. Namun, ekosistem laut dan pesisir Indonesia serta nilai ekonominya terancam karena penangkapan ikan yang berlebihan, degradasi hutan bakau dan terumbu karang, serta sampah laut. Ekonomi biru, atau strategi ekonomi laut berkelanjutan, dapat mengatasi tantangan ini.

Begitulah salah satu simpulan Bank Dunia yang laporannya terbit pada 25 Maret 2021 lalu. Lebih dari itu, rekam jejak menunjukkan, antara 2013 dan 2017, Indonesia memanen rata-rata 6,1 juta ton ikan laut setiap tahun, nomor dua setelah China yang angkanya sudah melampaui 15 juta ton per

tahun. Perikanan tangkap laut dan budidaya mempekerjakan sekitar tujuh juta orang Indonesia, menunjukkan sebagai sumber pekerjaan penting bagi warga pesisir Indonesia. Secara keseluruhan Indonesia dianggap sebagai negara yang paling bergantung pada ikan kedelapan di dunia: ikan menyumbang 52 persen dari semua pasok protein hewani di Indonesia, jauh di atas rata-rata global sebesar 16 persen.

Pada 2018, sektor ini memberikan kontribusi lebih dari USD 26,9 miliar bagi perekonomian nasional, atau sekitar 2,6 persen dari PDB, proporsi yang lebih besar daripada negara-negara lain di kawasan, termasuk China (1,4 persen), Filipina (1,5 persen), Malaysia (1,1 persen), dan Thailand (0,67 persen). Perikanan berkontribusi pada pendapatan ekspor sekitar USD 4,1

miliar (2,4 persen dari total ekspor Indonesia) pada 2017, memasok sekitar 2,6 persen pasar global.

Namun, terdapat tantangan bagi ekosistem laut dan pesisir, yang apabila tidak dikelola secara berkelanjutan, dapat mengurangi potensi ekonomi laut Indonesia. Sekitar 38 persen ikan tangkapan melebihi kemampuan ekosistem untuk mengembalikan jumlahnya (overfishing), sekitar sepertiga dari terumbu karang yang berharga bagi Indonesia berada dalam kondisi kurang baik, ekosistem pesisir yang penting, seperti mangrove atau bakau, mengalami pengurangan yang luar biasa. Sementara sampah laut menimbulkan kerugian bagi perekonomian Indonesia senilai lebih dari 450 juta dolar AS setiap tahunnya.

Bank Dunia menambahkan sisi pariwisata. Laporan itu juga menyebutkan, beberapa destinasi wisata laut dan pesisir juga telah menunjukkan dampak pengunjung yang terlalu padat dan belum memiliki infrastruktur dasar memadai.

Dari sisi pemerintah Indonesia. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengomentari kajian Bank Dunia ini. "Pemerintah Indonesia saat ini tengah menempuh berbagai kebijakan menuju strategi ekonomi biru untuk meningkatkan tata kelola ekosistem laut dan pesisir, mencapai peluang ekonomi yang setara, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Strategi ini mencakup penetapan target ambisius untuk mengurangi sampah laut serta memulihkan dan melestarikan mangrove dan ekosistem laut lainnya. Kami menyambut peningkatan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk lebih memperkuat implementasi ekonomi laut yang berkelanjutan," ujar Menteri Luhut.

Untuk mendukung berbagai strategi dan kegiatan pemerintah Indonesia, laporan ini mengusulkan beberapa rekomendasi. Untuk mendukung sektor perikanan yang berkelanjutan dan produktif, pemerintah dapat menerapkan sistem Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Indonesia dan memperkuat area taman laut yang terus berkembang, dengan memanfaatkan potensi dukungan dari dana abadi nasional dan kemitraan dengan sektor swasta.

Memperluas moratorium alih fungsi hutan primer hingga meliputi seluruh ekosistem bakau dapat mencegah kerusakannya, serta mendukung sasaran restorasi bakau yang ada saat ini. Laporan ini juga merekomendasikan langkah-langkah pengurangan sampah plastik di laut, termasuk dengan menetapkan persyaratan minimum kandungan bahan daur ulang di dalam produk-produk tertentu dan memperluas larangan penggunaan produk-produk plastik yang dapat digantikan oleh bahan lainnya.

Tentu upaya mengatur arus pengunjung ke destinasi wisata pesisir dan laut juga dapat ditingkatkan. Ini juga bisa dikaitkan dengan limbah plastik yang dihasilkannya.

Sebagai bahan informasi berbagai investasi dan kebijakan nasional, serta agar Indonesia dapat memanfaatkan peluang keuangan biru, maka pemerintah dapat melanjutkan upaya untuk meningkatkan data dan penghitun-

gan jasa ekosistem, seperti potensi karbon yang tersimpan, habitat bagi keanekaragaman hayati, dan perlindungan dari badai.

"Di tingkat global, reformasi yang mendorong ekonomi laut yang berkelanjutan telah terbukti dapat mengembangkan potensi ekonomi laut sekaligus mengatasi perubahan iklim, memenuhi kebutuhan bagi ketahanan pangan dan keanekaragaman hayati," ujar Satu Kahkonen, Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-

ketahanan dalam jangka panjang," sambungnya.

Untuk memperkuat strategi ekonomi biru dan memanfaatkan secara utuh potensi ekonomi lautnya, Indonesia dapat memperkuat koordinasi lintas-sektor melalui Sustainable Oceans Platform tingkat tinggi. Dengan pendekatan ini, berbagai lembaga pemerintah dan para pelaku non-pemerintah diajak turut serta mengambil bagian dalam koordinasi perencanaan dan implementasi kebijakan, memantau ke-



Leste. Menurut dia, investasi berkelanjutan dalam keterampilan, kelembagaan, infrastruktur, dan layanan akan membantu Indonesia memanfaatkan sumber daya lautnya secara berkelanjutan dan menyeluruh.

"Selain itu, di masa pasca pandemi Covid-19, kegiatan restorasi dan konservasi ekosistem pesisir dan laut dapat membantu menyediakan pekerjaan jangka pendek sembari memperkuat

majuan, serta pertukaran pengetahuan maupun praktik-praktik terbaik di lintas-sektor kelautan.

Meninggalkan Maret, musim angin barat di iklim tropis kita mulai mereda. Tapi, kapan sektor kelautan benar-benar marak untuk menunjang perekonomian? Tetap tersedia peluang, dan juga kesempatan ketika negara industri dengan pertanian yang tangguh masih jauh dari harapan. •



BERMULA DARI MELEMAHNYA EKONOMI

Bukan Covid-19 pada mulanya. Ekonomi Indonesia terendus agak lesu sejak Triwulan atau kuartal 1 (Januari-Maret) 2019.

Saat itu menjelang Pemilu serentak 2019. Perlambatan pertumbuhan sudah terasa sejak Triwulan ke-1 tahun 2019. Perekonomian nasional hanya tumbuh 5,1 persen dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Oktober-Desember 2018), padahal perkiraan awal akan mencapai 5,2 persen.

Kajian Ekonomi Triwulan 1 2019 yang diterbitkan Bank Dunia mengidentifikasi, sejumlah penyebab lesunya pertumbuhan di awal 2019 itu antara lain penundaan proyek-proyek investasi publik yang baru --banyak jika harus disebutkan satu persatu: jalan raya, pelabuhan, bendungan, antara lain. Faktor lain adalah ketidak-

pastian menjelang pemilihan umum. Ya, kondisi lebih lesu agak terhindarkan dengan pertumbuhan konsumsi swasta dan pemerintah dari peningkatan belanja parta-partai politik dan belanja pegawai. Itu faktor internal.

Namun, faktor eksternal menekan juga. Harga komoditas produk ekspor Indonesia sedang turun. Selanjutnya, siklus investasi sektor pertambangan semakin matang, artinya sedang menuju akhir produksi setelah sekian lama menghasilkan, perlu investasi atau sumber baru seperti sektor minyak dan gas. Toh rupanya pertumbuhan investasi sedang melambat.

Alhasil, untuk pertama kalinya dalam sepuluh kuartal (dua setengah

tahun), ekspor dan impor menurun. Faktor eksternal lebih berperan di sini: pertumbuhan ekonomi global lebih lambat, perdagangan dunia melemah dan arus investasi global pun demikian. Namun, dampak global untuk masing-masing negara akan berbeda. Di Indonesia, penyusutan impor terjadi hampir empat kali lebih tinggi daripada jumlah ekspor. Sisi positifnya, dorongan ekspor lebih tinggi sehingga dapat menjaga nilai pertumbuhan ekonomi.

Meski begitu, dari sisi internal dalam negeri, tetap terjadi pertumbuhan di berbagai sektor ekonomi. Kajian ekonomi Bank Dunia mencatat pula, pertumbuhan nilai tambah bruto (GVA)



yajikan gambaran lebih beragam. Volume ekspor minyak mentah, gas dan karet menurun, sedangkan batubara, minyak sawit, dan logam dasar naik. Ekspor minyak mentah dan gas turun masing-masing sebesar 70,7 persen dan 13,8 persen, hampir dua kali lipat dan tiga kali lipat dari kontraksi yang terlihat pada kuartal terakhir 2018. Penurunan ini kemungkinan besar disebabkan produksi migas hanya mencapai 90 persen dari target kumulatif Pemerintah tahun 2019 pada Q1 karena beberapa blok minyak yang dioperasikan Pertamina, terutama Mahakam, mengalami penurunan produksi. Sebaliknya, ekspor logam dasar meningkat 64,5 persen - tingkat yang lebih moderat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, karena dampak dari pencabutan larangan ekspor mineral. Jejaknya dapat diikuti dengan kebijakan pemerintah mengizinkan lagi ekspor mineral logam selama setahun mulai 15 Maret 2021.

Ekspor batu bara naik 10,5 persen di Triwulan ke-1 2018, juga meningkat 7,6 persen dari Triwulan ke-4 2018. Meskipun demikian, peningkatan volume ekspor tidak cukup mengimbangi penurunan harga batu bara, yang menyebabkan penurunan nilai ekspornya. Demikian pula, volume ekspor minyak sawit naik 9,8 persen karena permintaan yang lebih besar untuk biodiesel dari China dan Uni Eropa, tetapi peningkatan tersebut sebanding dengan penurunan harga. Ekspor minyak sawit mungkin meningkat dalam beberapa bulan mendatang karena prosedur ekspor yang disederhanakan mulai berlaku, tetapi kemungkinan akan menghadapi hambatan dari sisi permintaan karena Uni Eropa menerapkan peraturan baru yang membatasi penggunaan minyak sawit dalam bahan bakar nabati mulai bulan Juni 2019.

Alhasil dengan dinamika ekonomi global sebagai faktor eksternal dan dalam negeri sebagai faktor internal pada awal 2019 itu, kajian Bank Dunia melihat perlunya reformasi struktural jangka menengah untuk meningkatkan pendapatan nasional demi menjaga pertumbuhan. Reformasi untuk mengumpulkan lebih banyak penda-

stabil di tingkat 4,9 persen di Triwulan 1 2019 dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Toh beberapa sektor tetap relatif lebih sengsara karena mengalami perlambatan. Antara lain: sektor pertanian, manufaktur, sektor listrik, gas, dan air. Jejak-jejaknya dapat terlacak pada awal 2021, setelah Covid-19 sepanjang 2020 menjadi kendala, antara lain dengan upaya pengembangan irigasi, jalan raya nasional, pembangunan pembangkit, perluasan jaringan gas, dan peresmian bendungan di berbagai provinsi.

Dengan konsumsi swasta di dalam negeri tetap kuat, impor riil menyusut 7,8 persen di Triwulan 1 2019, sebagian besar terpicu oleh penurunan impor minyak dan gas sebesar 22,9 persen. Kajian Bank Dunia mengaitkannya dengan kebijakan pemerintah mewajibkan, penggunaan biofuel dalam campuran solar dan kebijakan lain di bidang impor komoditas tertentu, yang telah diterapkan pada paruh kedua 2018. Jadi, penyusutan ekspor terutama disebabkan oleh komoditas migas yang turun 0,7 persen setelah tumbuh 6,0 persen pada Triwulan ke-4 tahun 2018. Ini memang seiring dengan penurunan lifting minyak Indo-

nesia dan kebijakan Pemerintah yang memprioritaskan domestik --produksi minyak diutamakan untuk konsumsi domestik daripada untuk ekspor.

Dari enam komoditas ekspor utama Indonesia --minyak sawit, karet, logam dasar, batu bara, minyak mentah dan gas alam cair (LNG)-- harga semua komoditas kecuali LNG dan karet turun pada Triwulan ke-1 2019, dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan harga komoditas pertanian turun selama enam kuartal berturut-turut. Meskipun kebijakan B20 membantu mengurangi stok di Indonesia, persediaan yang masih tinggi di Malaysia terus menyeret harga minyak sawit mentah global turun sebesar 17 persen secara tahunan, menyusul penurunan 23 persen pada Triwulan ke-4 pada 2018.

Harga karet juga mengalami penyusutan, meskipun lebih rendah, yaitu empat persen saja dibandingkan Triwulan 1 2018, namun turun 13 persen di kuartal sebelumnya. Harga karet diperkirakan lebih stabil karena Indonesia, bersama dengan Malaysia dan Thailand, sepakat untuk memangkas ekspor karet.

Toh volume ekspor komoditas men-

• INFO KHUSUS

patan sangat penting untuk memperluas ruang fiskal (anggaran). Ini terutama untuk pengeluaran prioritas yang bertujuan meningkatkan potensi pertumbuhan dan menyediakan layanan dasar untuk semua warga, terutama pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, misalnya.

Kajian Bank Dunia mencatat, meskipun peningkatan kualitas belanja memang penting dalam mendukung bidang-bidang pembangunan prioritas, kendalanya memang anggaran. Belanja publik Indonesia mencapai 14,9 persen dari PDB pada 2018, dibandingkan dengan rata-rata 35,4 persen dari PDB di negara berkembang (new

emerging market) lainnya. Negara ini memiliki kesenjangan besar antara pendapatan aktual dan potensial, dengan tarif pemungutan pajak utama diperkirakan hanya sekitar 50 persen dari pendapatan pajak potensial. Kesenjangan kebijakan pajak dan kapasitas administrasi pendapatan yang lemah, sebagian karena sistem Teknologi Informasi pajak inti yang ketinggalan zaman dan tidak memadai, menyebabkan kesenjangan pajak yang besar ini. Oleh sebab itu, Kajian Bank Dunia juga merekomendasikan kebijakan perpajakan dan reformasi administrasi untuk meningkatkan rasio pajak terhadap PDB dalam jangka menengah, dan untuk menambah

Keppres ini terlihat jelas karakter omnibus law yang mencakup banyak tingkatan, mulai dari wilayah publik seperti kalangan pemerintahan dan komunitas bisnis di tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten dan kota, yang selanjutnya mencapai pula wilayah domestik di tingkat keluarga dan perorangan masing-masing warga.

Tak mengherankan pula jika pelaksanaan dalam Keppres No 3 Tahun 2021 ini melibatkan delapan pejabat tinggi negara dalam Satgas P2DD. Mulai dari Menko Perekonomian, Gubernur Bank Indonesia, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Di tingkat provinsi Satgas P2DD diketuai oleh gubernur untuk tingkat provinsi dan bupati serta wali kota untuk tingkat kabupaten dan kota.

Lantas muncul pula rekomendasi menoleh ke lautan. Lebih ke manajemen atau tata kelola sumber daya perikanan dan kelautan yang lebih luas cakupannya. Ekonomi biru berkelanjutan (sustainable blue economy) istilahnya. Selain tata kelola perikanan, tercakup di dalamnya penanganan lingkungan kawasan pesisir dan lautnya agar lebih memikat sebagai destinasi wisata. Bahkan masalah sampah plastik menjadi kajian faktor risiko mengganggu ekonomi biru Indonesia sebagai salah satu rantai tata kelola yang lebih kompleks mengaitkan ekonomi dan ekologi sehingga sektor-sektor yang tercakup tadi dapat memberi manfaat lebih luas.

Pada akhirnya, kajian Bank Dunia melihat waktunya sudah mendesak untuk menciptakan kerangka kerja sektor kelautan dan perikanan yang dapat menyatukan pemerintah, industri, dan pemangku kepentingan lainnya, serta memperjelas peran dan tanggung jawab, dan meningkatkan koordinasi semua pihak. Tak ada yang mudah. Namun, jika bangsa lain sanggup, mengapa kita tak bisa melakukannya? •



emerging market) lainnya.

Mengingat aturan fiskal untuk menjaga defisit di bawah 3 persen dari PDB, peningkatan pengeluaran publik secara signifikan hanya mungkin dilakukan jika lebih banyak pendapatan yang terkumpul. Meskipun terjadi peningkatan dalam pengumpulan pendapatan baru-baru ini, rasio pajak terhadap PDB Indonesia sebesar 10,2 persen dari PDB pada tahun 2018 masih merupakan salah satu yang terendah di antara negara-negara berkembang di kawasan Asia Tenggara dan negara berkembang lainnya.

Namun yang lebih penting, ne-

penghasilan untuk pengeluaran (ruang fiskal) di bidang prioritas pembangunan. Jejak-jeaknya terlihat dalam pembentukan Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) melalui Keputusan Presiden No 3 Tahun 2021.

Tujuan pembentukan Keppres ini antara lain meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah, mendukung pengintegrasian sistem pengelolaan keuangan daerah, mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital masyarakat, dan meningkatkan integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional. Dari tujuan

TOLONG JAWAB PERTANYAAN INI

Sebuah pertanyaan sederhana: Ketika berada di tepi pantai indah, dengan alunan ombak gemulai karena angin bertiup lembut, apa yang Anda pikirkan? Boleh jadi kita hanya ingin bersukur dan menikmati suasana saat itu.

Namun, akan luar biasa jika dalam suasana nyaman seperti itu ada yang ingin menghitung, berapa sebenarnya potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan dari lautan Indonesia? Nah, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah memiliki hitung-hitungannya. Potensi pemanfaatan laut Indonesia diperkirakan mencapai 1.338 miliar per tahun atau setara dengan Rp19.133 triliun per tahun, mendekati sepuluh kali lipat dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

"Jumlah ini dari semua sisi. Mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya dan industri pengolahan dan seterusnya. Ini peluang, kita baru sentuh perikanan tangkap saja, kita belum sentuh bioteknologi," kata Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) KKP, Sjarief Widjaja, dalam Rapat Kerja Nasional Hipmi 2021, Sabtu, 6 Maret 2021.

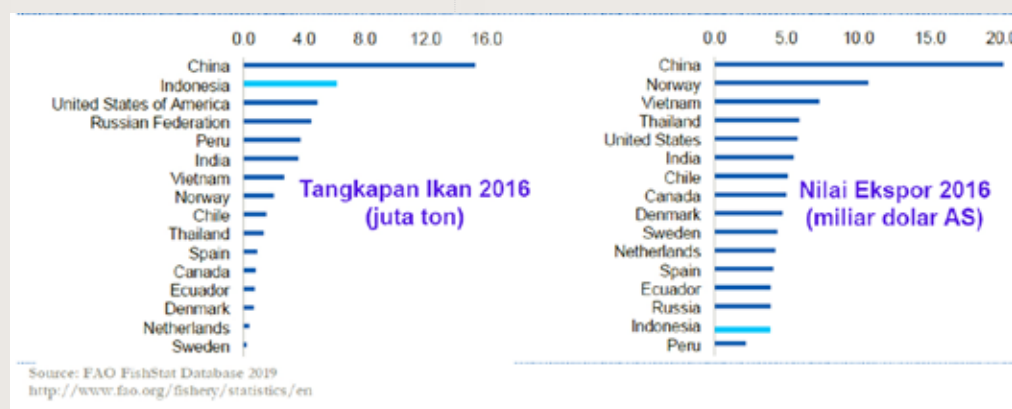
Paling tidak, potensi potensi kekayaan atau ekonomi sektor kelautan itu tersebar di 11 sektor. Selain perikanan tangkap yang potensinya 20 miliar dolar AS, tercakup pula perikanan budidaya 210 miliar dolar, industri pengolahan 100 miliar dolar, industri bioteknologi 180 miliar dolar, energi dan sumber daya mineral termasuk garam dan harta karun yang nama resminya Barang Muatan Kapal Tenggelam 210 miliar dolar. Selanjutnya, ada pariwisata bahari 60 miliar dolar AS, transportasi laut 30 miliar dolar AS, industri dan jasa maritim 200 miliar dolar, kehutanan pesisir 8 miliar dolar, sumber daya wilayah pulau-pulau kecil 120 miliar dolar AS, dan sumber daya non-konvensional 200 miliar dolar AS.

Sebagai contoh, Syarif Wijaya mengemukakan Indonesia termasuk pengekspor terbesar rumput laut, yakni sekitar 25 persen kebutuhan du-

nia berasal dari tanah air. Namun, permasalahannya produk yang diekspor masih bahan mentah sehingga belum memiliki nilai tambah yang lebih besar.

Mengenai rumput laut, Sjarief menjelaskan, produk ini menjadi andalan sektor kelautan karena cakupan indus-

memanfaatkan perikanan tangkap sebagai sumber utama pemanfaatan laut. Sebagai perbandingan, jumlah penduduk Indonesia tercatat nomor empat terbesar di dunia setelah China, India, Amerika Serikat, dan Rusia. Namun, untuk penangkapan ikan laut,



tri yang di hilirnya sangat luas. Rumput laut bisa menjadi bahan baku kosmetik, obat-obatan hingga tepung.

Dia pun mengajak seluruh pengusaha nasional terutama yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) untuk memanfaatkan peluang ini. "Kita eksportir terbesar tapi kita belum sentuh hilirisasi ini peluang," ungkapnya.

Itu baru rumputnya. Sektor dan sub-sektor lainnya masih sangat banyak dan luas. Namun, sebagai catatan, Indonesia sejauh ini terlalu banyak

Indonesia duduk di peringkat kedua di bawah China yang memang penduduknya paling besar di dunia.

Maka tak mengherankan jika muncul fenomena penangkapan berlebihan (overfishing) yang justru dapat mengganggu pasok ikan laut di masa depan. Sementara sektor-sektor lainnya di bidang perikanan dan kelautan masih banyak terabaikan. Jadi, kembali lagi, ketika berada di tepi pantai indah, dengan alunan ombak gemulai karena angin bertiup lembut, apa yang Anda pikirkan? •

BAGAIMANA SALING MENYELAMATKAN

Diakui atau tidak, lautan sudah terbukti menjadi salah satu penyelamat ekonomi Indonesia. Tangkapan ikan laut Indonesia hanya kalah oleh China, hingga kecenderungan berlebihan (overfishing) menjadi tantangannya. Kajian Bank Dunia merekomendasikan tata kelola atau manajemen kelautan bukan sekadar menangkap ikan saja.

Data terakhir dari Badan Pangan dan Pertanian (FAO, Food and Agricultural Organization) dalam The State of the World Fisheries and Aquaculture (SOFIA) 2020 tetap menempatkan Indonesia sebagai negara penangkap ikan nomor dua setelah China. Yang juga penting untuk menjadi catatan, lebih dari separuh kebutuhan protein hewani penduduk Indonesia berasal dari ikan laut, mulai dari ikan asin kelas rendah hingga hidangan termahal semacam lobster di resto

berbintang lima.

Malah Bank Dunia melihat lautan merupakan sumber kesejahteraan Indonesia. Mulai dari penangkapan dan budidaya ikan, pariwisata pesisir, konstruksi lepas pantai, maupun transportasi. Namun, selain peluang, potensi kelautan dan perikanan Indonesia itu menghadapi tantangan.

Peluangnya, nilai ekonomi jangka panjangnya masih bisa berkembang. Mengutip studi Costello dan rekan (2016), "Global Fishery Prospects Under Contrasting Management Re-

gimes", peningkatan itu dapat mencapai angka tiga miliar dolar AS per tahun dibandingkan dengan cara yang sekarang dilakukan --termasuk ancaman penurunan stok ikan yang ditangkap berlebihan. Antara lain dengan peningkatan budidaya berkelanjutan, termasuk rumput laut. Juga penanganan pariwisata pesisir dan imbal-beli penurunan karbon di ekosistem pesisir, terutama hutan bakau dan lamun.

Ihwal peluang ini banyak tergantung pada pelestarian alam: bakau, terumbu karang, dan lamun, di antara



ekosistem berharga lainnya. Studi Spalding (2017) memperkirakan bahwa terumbu karang Indonesia menopang pendapatan pariwisata sekitar 3,1 miliar dolar per tahun melalui kegiatan rekreasi terkait (misalnya, menyelam dan snorkeling). Terumbu karang selanjutnya mendukung pendapatan perikanan sekitar 2,9 miliar dolar per tahun dengan menyediakan habitat ikan kritis. Infrastruktur pesisir juga bergantung pada ekosistem ini: terumbu karang dapat membantu Indonesia menghindari kerusakan banjir yang diperkirakan mencapai 0,6 miliar dolar setiap tahun, dan akan meningkat jika pertumbuhan wilayah pesisir tak terkendali dan dampak perubahan iklim menjadi lebih parah.

Toh, terdapat tantangan sejauh mana dan keutuhan ekosistem laut dan pesisir Indonesia yang jika tidak dikelola dengan baik dapat merusak potensi ekonomi kelautan Indonesia. Sebagai contoh, pada 2017, 38 persen perikanan tangkap laut nasional terhitung berlebihan (dan 44 persen lainnya ditangkap maksimal, tersisa

18 persen saja yang masih di bawah batas berlebihan), sehingga menukarkan keuntungan, pendapatan ekspor, pendapatan pemerintah, dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Meskipun serbuan kapal asing ke perairan Indonesia telah secara efektif dikendalikan oleh Pemerintah Indonesia, pengelolaan armada domestik tetap perlu diperkuat. Armada Indonesia terdiri lebih dari 600.000 kapal, dan menurut studi California Environmental Associates (2018) lebih dari 90 persen antaranya adalah kapal kecil (di bawah 10 gross ton) yang secara kolektif bertanggung jawab atas lebih dari setengah total tangkapan. Banyak yang tidak terdaftar dan tidak terpantau. Penerapan sistem Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), sebuah upaya kelembagaan penting untuk memperkuat tata kelola perikanan Indonesia, masih belum tuntas, dan koordinasi lintas tingkat pemerintah membutuhkan klarifikasi tanggung jawab.

Sementara itu, sekitar sepertiga dari kondisi terumbu karang Indonesia berada dalam kondisi yang memprihatinkan menurut survei terbaru Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada 2020 lalu. Faktor penyebabnya termasuk penangkapan ikan yang merusak dan polusi, termasuk limbah pertanian dan perkotaan serta limbah plastik. Kerusakan semakin diperburuk oleh perubahan iklim. Studi menunjukkan bahwa lebih dari 80 persen terumbu karang Indonesia diperkirakan mengalami pemutihan karang dalam lima dari sepuluh tahun sepanjang tahun 2030-an.

Mangrove (bakau) juga dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar. Indonesia adalah rumah bagi hutan bakau terluas di dunia (dengan total 3,31 juta hektar, sekitar 20 persen dari total dunia), namun memiliki tingkat kerusakan tercepat di dunia (antara 6.200 dan 52.000 hektar per tahun, bervariasi menurut tahun dan teknik klasifikasi yang digunakan) (Goldberg et al. 2020; Murdiyarso et al. 2015). Penebangan untuk budidaya perikanan menyumbang hampir setengah dari penebangan mangrove, sementara pembukaan untuk kelapa sawit

berkontribusi 16 persen. Lebih dari 50 persen bakau berada dalam kondisi rusak.

Pada sisi lain, destinasi wisata pesisir yang penting dipengaruhi oleh infrastruktur dasar dan kekurangan layanan bagi penduduk. Misalnya, per 2015, kawasan pariwisata Lombok dicirikan oleh akses rumah tangga rata-rata yang rendah ke pasokan air pipa (45 persen rumah tangga memiliki akses), sanitasi (48 persen), dan layanan pengumpulan sampah (26 persen). Kondisi ini kian parah dengan meningkatnya kebutuhan pengunjung dan bisnis. Tanda-tanda awal kerusakan lingkungan dapat dilihat di Taman Nasional Komodo, di mana proporsi wisatawan yang menemui sampah plastik laut meningkat dari sekitar 10 persen pada tahun 2009 menjadi lebih dari 50 persen pada tahun 2017..

Secara lebih luas, sampah plastik laut berdampak pada ekosistem, kesehatan manusia, dan sektor ekonomi laut, terutama perikanan, pariwisata pesisir, dan pelayaran komersial. Perkiraan terbaru kerusakan ekonomi akibat polusi plastik melebihi 10,8 miliar dolar per tahun di Kawasan Asia Pasifik saja, termasuk lebih dari 450 juta dolar per tahun di Indonesia. Perkiraan ini hanya biaya langsung. Biaya remediasi dan kerusakan tidak langsung pada ekosistem, jika diketahui, akan meningkatkan perkiraan ini secara substansial. Pada 2020, pemodelan Bank Dunia menggunakan data lokal memperkirakan bahwa Indonesia menyumbang antara 0,20 dan 0,55 juta ton plastik ke lautan setiap tahun.

Yang memperparah tantangan jangka panjang ini adalah tekanan yang lebih langsung dari pandemi COVID-19. Artinya, dengan kesulitan ekonomi yang semakin menekan, kerusakan potensi kelautan dan perikanan dapat berlanjut lebih parah dan lebih cepat lagi.

Sebagai jawabannya, Bank Dunia menawarkan pengembangan ekonomi biru (blue economy) secara berkelanjutan. Menurut Bank Dunia, [ekonomi biru adalah pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, pening-



• INFO KHUSUS

katan mata pencaharian, dan pekerjaan sambil menjaga kesehatan ekosistem laut. Sedangkan Komisi Eropa mendefinisikannya sebagai segala kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan samudera, laut, dan pantai.

Dalam kaitan ekonomi biru itu, studi Bank Dunia 2021 merekomendasikan sejumlah hal, antara lain kebijakan pengelolaan laut dan wilayah pesisir yang

sebagai prioritas nasional, elemen-elemen kunci masih harus diselesaikan.

Dewan WPP (Lembaga Pengelola Perikanan, LPP) membutuhkan anggaran, sumber daya manusia, dan mandat hukum yang diperkuat. Alat manajemen utama LPP — rencana pengelolaan perikanan (RPP) — sedang menunggu penyertaan strategi panen berbasis bukti. Peran dan tang-

LPP.

Indonesia memiliki peluang untuk menjadi yang terdepan di dunia dalam perencanaan tata ruang laut dan pesisir, berdasarkan upaya pengembangan dan implementasi rencana tata ruang baru-baru ini. Kepatuhan terhadap rencana tata ruang perlu dipastikan melalui integrasi rencana dengan sistem perizinan usaha, terutama penerbitan izin usaha. Untuk jangka panjang, kadaster laut dan pesisir (daftar hak milik spasial, yang mengidentifikasi hak milik atas wilayah tertentu, termasuk lokasi akuakultur dan fasilitas pariwisata) akan dibutuhkan untuk melengkapi sistem ini dan membantu mengelola konflik dalam menghadapi meningkatnya permintaan akan kelautan dan pesisir daerah.

Pengelolaan perikanan berbasis hak — yang telah meraih sukses besar secara internasional — memiliki potensi untuk berkembang di Indonesia. Di bawah sistem seperti itu, pemerintah memberikan hak istimewa penangkapan ikan kepada perusahaan atau masyarakat untuk sejumlah tangkapan (dalam batas panen keseluruhan), ke area tertentu, atau untuk menerapkan tingkat upaya penangkapan yang ditentukan. Hak istimewa ini dapat dikaitkan dengan sistem perizinan yang ada dan didasarkan pada masukan (misalnya, hari penangkapan ikan), keluaran (ikan yang ditangkap), serta zona spasial.

Komunitas adat saat ini dapat menerima hak-hak istimewa tersebut untuk penggunaan wilayah spasial yang telah ditentukan. Namun, mekanisme hukum yang disempurnakan sekarang diperlukan untuk memperluas sistem ini secara lebih luas, misalnya untuk memasukkan masyarakat tradisional dan lokal. Meskipun mekanisme tersebut telah menghadapi tantangan hukum sebelumnya, mekanisme yang kuat secara hukum untuk pendekatan berbasis hak dapat dilakukan di Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan target yang patut dipuji untuk restorasi bakau - 600.000 hektare untuk direstorasi pada 2025. Jika tercapai, ini akan mewakili percepatan dramatis dari upaya restorasi, den-



lebih baik. Ini lebih ke manajemen atau tata kelola dan pengembangan kelembagaannya. Salah satu rekomendasi studi Bank Dunia kali ini adalah sistem WPP (Wilayah Pengelolaan Perikanan) dan lembaga pendukungnya menjadi dasar pengelolaan perikanan laut. Sementara pengembangan sistem diakui

gung jawab pengelolaan perikanan lintas tingkat pemerintahan (nasional, provinsi, kabupaten) dan peman-gku kepentingan (pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, akademisi) memerlukan klarifikasi lebih lanjut, dengan langkah-langkah pengelolaan terkait dengan anjuran dan keputusan

gan KLHK melaporkan bahwa sekitar 50.000 ha hutan bakau telah ditorasi atau ditanam kembali antara 2010 dan 2016, rata-rata 7.000 ha per tahun. Namun biaya rehabilitasi relatif tinggi dibandingkan dengan tindakan konservasi yang dapat mengurangi hilangnya mangrove.

Toh Indonesia memiliki moratorium konversi lahan untuk hutan primer Indonesia. Ini dapat diperluas ke hutan bakau yang memiliki nilai ekologi, penyerapan karbon, dan ekonomi yang sama tinggi. Saat meninjau Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional (NDC), Indonesia dapat mempertimbangkan untuk memasukkan mangrove dalam baseline emisi penggunaan lahannya untuk memungkinkan mangrove menghasilkan pembayaran pengurangan emisi dalam skema berbasis karbon seperti REDD+. Kejelasan yang lebih besar seputar tanggung jawab kelembagaan untuk melestarikan dan memulihkan bakau akan membantu memfasilitasi kebijakan ini.

Sedangkan di bidang keuangan, studi Bank Dunia menyoroti soal pembiayaan, insentif, dan investasi. Misalnya, layanan dan infrastruktur dasar yang lebih baik diperlukan untuk mengelola polusi dan sampah di seluruh Indonesia. Investasi yang dibutuhkan untuk daerah perkotaan saja diperkirakan melebihi lima miliar dolar AS. Investasi dapat ditargetkan pada kawasan prioritas tinggi untuk pengurangan sampah laut, seperti kota pesisir dan tepi sungai, serta lokasi wisatanya.

Lebih praktis lagi, pembersihan pantai dapat digunakan untuk mengatasi penumpukan plastik, terutama di wilayah pesisir dengan nilai ekosistem dan pariwisata yang sensitif, dan untuk meningkatkan kesadaran akan masalah tersebut. Pembersihan ini dapat memanfaatkan dukungan masyarakat dengan bekerja sama dengan sekolah dan kelompok masyarakat, yang juga dapat membantu mengurangi biaya.

Untuk destinasi pesisir yang berisiko penuh sesak, langkah-langkah untuk mengelola arus pengunjung akan bermanfaat. Ini termasuk: (1) penggunaan harga berjenjang dengan biaya akses yang lebih tinggi untuk daerah yang

lebih rentan; (2) "harga kemacetan," di mana biaya masuk di atas rata-rata dikenakan untuk lokasi wisata tertentu selama periode permintaan puncak; (3) ambang batas pengeluaran minimum untuk wisatawan; (4) teknologi untuk mengontrol arus kerumunan seperti aplikasi penjadwalan yang mengalokasikan pengunjung ke slot waktu tertentu di atraksi utama; dan (5) pengembangan objek wisata alternatif untuk mengalihkan dan mendistribusikan kembali pengunjung dari objek wisata populer namun rentan lingkungan. Tindakan yang mempengaruhi penetapan harga dapat ditentukan berdasarkan pendapatan atau asal un-

yang dibuang.

Peraturan EPR (extended producer responsibility) terkait limbah ini akan mendapatkan keuntungan dari penguatan kelembagaan untuk pemantauan dan penegakan hukum dan dapat diperluas dari waktu ke waktu untuk mendukung transisi ke ekonomi daur ulang. Peraturan tersebut, yang disahkan pada akhir 2019 dan sedang diterapkan, dapat dilengkapi dengan langkah-langkah lain seperti sistem pengembalian deposit, standard dan pedoman teknis untuk bahan yang dapat didaur ulang, dan persyaratan konten daur ulang minimum dalam produk tertentu yang memungkinkan



tuk memastikan akses yang adil bagi wisatawan lokal.

Pajak dan larangan plastik dapat diperluas untuk meningkatkan transisi ke produk alternatif atau dapat digunakan kembali. Persetujuan 2020 oleh parlemen atas proposal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memasukkan plastik tertentu sebagai barang kena cukai merupakan langkah maju yang penting. Insentif finansial juga dapat diberikan untuk mengurangi sampah plastik dari aktivitas laut, seperti kehilangan atau pembuangan alat tangkap. Program dapat dibangun berdasarkan pengalaman contoh di Papua dan Jawa yang membayar nelayan untuk mengumpulkan jaring

secara teknis dan ekonomis.

Koordinasi internasional seputar langkah-langkah ini akan membantu menciptakan pasar yang cukup besar bagi sektor swasta untuk berinvestasi. Pilihan untuk pengadaan publik yang memprioritaskan bahan daur ulang juga dapat dieksplorasi.

Semua perlu perhitungan dan langkah secara rinci. Tujuannya adalah saling menyelamatkan perekonomian bangsa dan lautan sebagai sumber kesejahteraannya. Termasuk mana yang bisa kita lakukan sendiri, mana yang memerlukan bantuan orang lain. Bangsa yang maju senantiasa bekerja lebih keras dan lebih cerdas dari bangsa lainnya. ●

EMISI

Gunawan Effendi

Apa yang terbayang ketika mendengar kata emisi? Mungkin tergantung pada kata susulannya. Emisi saham akan berbeda implikasinya dengan emisi karbon, misalnya.

Emisi saham lebih ke ekonomi mikro. Menyangkut usaha atau group bisnis, meskipun dampaknya dapat mengglobal juga. Namun emisi karbon sudah pasti berdampak global. Itu sebabnya ada kesepakatan global untuk mengurangi emisi karbon. Namanya Kesepakatan Paris.

Kesepakatan Paris berada dalam Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFCCC) yang mengawal reduksi emisi karbon dioksida efektif yang akan mulai berlaku pada tahun 2020. Persetujuan ini dibuat pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa 2015 di Paris, Prancis.

Perjanjian ini mengikat secara hukum tentang perubahan iklim. Tujuannya adalah membatasi pemanasan global hingga di bawah dua, malah jika memungkinkan hingga 1,5 derajat Celcius, dibandingkan dengan masa pra-industri. Dengan begitu, maka perjalanan revolusi industri yang sudah mencapai tahap 4.0 berdampak pada pemanasan global.

Ringkasnya, industri yang menghela kemajuan peradaban umat manusia ternyata meningkatkan suhu di seluruh lingkup bumi. Awalnya adalah emisi karbon: Sisa arang yang keluar dari proses segala macam kegiatan yang berasal dari pembakaran dalam kehidupan manusia. Malah hewan ternak pun mengeluarkan karbon yang turut menyumbang pemanasan global. Apalagi kendaraan berbahan bakar fosil, minyak dan gas, juga pertambangan mineral dan batubara.

Sebenarnya dunia sedang terdesak waktu dalam mengupayakan penurunan suhu global. Desakan waktu itu semakin terasa dari tahun ke tahun. Pemanasan global ternyata mencairkan bongkahan es di kutub utara maupun selatan. Rentetan dampaknya adalah permukaan laut yang naik di seluruh dunia.

Jika permukaan laut naik, ya sudah pasti akibatnya adalah kemungkinan banjir yang biasa dikenal dengan rob, luapan air laut yang mengalir ke daratan. Pada saat bersamaan, emisi karbon akibat semakin berkurangnya pepohonan dan areal hutan membuat angin lebih mudah bertiup tanpa halangan sehingga badai, topan, dan puting beliung, juga banjir bandang lebih mudah dan sering datang. Pendek kata, pemanasan global akan meningkatkan jumlah dan keseringan datangnya bencana alam.

Kita tak perlu menyebut satu per satu lokasi bencana yang belakangan lebih sering datang. Catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan, sepanjang 2020 saja terjadi 2.925 bencana hidrometeorologi, yang terkait dengan air dan iklim. Bukan cuma saat musim kelebihan air, melainkan juga ketika air berkurang sehingga kita mengalami kemarau dan kekeringan.

Tapi, seberapa jauh pemahaman tentang pemanasan global dan dampak bendanya ini sampai ke kesadaran umat manusia? Terlebih untuk masyarakat yang masih sering berhadapan dengan kesulitan mencukupi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, juga permukiman?

Masyarakat di negara maju boleh jadi memiliki tingkat

pemahaman dan kesadaran yang lebih tinggi tentang emisi karbon yang membahayakan. Juga tindakan konkretnya dalam upaya mengurangi emisi karbon yang pada gilirannya akan menurunkan suhu sebagaimana Kesepakatan Paris: Kendaraan (darat dan laut) yang tak menggunakan bahan bakar fosil, mobil dan motor bertenaga listrik sebagai contoh. Termasuk meninggalkan penggunaan batubara untuk bahan bakar.

Negara-kota yang lebih maju di kawasan Asia Tenggara seperti Singapura sudah merasakan banjir bandang yang berulang setidaknya dalam tiga tahun terakhir. Belakangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapat pujian dari Sekjen PBB Antonio Guterres. Tapi bagaimana dengan masyarakat kita yang beragam dan luas? ●





www.infoindonesia.id

INOVASI UNTUK NEGERI

info indonesia

Network

**INFO
PASANG
IKLAN**
KIKI IBRAHIM
+62 818 931 562



Lautan
informasi
di dunia maya
melalui jaringan
internet
memberikan
banyak
referensi
iNFO
kepada
masyarakat

JALAN MPR III NO. 5B
KELURAHAN CILANDAK
BARAT, KECAMATAN
CILANDAK, JAKARTA
SELATAN (12430)
TELP 021-27812397

EDISI 907 APRIL 2021



**PUAN: PEREMPUAN
LEBIH BERDAYA
DENGAN LITERASI**